

#### **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka memenuhi salah satu implementasi pokok pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelo laan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kota Medan telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu, dengan substansi/materi yang ditetapkan.

Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2024 ini berbasis Akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian Laporan Keuangan ini, substansinya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per 31 Desember 2024, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Per 31 Desember 2024, Neraca Per 31 Desember 2024, Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2024, Laporan Arus KAS (LAK) Per 31 Desember 2024, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2024, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Per 31 Desember 2024.

Selanjutnya, untuk mewujudkan informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, dan akuntabel maka Laporan Keuangan ini juga telah menyajikan semua data material dan informasi yang diperlukan baik yang bersifat pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, sumber daya ekonomi, ekuitas, saldo anggaran, dan arus kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang sehat dalam pemerintahan daerah.

Dengan demikian, diharapkan Laporan Keuangan TA. 2024 yang disusun ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi para pengguna laporan keuangan daerah untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024 sekaligus mewujudkan pemerintahan daerah yang semakin berakuntabilitas, termasuk memberikan umpan balik dalam pengelolaan APBD yang lebih baik berbasis kesejahteraan.



#### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	viii
LAPORAN REALISASI APBD	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL	6
LAPORAN ARUS KAS	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
BAB I PENDAHULUAN	11
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD	15
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	39
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	42
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	63
1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	63
2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	79
3. Penjelasan Pos-Pos Neraca	80
4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	108
5	127
3 1 1	130
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN	132
BAB VII PENUTUP	134
LAMPIRAN	
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH	



#### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
- (c) Neraca,
- (d) Laporan Operasional,
- (e) Laporan Arus Kas,
- (f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, sumber daya ekonomi, ekuitas, saldo anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



#### DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target dan Realisasi Belanja daerah urusan pendidikan TA. 2024
Tabel 2.	Target dan Realisasi Belanja daerah urusan Kesehatan TA. 2024
Tabel 3.	Target dan Realisasi Belanja daerah Pengendalian Dampak Inflasi TA. 2024 22
Tabel 4.	Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Pengendalian Inflasi TA. 2024 23
Tabel 5.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024
Tabel 6.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Urusan Pengawasan T.A 2024
Tabel 7.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Urusan Infrastruktur TA. 2024
Tabel 8.	PDRB Kota Medan ADHB dan ADHK Periode Tahun 2020-2024
Tabel 9.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kota Medan Periode 2020-2024
Tabel 10.	Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024
Tabel 11.	Inflasi Periode Tahun 2020-2024
Tabel 12.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020-2024
Tabel 13.	Rasio Gini 2020-2024
Tabel 14.	Tingkat Pengangguran Terbuka Periode Tahun 2020-2024
Tabel 15.	Angka Kemiskinan Periode Tahun 2020-2024
Tabel 16.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA 2024
Tabel 17.	Realiasi Pendapatan – LRA TA 2024 dan 2023.
Tabel 18.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah- LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 19.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 20.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 21.	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 22.	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 23.	Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA TA 2024 dan 2023 65
Tabel 24.	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 25.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA TA 2024 dan 2023 66
Tabel 26.	Rincian Pendapatan Transfer–LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 27.	Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 28.	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 29.	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 30.	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA TA 2024 dan 2023 68
Tabel 31.	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024 dan 2023
Tabel 32.	Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023
Tabel 33.	Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023
Tabel 34.	Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023
Tabel 35.	Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023
Tabel 36.	Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023
Tabel 37.	Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023
Tabel 38.	Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023
Tabel 39.	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023
Tabel 40.	Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023
Tabel 41.	Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023	76
Surplus/(Defisit) TA 2024 dan 2023	77
	77
Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023	77
Mutasi Kas di Kas Daerah Tahun 2024	80
Rincian Perhitungan Kas di BLUD Tahun 2024 dan 2023	81
Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024	81
Kas di Bantuan Operasional Sekolah per 31 Desember 2024 dan 2023	82
Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024	82
Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023	83
Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	83
Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 dan 2023	84
Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	84
Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan per 31 Desember 2024	85
Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan Per 31 Desember 2024 dan 2023	85
Piutang Retribusi sewa Bangunan milik Pemerintah Kota Medan	86
Rincian Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2024	86
Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023	87
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD Tahun 2024	87
Rincian Piutang Hasail Kerjasama Daerah 31 Desember 2024 dan 2023	88
Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	88
Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023	89
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 2023	89
	90
Piutang Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	90
Rincian Uang Muka Operasional pada Dinas Kesehatan Tahun 2024	91
Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023	91
Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 dan 2023	93
Penyertaan Modal pada Perumda Pasar per 31 Desember 2024 dan 2023	93
Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan per 31 Desember 2024 dan 2023	94
Penyertaan Modal pada Perumda Rumah Potong Hewan per 31 Desember 2024 dan 2023	94
Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023	95
Rincian Tanah per 31 Desember 2024	97
Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	98
Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023	100
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	100
Royalti Kerjasama BOT per 31 Desember 2024 dan 2023	100
Rincian Uang Muka Barang dan Jasa 2024	101
Rincian Piutang SKTJM per 31 Desember 2024 dan 2023	101
Rincian Piutang SKTJM per 31 Desember 2024 dan 2023	101
Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023	102
Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023  Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024	
Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023  Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024  Rincian Akumulasi Amostisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024	102 103 104
	Cas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 86.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024	104
Tabel 87.	Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023	105
Tabel 88.	Rincian Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024	105
Tabel 89.	Rincian Property Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	105
Tabel 90.	Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	106
Tabel 91.	Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023	106
Tabel 92.	Pendapatan Sewa Pemakaian Ruangan Tahun 2024	106
Tabel 93.	Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023	107
Tabel 94.	Saldo Pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023	108
Tabel 95.	Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	108
Tabel 96.	Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	109
Tabel 97.	Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	110
Tabel 98.	Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023	111
Tabel 99.	Saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023	111
Tabel 100.	Saldo Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023	112
Tabel 101.	Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 dan 2023	113
Tabel 102.	Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023	113
Tabel 103.	Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023	114
Tabel 104.	Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023	114
Tabel 105.	Saldo Beban Tahun 2024 dan 2023	115
Tabel 106.	Saldo Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023	116
Tabel 107.	Saldo Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023	116
Tabel 108.	Saldo Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023	117
Tabel 109.	Saldo Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023	118
Tabel 110.	Saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023	119
Tabel 111.	Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023	120
Tabel 112.	Saldo Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Tahun 2024 dan 2023	121
Tabel 113.	Perhitungan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024	122
Tabel 114.	Perhitungan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	122
Tabel 115.	Perhitungan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024.	123
Tabel 116.	Perhitungan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024	123
Tabel 117.	Perhitungan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	123
Tabel 118.	Perhitungan Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024	124
Tabel 119.	Perhitungan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024	124
Tabel 120.	Perhitungan Beban Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024	124
Tabel 121.	Beban Tak Terduga - LO Tahun 2024 dan 2023	125
Tabel 122.	Surplus/ (Defisit) - LO per 31 Desember 2024 dan 2023	127
Tabel 123.	Komponen Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024 dan 2023	127
Tabel 124.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023	128
Tabel 125.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023	128
Tabel 126.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023	129
Tabel 127.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2024 dan 2023	129
Tabel 128.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2024 dan 2023	130

Tabel 129.	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023	130
Tabel 130.	Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dan 2023	130
Tabel 131.	Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2024	131

#### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023
Lampiran 2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023
Lampiran 3.a	Rincian Kas di Kas Daerah per Sumber Dana
Lampiran 3.b	Rekonsiliasi Bank Sumut AC. 100.01.02.019344-0 per 31 Desember 2024
Lampiran 4	Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2023 Rekening Dana Kapitasi JKN
Lampiran 5.a	Kertas Kerja Dana Bos SD Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan
Lampiran 5.b	Kertas Kerja Dana Bos SMP Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan
Lampiran 6	Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2023 Rekening Dana BOK Puskesmas
Lampiran 7	Rekapitulasi Piutang Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 8.a	Daftar Tunggakan SPPR Pajak Reklame TA 2009 per 31 Desember 2024
Lampiran 8.b	Daftar Tunggakan Pajak Reklame Tahun 2010 per 31 Desember 2024
Lampiran 8.c	Daftar Tunggakan Pajak Reklame Tahun 2011 per 31 Desember 2024
Lampiran 8.d	Daftar Tunggakan Pajak Reklame Tahun 2012 per 31 Desember 2024
Lampiran 8.e	Daftar Piutang Pajak Reklame Tahun 2013 per 31 Desember 2024
Lampiran 8.f	Daftar Piutang Pajak Reklame Tahun 2021 per 31 Desember 2024
Lampiran 8.g	Daftar Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 per 31 Desember 2024
Lampiran 8.h	Daftar Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 per 31 Desember 2024
Lampiran 8.i	Daftar Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 per 31 Desember 2024
Lampiran 9	Pembagian Deviden Dan Pendapatan Kontribusi Tetap PD.Pasar 2024
Lampiran 10.a	Bagian Lancar Piutang Lain-lain BOT PT. Anugrah Prima
Lampiran 10.b	Bagian Lancar Piutang Lain-lain BOT PT. Rahmad Mulia
Lampiran 10.c	Bagian Lancar Piutang Lain-lain BOT PT. Multi Arta Semesta
Lampiran 10.d	Bagian Lancar Piutang Lain-lain BOT PT. Inti Griya Prima
Lampiran 11	Pembagian Pendapatan Kontribusi Tetap PUD Pasar 2024
Lampiran 12.a	Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 berdasarkan Klasifikasi Umur Piutang
Lampiran 12.b	Laporan Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2024
Lmapiran 12.c	Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun2024 berdasarkan Klasifikasi Umur Piutang
Lampian 12.d	Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya- Uang Muka Per 31 Desember 2024
Lampiran 12.e	Rekap Piutang Retribusi Sampah NonSKTJM, SKTJM dan PD Pasar per 31 Desember 2024
Lampiran 13	Daftar Beban Dibayar Dimuka atas Sewa Tempat dan Jasa Kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan per 31 Desember 2024
Lampiran 14	Daftar Persediaan per 31 Desember 2024
Lampiran 14.a	Kertas Kerja Mutasi Persediaan per 31 Desember 2024

Lampiran 14.b	Daftar Persediaan Kadaluarsa per 31 Desember 2024
Lampiran 15	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PT Bank SUMUT per 31 Desember
Zumphun 10	2024
Lampiran 16	Data Tanah/ Bangunan Milik Pemko Medan yang sertifikatnya sedang dalam pengurusan di Kantor Pertanahan Kota Medan
Lampiran 17	Daftar Tanah Pemerintah Kota Medan yang sedang dalam Sengketa Tahun 2024
Lampiran 18	KIB A Tanah per 31 Desember 2024
Lampiran 19	KIB B Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024
Lampiran 20	KIB C Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024
Lampiran 21	KIB D Jalan, Irigasi, danJaringan per 31 Desember 2024
Lampiran 22	KIB E Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024
Lampiran 23	KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024
Lampiran 24.a	Kertas Kerja Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024
Lampiran 24.b	Kertas Kerja Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024
Lampiran 24.c	Kertas Kerja Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024
Lampiran 24.d	Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024
Lampiran 25.a	Daftar Umur Piutang Angsuran – Piutang BOT PT Anugrah Prima
Lampiran 25.b	Daftar Umur Piutang Angsuran – Piutang BOT PT Multi ArtaSemesta
Lampiran 25.c	Daftar Umur Piutang Angsuran – Piutang BOT PT Inti Griya Prima Sakti
Lampiran 25.d	Daftar Umur Piutang Angsuran – Piutang BOT PT Inti Rahmad Mulia
Lampiran 26	Daftar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Lampiran 27	Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024
Lampiran 28	Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024
Lampiran 29	Kertas Kerja Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024
Lampiran 30	Kertas Kerja Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024
Lampiran 31	Kertas Kerja Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan
Lampiran 32	Rincian Utang PFK per 31 Desember 2024
Lampiran 33	Daftar Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2024
Lampiran 34	Daftar Utang Barang dan Jasa per 31 Desember 2024
Lampiran 35	Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024
Lampiran 36	Pendapatan Hibah Tahun 2024



## PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Ruplah)

Valaili						(Dalam Ruplah)
No.	Uralan	Ref.	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN		Assis			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	1.a.1).a)	2.963.036.949.123,00	2.483.892.895.537,00	83,83	2.108.199.782.497,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.a.1).b)	287.995.694.769,00	139.920.386.103,00	48,58	155,490,820,088,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.a.1).c)	18.630.706.918,00	16.973.995.298,79	91,11	15.934.174.811,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	1.a.1).d)	208.072.640.270,00	129.585.184.164,35	62,28	163.157.955.272,50
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		3.477.735.991.080,00	2.770.372.461.103,14	79,66	2.442.782.732.668,50
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
10	Dana Perimbangan					
11	Dana Bagi Hasil	1.a.2).a).(1)	208.897.527.000,00	275.734.243.000,00	131,99	231.740.767.929,00
12	Dana Alokasi Umum	1.a.2).a).(2)	1.931.432.611.000,00	1.927.311.908.517,00	99,79	1.678.680.488.000,00
13	Dana Alokasi Khusus Fisik	1.a.2).a).(3)	32.700.499.000,00	30.396.472.723,00	92,95	38.650.129.380,00
14	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.a.2).a).(4)	541.174.326.000,00	514.841.086.970,00	95,13	533.886.236.483,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		2.714.204.963.000,00	2.748.283.711.210,00	101,26	2.482.957.621.792,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		700 000 000 000 00	540.070.004.004.00		
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Umum dari	1.a.2).b).(1)	728.000.000.000,00	540.973.361.304,00	74,31	738.000.000.000,00
18	Pemerintah Provinsi  Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	1.a.2).b).(2)	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	100,00	40.000.000.000,00
19	(17 + 18)		868.000.000.000,00	680.973.361.304,00	78,45	778.000.000.000,00
20	Total Pendapatan Transfer (15 +19)		3.582.204.963.000,00	3.429.257.072.514,00	95,73	3.260.957.621.792,00
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		106.469.242.121.00	95.291.003.471,88	89,50	98.840.124.289,00
22	Pendapatan Hibah	1.a.3).a)	3.280.000.000,00	1.304.000.000,00	39,76	0,00
23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.a.3).b)	103.189.242.121,00	93.987.003.471,88	91,08	98.840.124.289,00
24	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Call Control of	106.469.242.121,00	95.291.003.471,88	89,50	98.840.124.289,00
25	(22 +23) JUMLAH PENDAPATAN (2 + 20 + 23)	in court	7.166.410.196.201,00	6.294.920.537.089,02	87,84	5.802.580.478.749,50
26	BELANJA					
27	Belanja Operasi					
28	Belanja Pegawai	1.b.1).a)	2.098.444.676.253,00	1.926.958.217.929,00	91,83	1.854.598.838.131,00
29	Belanja Ba <mark>rang</mark> dan Jasa	1.b.1).b)	2.647.001.058.562,00	2.421.257.635.488,98	91,47	2.571.197.143.166,28
30	Belanja Bunga	1.b,1).c)	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Hibah	1.b,1).d)	338.351.503.979,00	313.250.004.750,00	92,58	290.823.938.445,00
32	Belanja Bantuan Sosial	1.b,1).e)	111.459.378.316,00	103.141.248.725,00	92,54	72.337.930.235,00
33	Jumlah Belanja Operasi (28 s/d 32)		5.202.756.617.110,00	4.764.607.106.892,98	91,58	4.788.957.849.977,28



No.	Uralan	Ref.	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
34	Belanja Modal	and a second				
35	Belanja Modal Tanah	1.b.2).a)	99.826.874.013,00	39.241.989.901,00	39,31	102.440.925.657,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.b.2).b)	175.355.768.482,00	160.535.564.193,00	91,55	287.203.939.384,00
37	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.b.2).c)	1.215.100.679.477,00	856.812.504.048,00	70,51	404.944.131.783,00
38	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.b.2).d)	506.957.248.139,00	423.161.734.129,30	83,47	683.514.637.511,00
39	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.b.2).e)	9.515.277.846,00	8.300.145.086,00	87,23	15.263.874.596,00
40	Belanja Modal Aset Lain nya	1.b.2).f)	364.751.350,00	363.351.350,00	99,62	0,00
41	Jumlah Belanja Modal (35 s/d 40)	Name of the last o	2.007.120.599.307,00	1.488.415.288.707,30	74,16	1.493.367.508.931,00
42	BELANJA TAK TERDUGA			Annual control of the second control of the	en e	
43	Belanja Tak terduga	1.b.3).a)	25.213.206.034,00	5.325.272.212,00	21,12	116.184.409,00
44	Jumlah Belanja Tak Terduga (43)		25.213.206.034,00	5.325.272.212,00	21,12	116.184.409,00
45	JUMLAH BELANJA (33 + 41 +44)		7.235.090.422.451,00	6.258.347.667.812,28	86,50	6.282.441.543.317,28
46	SURPLUS/ (DEFISIT) (25- 45)		(68.680.226.250,00)	36.572.869.276,74	(53,25)	(479.861.064.567,78)
47	PEMBIAYAAN					Additional property and the control of the control
48	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
49	Penggunaan SILPA	1.d.1).a)	68.680.226.250,00	68.680.226.250,30	100,00	548.544.830.563,08
50	Koreksi SiLPA	1.d.1).b)	0,00	480.576,00	0,00	(3.539.745,00)
51	Pinjaman Daerah dari Lembaga keuangan Bank	1.d.1).c)	200.000.000.000,00	0.00	0,00	0,00
52	Jumlah Penerimaan (49 s/d 51)		268.680.226.250,00	68.680.706.826,30	25,56	548.541.290.818,08
53	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
54	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	1.d.2).a)	200.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Jumlah Pengeluaran (54)		200.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
56	PEMBIAYAAN NETO (52 – 54)		68.680.226.250,00	68.680.706.826,30	100,00	548.541.290.818,08
57	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (46 + 56)		0,00	105.253.576.103,04	0,00	68.680.226.250,30





# PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Awal	2.a	68.680.226.250,30	548.544.830.563,0
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	2.b	68.680.706.826,30	548.541.290.818,0
Sub Total		(480.576,00)	3.539.745,0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sub Total	2.c	105.253.576.103,04 105.253.095.527,04	68.680.226.250,3 68.683.765.995,3
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain	2.d	480.576,00 0, <b>0</b> 0	(3.539.745,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	2.e	105.253.576.103,04	68.680.226.250,3

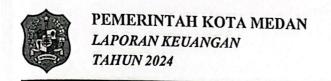




## PEMERINTAH KOTA MEDAN NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	3.a.1).a)	76.412.749.939,66	48.547.162.000,10
Kas di BLUD	3.a.1).b)	9.223.068.584,16	8.157.069.734,92
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.a.1).c)	8.734.858.922,22	11.963.406.673,28
Kas Dana BOSP	3.a.1).d)	6.925.556,00	12.587.842,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.a.1).e)	10.695.973.101,00	0,00
Piutang Pendapatan	3.a.1).f)	2.443.747.178.187,79	2.074.811.264.578,71
Piutang Lainnya	3.a.1).g)	980.173.622,00	64.326.850.349,16
Penyisihan Piutang	3.a.1).h)	(1.249.389.076.572,66)	(1.006.632.172.476,78)
Beban Dibayar Dimuka	3.a.1).i)	722.333.337,00	52.695.362.852,95
Persediaan	3.a.1).j)	118.130.931.488,10	222.764.156.401,40
Jumlah Aset Lancar		1.419.265.116.165,27	1.476.645.687.955,74
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.a.2).a)	342.972.182.106,53	349.617.364.759,53
Investasi Permanen lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		342.972.182.106,53	349.617.364.759,53
Jumlah Investasi Jangka Panjang		342.972.182.106,53	349.617.364.759,53
Aset Tetap			
Tanah	3.a.3).a)	27.347.896.278.812,98	27.872.998.527.222,62
Peralatan dan Mesin	3.a.3).b)	2.620.023.420.157,92	2.478.839.492.954,26
Gedung dan Bangunan	3.a.3).c)	2.403.235.145.537,87	2.271.471.270.233,69
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.a.3).d)	7.953.673.215.910,33	7.758.593.152.697,60
Aset Tetap Lainnya	3.a.3).e)	116.212.125.412,36	88.432.954.407,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	3.a.3).f)	1.259.501.223.563,42	487.593.247.783,52
Akumulasi Penyusutan	3.a.3).g)	(6.647.948.032.064,56)	(6.574.532.055.098,81)
Jumlah Aset Tetap		35.052.593.377.330,32	34.383.396.590.200,79
Aset Lainnya			
Tagihan Jangka Panjang	3.a.4).a)	19,071,085,975.82	10.142.112.094,88
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.a.4).b)	221.435.725.853,83	338.550.426.659,52
Aset Tidak Berwujud	3.a.4).c)	15.675.315.515,78	15.610.315.515,78
Aset Lain-lain	3.a.4).d)	600,534,282,965.46	336.069.483.000,53



Uraian	Ref.	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.a.4).e)	(10.980.151.249,39)	(10.259.232.473,62)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	3.a.4).f)	(88.640.676.777,40)	(10.404.898.283,79)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	3.a.4).g)	1.586.340.000,00	66.809.579.000,00
Jumlah Aset Lainnya	7.57	758.681.922.284,10	746.517.785.513,30
Properti Investasi	3.a.5)		
Properti Investasi Tanah	3.a.5).a)	971.983.748.646,52	0.00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	3.a.5).b)	32.363.159.976,60	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	3.a.5).c)	(9.153.106.595,64)	0,00
Jumlah Properti Investasi		995.193.802.027,48	0,00
JUMLAH ASET		38.568.706.399.913,70	36.956.177.428.429,36
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	3.b.1)		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.b.1).a)	122.464.511,98	122.464.511,98
Pendapatan Diterima Dimuka	3.b.1).b)	43.069.508.765,50	37.565.967.312,41
Utang Belanja	3.b.1).c)	342.995.832.125,07	401.464.629.780,76
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		386.187.805.402,55	439.153.061.605,15
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		386.187.805.402,55	439.153.061.605,15
EKUITAS		38.182.518.594.511,15	36.517.024.366.824,21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	The second secon	38,568,706,399,913.70	36.956.177.428.429,36





#### PEMERINTAH KOTA MEDAN **LAPORAN OPERASIONAL**

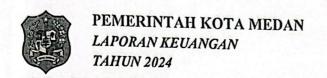
#### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	for any facility of the same			(Dalam	Rupiah)
Uraian	Ref.	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah	4.a.1).a)	2.639.154.600.959,58	2.297.146.128.644.45	342.008.472.315,13	14,89
Pendapatan Retribusi Daerah	4.a.1).b)	140.156.205.715,00	155.753.444.124,00	(15.597.238.409,00)	(10,01)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.a.1).c)	16.949.558.945,19	16.550.200.855,70	399.358.089,49	2,41
Lain-lain PAD yang Sah	4.a.1).d)	123.463.718.336,28	162.683.157.835,93	(39.219.439.499,65)	(24,11)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		2.919.724.083.956,05	2.632.132.931.460,08	287.591.152.495,97	10,93
Pendapatan Transfer					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.a.2).a)	2.683.060.472.210,00	2.525.140.357.863,00	157.920.114.347,00	6,25
Pemerintan Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.a.2).b)	890.376.573.768,00	752.191.599.801,00	138.184.973.967,00	18,37
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		3.573.437.045.978,00	3.277.331.957.664,00	296.105.088.314,00	9,03
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		a Chaire Ann			9
Pendapatan Hibah	4.a.3).a)	206.281.205.452,62	472.562.955.803,40	(266.281.750.350,78)	(56,35)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	4.a.3).b)	93.987.003.471,88	98.840.124.289,00	(4.853.120.817,12)	(4,91)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		300.268.208.924,50	571.403.080.092,40	(271.134.871.167,90)	(47,45)
JUMLAH PENDAPATAN		6.793.429.338.858,55	6.480.867.969.216,48	312.561.369.642,07	4,82
BEBAN					
Beban Operasi		1 ,			
Beban Pegawai	4.b.1).a)	1.925.803.044.254,01	1.849.595.102.229,00	76.207.942.025,01	4,12
Beban Persediaan	4.b.1).b)	655.668.205.163,72	773.937.057.013,19	(118.268.851.849,47)	(15,28)
Beban Jasa	4.b.1).c)	1.514.445.725.373,61	1.521.166.111.374,98	(6.720.386.001,37)	(0,44)
Beban Pemeliharaan	4.b.1).d)	93.028.131.667,94	115.028.842.179,33	(22.000.710.511,39)	(19,13)
Beban Perjalanan Dinas	4.b.1).e)	72.090.979.374,00	98.309.696.832,00	(26.218.717.458,00)	(26,67)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.b.1).f)	5.596.875.598,00	4.363.212.010,00	1.233.663.588,00	28,27
Beban Barang dan Jasa BOS	4.b.1).g)	0,00	69.399.758.869,99	(69.399.758.869,99)	(100,00)
Beban Hibah	4.b.1).h)	313.798.319.750,00	290.898.938.445,00	22.899.381.305,00	7,87
Beban Bantuan Sosial	4.b.1).i)	138.557.778.575,00	72.337.930.235,00	66.219.848.340,00	91,54
Beban Penyisihan Piutang	4.b.1).j)	242.805.501.395,19	115.522.517.021,03	127.282.984.374,16	110,18
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.b.1).k)	107.211.006.159,67	239.420.378.426,97	(132.209.372.267,30)	(55,22)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.b.1).l)	23.506.351.717,91	53.219.316.604,92	(29.712.964.887,01)	(55,83)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.b.1).m)	153.690.132.113,87	324.971.425.593,65	(171.281.293.479,78)	(52,71)



Uraian	Ref.	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Aset	4.b.1).n)	2.384.371.494,90	0,00	2.384.371.494,90	100,00
Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga		2.595.800.437,29	0,00	2.595.800.437,29	100,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud Beban Penyusutan Properti	4.b.1).o)	720.918.775,79	1.505.045.651,59	(784.126.875,80)	(52,10)
Investasi	4.b.1).p)	1.370.023.821,33	0,00	1.370.023.821,33	100,00
Jumlah Beban Operasi Beban Tidak Terduga		5.253.273.165.672,23	5.529.675.332.486,65	(276.402.166.814,42)	(4,99)
Beban Tidak Terduga		5.325.272.212,00	116.184.409,00	5.209.087.803,00	4.483,47
Jumlah Beban Tidak Terduga		5.325.272.212,00	116.184.409,00	5.209.087.803,00	4.483,47
JUMLAH BEBAN		5.258.598.437.884,23	5.529.791.516.895,65	(271.193.079.011,42)	(4,90)
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL		1.534.830.900.974,32	951.076.452.320,83	583.754.448.653,49	61,37
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Non Operasional					
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		556.820.502,92	0,00	556.820.502,92	100,00
Jumlah Surplus Non Operasional-LO		556.820.502,92	0,00	556.820.502,92	100,00
Defisit Non Operasional-LO					
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		9.518.101.013,89	7.756.258.464,00	1.761.842.549,89	22,72
Jumlah Defisit Non Operasional- LO	4.c.1	9.518.101.013,89	7.756.258.464,00	1.761.842.549,89	22,72
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	d v	(8.961.280.510,97)	(7.756.258.464,00)	(1.205.022.046,97)	15,54
	reconstruction for the			**	
SURPLUS/ DEFISIT	at the same	1.525.869.620.463,35	943.320.193.856,83	582.549.426.606,52	<b>561,76</b>





## PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN ARUS KAS

### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uralan	Ref.	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		2.483.892.895.537,00	2.108.199.782.497,00
Pendapatan Retribusi Daerah		139.920.386.103,00	155.490.820.088,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.973.995.298,79	15.934.174.811,00
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		129.585.184.164,35	163.157.955.272,50
Pendapatan Dana Bagi Hasil		275.734.243.000,00	231.740.767.929,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum		1.927.311.908.517,00	1.678.680.488.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Fisik		30.396.472.723,00	38.650.129.380,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik		514.841.086.970,00	533.886.236.483,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		540.973.361.304,00	738.000.000.000,00
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi		140.000.000.000,00	40.000.000.000,00
Pendapatan Hibah		1.304.000.000,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		93.987.003.471,88	98.840.124.289,00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.a.1)	6.294.920.537.089,02	5.802.580.478.749,50
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		1.926.958.217.929,00	1.854.598.838.131,00
Belanja Barang dan Jasa		2.421.257.635.488,98	2.571.197.143.166,28
Belanja Hibah		313.250.004.750,00	290.823.938.445,00
Belanja Bantuan Sosial		103.141.248.725,00	72.337.930.235,00
Belanja Tak Terduga		5.325.272.212,00	116.184.409,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.a.2)	4.769.932.379.104,98	4.789.074.034.386,28
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.524.988.157.984,04	1.013.506.444.363,22
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Belanja Tanah		39.241.989.901,00	102.440.925.657,00
Belanja Peralatan dan Mesin		160.535.564.193,00	287.203.939.384,00
Belanja Gedung dan Bangunan		856.812.504.048,00	404.944.131.783,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		423.161.734.129,30	683.514.637.511,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		8.300.145.086,00	15.263.874.596,00
Belanja Aset Lainnya		363.351.350,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.b.1)	1.488.415.288.707,30	1.493.367.508.931,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.488.415.288.707,30)	(1.493.367.508.931,00)



Uralan	Ref.	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			3,30
Jumlah Arus Keluar Kas	5.c.1)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		390.915.553.710,00	513.469.421.000,5
Saldo Sisa UP TA 2023		0,00	0,0
Jumlah Arus Masuk Kas	5.d.1)	390.915.553.710,00	513.469.421.000,5
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Flhak Ketlga (PFK)		390.915.553.710,00	513.469.421.000,5
Saldo Sisa UP TA 2024	N. A. C.	0,00	0,0
Jumlah Arus Keluar Kas		390.915.553.710,00	513.469.421.000,5
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.d.2)	0,00	0,0
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas		36.572.869.276,74	(479.861.064.567,78
Saldo Awal Kas		68.680.226.250,30	548.544.830.563,0
Koreksi Saldo Awal Kas di BUD		480.576,00	(3.539.745,00
Saldo Akhir Kas di BUD		105.253.576.103,04	68.680.226.250,3
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,0
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,0
Saldo Akhir Kas		105.253.576.103,04	68.680.226.250,30





### PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024 (Audited)	2023 (Audited)
EKUITAS AWAL	36.517.024.366.824,21	34.753.438.198.736,42
SURPLUS/(DEFISIT LO)  Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	1.525.869.620.463,35	943.320.193.856,83
Koreksi Ekuitas Lainnya	139.624.607.223,59	820.265.974.230,96
EKUITAS AKHIR	38.182.518.594.511,15	36.517.024.366.824,21



#### BAB I PENDAHULUAN

#### 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam diskusi kebijakan publik penerapan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang efisien dan efektif menjadi isu dan tuntutan yang luas sekaligus menjadi harapan publik yang besar guna mewujudkan tujuan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang lebih baik. Pemerintahan daerah yang baik antara lain ditandai dengan adanya pemerintahan yang berbasis partisipatif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Medan secara sistematis dan terencana terus mendorong reformasi birokrasi termasuk di bidang pengelolaan keuangan daerah, antara lain melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang pengelolaan keuangan daerah, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, standar operasional prosedur dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan dan area area perubahan lainnya yang selaras. Pemerintah Kota Medan telah berupaya untuk mewujudkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memenuhi prinsip taat azas, tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang diterima secara umum dalam bentuk laporan keuangan.

Dengan demikian penyusunan laporan keuangan ini pada prinsipnya dimaksudkan dalam rangka memberikan gambaran kinerja dan keadaan keuangan Pemerintah Kota Medan dalam tahun anggaran 2024. Sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercaya, guna mewujudkan misi Medan BERSIH, dan misi pembangunan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan 2021 – 2026.

#### 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Selanjutnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2024 berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

- i. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah sebahagian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- n. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2023;
- p. Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Perda Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
- r. Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Perda Kota Medan Nomor 90 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023;
- v. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024;
- w. Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Perwal Medan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal Medan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan;
- x. Perwal Medan Nomor 74 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan;
- y. Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan;
- z. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- aa. Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Medan.
- bb. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024.

#### 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistematika penulisan CaLK Pemerintah Kota Medan TA 2024, adalah sebagai berikut.

#### Bab I Pendahuluan

- 1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 3. Sistematika penulisan CaLK

### Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- 1. Ekonomi makro
- 2. Kebijakan keuangan
- 3. Mandatory Spending
- 4. Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan

#### Bab IV Kebijakan akuntansi

- 1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

#### Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - a. Pendapatan LRA
    - 1) PAD LRA
    - 2) Pendapatan transfer LRA
    - 3) Lain-lain PAD yang sah LRA
  - b. Belanja
    - 1) Belanja operasi
    - 2) Belanja modal
    - 3) Belanja tak terduga
  - c. Transfer
  - d. Surplus/(defisit)
  - e. Pembiayaan
    - 1) Penerimaan pembiayaan daerah
    - 2) Pengeluaran pembiayaan daerah
- 2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
  - a. Saldo anggaran lebih awal
  - b. Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan
  - c. SiLPA/SiKPA
  - d. Saldo anggaran lebih akhir
- 3. Penjelasan pos-pos neraca
  - a. Aset
    - 1) Aset lancar
    - 2) Investasi jangka panjang
    - 3) Aset tetap

- 4) Aset lainnya
- b. Kewajiban
  - 1) Kewajiban jangka pendek
  - 2) Kewajiban jangka panjang
- c. Ekuitas
- 4. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
  - a. Pendapatan LO
    - 1) PAD LO
    - 2) Pendapatan transfer LO
    - 3) Lain-lain PAD yang sah LO
  - b. Beban
    - 1) Beban operasi
    - 2) Beban transfer
    - 3) Defisit operasional
    - 4) Beban luar biasa
    - 5) Surplus/(defisit) LO
- 5. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
  - a. Arus kas bersih dari aktifitas operasi
  - b. Arus kas bersih dari aktifitas investasi
  - c. Arus kas bersih dari aktifitas pendanaan
  - d. Arus kas bersih dari aktifitas transitoris
- 6. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - a. Ekuitas awal
  - b. Surplus/(defisit) LO
  - c. Koreksi Ekuitas Lainya
  - d. Ekuitas akhir
- 7. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

#### Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi keuangan

#### Bab VII Penutup

#### BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 1. Ekonomi Makro

Secara umum ekonomi makro merupakan hal-hal yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat secara luas, termasuk sector swasta dan pasar. Untuk itu dalam rangka mengoptimalkan hasil hasil pembangunan kota maka pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Medan tetap memiliki harmoni sekaligus mengacu dan mendukung kebijakan pembangunan regional dan nasional sesuai dengan kondisi obyektif dan potensi sera situasi Kota Medan. Kebijakan pembangunan Kota Medan Tahun 2024 pada prinsipnya merupakan penjabaran yang lebih terukur dan terperinci dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021-2026, khususnya untuk tahun ke empat. Dengan demikian, pengelolaan Keuangan daerah juga dimaksudkan dan ditujukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian kota secara berkelanjutan.

Selanjutnya, gambaran secara menyeluruh dari kondisi dan kemajuan perekonomian suatu daerah secara umum dapat diperoleh dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonominya yang dikenal dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, maka yang dihitung adalah nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur. Secara substansi, penyusunan target kerangka ekonomi makro tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, sekaligus merupakan perwujudan implementatif jangka pendek dari RPJMD Kota Medan untuk Tahun 2024. Selain itu, substansi dari kerangka ekonomi makro selalu memperhatikan berbagai perkembangan terkini kinerja perekonomian baik berdimensi global, nasional dan regional. Oleh karena itu, kerangka ekonomi makro ini dijadikan dasar untuk menjelaskan kondisi ekonomi makro Kota Medan Di sisi lain, oleh karena perekonomian Kota Medan bercirikan ekonomi perkotaan maka Tahun 2024. struktur ekonomi Kota Medan menunjukkan bahwa sektor tersier yang terdiri dari sub-sektor perdagangan, transportasi dan lain-lain merupakan sub-sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB yang tercatat sebesar 66,36 persen selama tahun 2024, selanjutnya diikuti oleh sektor sekunder yang bersumber dari industry pengolahan dan lain-lain dengan kontribusi 32,74 persen dan sektor primer yang bersumber dari sub-sektor pertanian, kehutanan dan lain-lain sebesar 0,90 persen. Ciri perekonomian daerah seperti Kota Medan umumnya juga memberikan nilai tambah yang relative tinggi dari sisi produksi.

Dengan demikian diketahui struktur ekonomi Kota Medan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) tidak banyak mengalami perubahan, sekaligus menggambarkan ciri ekonomi perkotaan yang didominasi ekonomi sektor tersier diikuti sektor sekunder dan primer sehingga yang juga menunjukkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan

#### 2. Kebijakan Keuangan

Secara umum kebijakan keuangan merupakan kebijakan yang dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian, dipercaya serta mendatangkan manfaat dan dampak yang sebesar besarnya kepada masyarakat luas. Di sisi lain dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kota, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang kreatif, efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel, optimal dan berbasis prestasi kinerja. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus disertai dengan kejelasan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil, bahkan manfaat dan dampak) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal, dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, serta selalu harus memperhatikan situasi dan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan harus berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana dan anggaran bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Medan secara berkelanjutan. Secara umum langkah-langkah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Medan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan hak-hak keuangan yang lebih luas, kreatif dan efektif dalam rangka mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah secara lebih berimbang, dinamis dan optimal melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang secara potensial dapat dikembangkan.
- b. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah guna meningkatkan kapsitas dan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan kota.
- c. Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah tahun 2024, maka upaya-upaya efektif dan inovatif dalam penggalian dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah terus dilakukan lebih optimal sehingga sumber pendapatan daerah tidak lagi harus tergantung kepada hanya satu atau dua jenis pajak dan retribusi daerah yang dikelola.
- d. Pengembangan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah agar ketergantungan dan resiko dapat disebar dan terjadinya subsidi silang di samping digitalisasi administrasi perpajakan daerah.
- e. Di samping itu, mengingat kedudukan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi dan kota jasa, maka kegiatan-kegiatan yang berbasiskan ekonomi sektor jasa dan ekonomi kreatif dijadikan alternatif sumber pendapatan baru sebagai basis pendapatan asli daerah.
- f. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja operasi, terutama belanja pegawai, belanja hibah dan sosial.
- g. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja barang/jasa dan belanja modal, terutama yang terkait dengan belanja program dan kegiatan untuk urusan wajib dan pilihan.
- h. Peningkatan koordinasi dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 285 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dapat memberikan konsekuensi terhadap hak-hak keuangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab secara profesional dalam hal pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Kota Medan.

#### 3. Mandatory Spending

Dalam perencanaan dan penganggaran cukup penting adanya harmonisasi dan keselarasan yang kuat antara prioritas pembangunan nasional dan daerah sehingga sumber-sumber pembiayaan pembangunan dapat lebih disinergikan dan dioptimalkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan secara

keseluruhan lebih optimal yang berorientasi kepada kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Harmonisasi dan keselarasan politik dan kebijakan anggaran tersebut juga akan menciptakan manfaat dan dampak ganda bagi percepatan dan perluasan pembangunan pusat-daerah sekaligus menurunkan ketimpangan serta menghindari alokasi anggaran yg kurang efektif.

Di sisi lain diketahui juga setiap daerah memiliki situasi, kondisi, dan potensi sumberdaya pembangunan yang berbeda, sehingga secara empiris pembangunan daerah sangat mungkin memunculkan adanya daerah yang proses pembangunannya mengalami kemajuan dan keberlanjutan pembangunan cukup pesat, namun di sisi lain ada juga daerah yang cenderung tertinggal, atau lebih lambat kemajuannya. Oleh karena, tujuan pembangunan adalah mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan ekonomi dan sosial, maka untuk menutupi kesenjangan potensi sumber daya pembangunan antar daerah, Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan Dana Transfer kepada daerah, termasuk Kota Medan, sebagai bagian yang terintegrasi dengan komposisi struktur pendapatan daerah dalam APBD. Kedudukan, fungsi, dan peranan APBD itu sendiri harus menjadi instrument harmonisasi dan penyelarasan pengelolaan pendapatan dan belanja pembangunan sekaligus menjadi stimulus dalam perekonomian kota, termasuk kualitas pelayanan publik lainnya.

Untuk menjadikannya sebagai stimulus perekonomian kota, maka belanja daerah dalam APBD secara empiris juga harus dialokasikan pada program dan kegiatan yang dapat memberikan kemudahan, fasilitas, dan insentif dalam kegiatan sosial ekonomi kota, sehingga dapat baik secara langsung maupun tidak langsung menambah produksi, lapangan kerja, menurunkan pengangguran dan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Hal ini lah yang mendasari juga dalam struktur belanja daerah diatur alokasi-alokasi belanja daerah yang bersifat mandatory spending.

Diketahui tujuan pokok ditetapkannya alokasi belanja daerah yang bersifat mandatory spending pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengurangi masalah dan tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, sesuai dengan fungsi alokatif dan distributif APBD serta tujuan dan sasaran sekaligus target kinerja pembangunan yang ditetapkan. Sedangkan dari sisi kebijakan, maka pemenuhan mandatory spending merupakan salah satu bentuk taat azas serta komitmen kuat Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan ketentuan dan peraturan perundang-undangan secara konsisten, termasuk menyediakan kemudahan, fasilitas dan intensif dalam perekonomian kota, khususnya pada sector-sektor fundamental dalam kehidupan masyarakat luas.

Secara umum mandatory spending merupakan bentuk penyaluran anggaran Negara/Daerah yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Adapun struktur belanja daerah yang wajib dialokasikan dengan proporsi tertentu dalam APBD TA. 2024 antara lain: belanja urusan dan fungsi pendidikan dimana ditetapkan minimal sebesar 20 persen dari total belanja APBD sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasional Pasal 49 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan Pasal 81 ayat (1) dan ketentuan pelaksanaan dan teknis lainnya.

Di samping itu, jenis mandatory spending lainnya adalah alokasi besaran belanja untuk urusan dan fungsi kesehatan dimana ditetapkan minimal 10 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (2). Selanjutnya, dana transfer umum dimana ditentukan paling sedikit 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah, termasuk di dalamnya juga program perlindungan sosial dan pengendalian inflasi sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 500/4825/SI Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan penyelenggaraan perlindungan sosial.

Demikian juga alokasi belanja pegawai dan belanja mandatory spending lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA.2024. Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk belanja pegawai ditetapkan maksimal 30 persen dari total aggregate belanja daerah. Untuk melengkapi data dan informasi pokok materi dalam laporan keuangan ini, baik untuk target dan realisasinya dalam APBD TA. 2024 untuk urusan desentralisasi dan otonomi daerah yang termasuk mandatory spending lebih rinci dapat disajikan sebagai berikut:

#### a. Urusan Pendidikan

Sebagaimana diketahui pembangunan pendidikan merupakan bagian pokok amanah konstitusi dan sering dipahami sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan nasional daerah. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat akan menjadi sumber daya social yang cukup penting menuju Indonesia emas 2045.

Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus sebagai salah satu norma dan ketentuan pokok dalam penyusunan APBD guna mewujudkan APBD yang taat azas, sehat dan sinergis, maka mandatory spending alokasi anggaran pendidikan dalam belanja daerah APBD TA. 2024 tercatat sebesarRp1.612.323.199.458,00 baik untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan social, maupun belanja modal dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.396.242.564.149,00 atau mencapai 86,60 persen dari target yang ditetapkan.

Dengan demikian, sejak ketentuan mandatory spending urusan dan fungsi pendidikan ini ditetapkan sampai dengan tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota Medan tetap secara konsisten selalu memenuhi mandatory spending dengan jumlah alokasi anggaran untuk urusan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dengan capaian realisasi yang cukup baik. Secara lebih lengkap anggaran dan realisasi belanja daerah yang membentuk pembiayaan dan belanja pembangunan pendidikan TA. 2024 lebih rinci disajikan sebagai berikut

Tabel 1. Target dan Realisasi Belanja daerah urusan pendidikan TA. 2024

No.	Kor	nponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a.	Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.358.068.706.708	1.250.626.840.004	92,09
		1) Belanja Operasi	1.272.291.293.908	1.169.984.202.004	91,96
		a. belanja pegawai	732.479.341.339	670.336.683.215	91,52
		b. belanja barang dan jasa	300.975.473.119	283.585.540.415	94,22
		c. belanja hibah	204.836.479.450	183.349.261.574	89,51
		d. belanja bantuan sosial	34.000.000.000	32.712.716.800	96,21
		2) Belanja Modal	85.777.412.800	80.642.638.000	94,01
	b.	Urusan Bidang Perpustakaan:	14.906.940.398	14.397.409.375	96,58
	С	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	239.347.552.352	131.218.314.770	239.347.552.352
		Dinas Pemuda dan Olah Raga     Dinas Perumahan Kawasan	11.226.298.352	10.293.590.935	91,69
		2 Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	228.121.254.000	120.924.723.835	53,01
	d	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, rusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan,	0,00	0,00	0,00
		antara lain 1 Belanja Transfer 2 Belanja bantuan keuangan	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendidikan	1.612.323.199.458	1.396.242.564.149	86,60
3	Total Belanja Daerah	7.235.090.422.451		
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	22,28%		

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa alokasi anggaran pendidikan melalui belanja APBD TA. 2024 diselenggarakan setidaknya oleh 4 (empat) OPD utama seperti Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa penyelenggaraan pembangunan pendidikan sesungguhnya membutuhkan sinergi lintas sektoral antar OPD sekaligus juga kolaborasi pembiayaan serta program kerja yang erat dan terintegrasi dengan urusan-urusan pemerintahan daerah lainnya. Secara keseluruhan rasio anggaran pendidikan dalam APBD TA.2024 tercatat sebesar 22,28 persen dari total aggregate belanja daerah TA. 2024.

Melalui alokasi belanja daerah urusan pendidikan yang relatif cukup besar tersebut serta penyelenggaraannya yg cukup efektif maka berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan untuk tahun 2024 diketahui pembangunan pendidikan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dimana salah satunya ditunjukkan oleh nilai Indeks Pendidikan yang cenderung terus meningkat dari 0,79 point tahun 2021 menjadi 0,80 point tahun 2024. Selanjutnya, peningkatan derajat kualitas pendidikan juga ditunjukkan oleh peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan pemerataan kualitas satuan pelayanan pendidikan yang ada, dimana rasio fasilitas prasarana dan sarana pendidikan yang ada di Kota Medan dengan jumlah anak usia sekolah yang ada relative telah mencukupi kecuali untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga masyarakat luas merasakan dan menikmati kebijakan pembangunan pendidikan yang semakin berkualits sekaligus mengarah kepada Kota Medan emas tahun 2045.

Beberapa program pengembangan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan yang diselenggarakan sebagai salah satu program utama adalah dalam bentuk bea-siswa kepada siswa miskin dan siswa berprestasi, termasuk program-program pendidikan yang mencerminkan "Pendekatan Merdeka Belajar", sehingga diharapkan melalui program-program pendidikan yang semakin berkualitas dan konsisten, Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin tinggi dan berkelanjutan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan Kota Medan unggul, guna mewujudkan generasi emas tahun 2045.

#### b. <u>Urusan Kesehatan</u>

Sebagaimana diketahui salah satu urusan desentralisasi dan otonomi daerah yang juga cukup penting dan strategis adalah urusan dan fungsi kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian pokok pembangunan nasional yg bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu dan keluarga agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya secara berkelanjutan. Di Kota Medan jutaan orang setiap tahunnya melakukan kunjungan keberbagai fasilitas kesehatan baik sekedar untuk memeriksakan kesehatannya maupun untuk mendapatkan tindakan kuratif dari berbagai jenis penyakit yang diderita. Dengan demikian pengeluaran masyarakat untuk dapat hidup sehat relative cukup tinggi dan tidak semua masyarakat memiliki kemampun keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatannya.

Oleh karena pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan pembangunan maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2024 salah satu mandatory spending lainnya adalah ketentuan tentang alokasi anggaran untuk urusan dan fungsi kesehatan, dimana alokasi belanjanya ditetapkan minimal sebesar 10 persen dari total belanja APBD, diluar belanja gaji dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan di bidang kesehatan.

Sebagaimana halnya alokasi untuk urusan pendidikan, maka sesuai dengan struktur belanja daerah TA. 2024 secara prinsip Pemerintah Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir juga telah memenuhi kewajiban alokasi belanja urusan kesehatan dimaksud termasuk dalam APBD TA. 2024 khususnya untuk kebutuhan pembangunan kesehatan. Kepentingan pokok dan kebutuhan pemenuhan mandatory spending urusan kesehatan tersebut juga dimaksudkan dalam rangka mengelola tantangan dan masalah kesehatan yang semakin kompleks, seperti halnya kebutuhan penerapan Universal Health Coverage (UHC) untuk pemerataan akses pelayanan kesehatan dan kasus-kasus penyakit luar biasa di bidang kesehatan lainnya, seperti isu kesehatan penyakit menular, stunting dan lain-lain. Bagi Pemerintah Kota Medan alokasi anggaran pembangunan kesehatan juga sekaligus sebagai upaya memenuhi komitmen internasional yang dituangkan dalam millenium development goals.

Melalui alokasi belanja daerah yang telah ditetapkan dalam urusan dan fungsi kesehatan tersebut maka indeks kesehatan masyarakat yang merupakan satu nilai tunggal untuk kesehatan yang dapat menunjukkan bagaimana kesehatan berubah seiring waktu tercatat juga cenderung meningkat dari 0,81 point tahun 2021 menjadi 0,84 point tahun 2024. Lebih dari itu proporsi belanja kesehatan yang signifikan tersebut, melalui berbagai program efektif dan strategis lainnya yang diselenggarakan dalam tahun 2024 juga mampu untuk tetap mempertahankan persentase cakupan layanan jaminan kesehatan (UHC) tetap menjadi 100 persen, sehingga sebagaimana halnya dalam tahun 2023 maka dalam tahun 2024 masyarakat kota tetap menikmati pelayanan kesehatan tanpa bayar di semua unit pelayanan kesehatan yang ditetapkan, dengan cukup membawa Kartu Tanda Penduduk. Catatan capaian kinerja yang lain adalah indicator Fertility Rate yang merupakan angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan yaitu pada kelompok usia 15-49 tahun dimana juga tercatat cenderung menurun dari 2,01 tahun 2021 menjadi 1,90 tahun 2023 termasuk skala pola pangan harapan yang merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan kepada sumbangan atau kontribusi energy dan kelompok pangan utama dan suatu pola ketersediaan atau pola konsumsi pangan yang tercatat juga cenderung meningkat dari 89,80 tahun 2021 menjadi 93,20 tahun 2023 sehingga mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, melalui pemenuhan mandatory spending anggaran belanja urusan kesehatan TA. 2024, Pemerintah Kota Medan mampu terus mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang semakin optimal dalam TA. 2024 dan kebutuhan penyelenggaraan program kesehatan lainnya seperti penurunan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan penanggulangan berbagai penyakit luar biasa lainnya sehingga secara tidak langsung juga ikut mendukung pengurangan kemiskinan ekstrim dan mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan secara sinergis dan berkelanjutan.

Dapat disampaikan penganggaran kebutuhan belanja kesehatan tersebut paling tidak terkait dengan integrasi dan kolaborasi 1 (satu) OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan 2 (dua) RSU Daerah yaitu RSU DR. Pirngadi dan RSU Bachtiar Djafar serta seluruh Puskesmas yang ada dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 2. Target dan Realisasi Belanja daerah urusan Kesehatan TA. 2024

No.	Kor	mpone	en Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentas (%)
1	a.	Bela	ınja Dinas Kesehatan			
		1)	Belanja Operasi			
			a. belanja pegawai	446.036.308.252,00	438.455.539.208,00	98,30
			b. belanja barang dan jasa	388.600.938.495,00	360.682.722.129,00	92,82
			b. Hlbah	500.000.000,00	-	-
		2)	Belanja Modal	24.243.640.581,00	22.121.043.428,00	91,24
2		ggaran sehatar	dan Realisasi Belanja า	859.380.887.328,00	821.259.304.765	95,56
3	Tot	al Bela	anja Daerah	7.235.090.422.451,00		0,00
4	Gaj	i ASN		1.029.874.331.945,00		0,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN		anja Daerah di luar Gaji	6.205.216.090.506,00		0,00
6		sio ang 00%	ggaran Kesehatan (2 : 5)	13,85%		

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa alokasi belanja urusan dan fungsi kesehatan dalam TA.2024 tercatat sebesar Rp. 859.380.887.328,00 baik untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan belanja modal, atau 13,85 persen dari total belanja daerah dengan realisasi sebesar Rp 821.259.304.765,00 atau sebesar 95,56 persen dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, realisasi anggaran urusan kesehatan ini juga tentu meningkatkan kinerja makro pembangunan kesehatan lainnya, seperti usia harapan hidup, dan lain-lainnya.

#### c. Pengendalian Inflasi dan Dampak Inflasi

Indikator ekonomi makro yang diketahui secara luas memberikan dampak besar kepada masyarakat khususnya dari sisi konsumsi adalah inflasi. Secara umum inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta terus menerus dalam periode tertentu. Inflasi bisa disebabkan, misalnya didorong kenaikan harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat, atau yang sering diperbincangkan misalnya adanya kebijakan pengurangan subsidi yang mengakibatkan kenaikan sembilan kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, listrik, atau tidak seimbangnya permintaan dan penawaran, sehingga memunculkan kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam jangka panjang di pasar.

Adanya kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian daerah dalam jangka panjang walaupun tidak sepenuhnya tentu bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, dan apabila inflasi terjadi pada kebutuhan masyarakat yang bersifat primer, tentunya bisa menurunkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat menggangu stabilitas perekonomian sekaligus meningkatkan kelompok miskin.

Oleh karena itu, sejak akhir tahun 2022 sebagai akibat dampak krisis ekonomi global, Indonesia dan termasuk Kota Medan secara sistematis dan sinergis mengambil langkah-langkah antisifatif untuk menjaga stabilitas perekonomian kota, dimana salah satunya adalah melalui program pengendalian inflasi dan perlindungan social pengurangan dampak inflasi serta dampak sosial yang berpotensi timbul. Sebagai dasar mandatory spending dari pengelolaan program pengendalian inflasi dan perlindungan social pengurangan dampak sosial tahun 2024, adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/ PMK.07/ 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi

Tahun Anggaran 2022 dan tetap diterapkan sampai tahun 2023 dan tahun 2024 dimana salah satu substansi yang diatur adalah kewajiban bagi setiap daerah termasuk Pemko Medan untuk mengalokasikan anggaran belanja wajib perlindungan social baik dalam rangka pengendalian inflasi maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam tahun 2024 telah dialokasikan anggaran belanja untuk program perlindungan sosial dan pengendalian inflasi dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Belanja daerah Pengendalian Dampak Inflasi TA. 2024

NO.	SKPD	URAIAN	BENTUK -	TARG		ANGGARAN	REALISASI
1	2	4	5	SATUAN 6	JUMLAH 7	<b>Rp</b> 8	<b>Rp</b> 9
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Beasiswa pendidikan bagi masyarakat kota medan yang berprestasi dan berkebutuhan khusus	Dana	Mahasiswa	158	1.000.000.000,00	462.716.800,00
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Bantuan Kesejahteraan kepada Guru MDTA, PAUD, TKQ/TPQ, Guru Honorer pada Sekolah Negeri, Guru Non PNS Non Settifikasi, Operator Sekolah Negeri dan Bea Siswa Pendidikan bagi Masyarakat Kota Medan yang berprestasi dan kebutuhan khusus	Bantuan uang tunai kepada siswa miskin tingkat sd	Dana	Siswa	20.000,00	13.500.000.000,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Bantuan Seragam Sekolah bagi Siswa Miskin, SD dan SMP	bantuan siswa miskin	Dana	Siswa	20.000,00	36.210.224.100,00
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial, Bantuan Sosial kepada lansia dan disabilitas	bantuan uang tunai siswa miskin di kota medan	Dana	Siswa	20.000,00	18.750.000.000,00
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Penyediaan Alat Bantu, Bagi Lansia dan Disabilitas, Alat bantu dengar, kaki palsu, kursi roda, tangan palsu, tongkat elektronik, tongkat kaki tiga/tripod, tongkat kaki empat, tongkat kruk kanan kiri, tongkat walker	bantuan kesejahteraan guru honorer kota medan	Dana	Guru	10.890,00	82.754.400.000,00
6	Dinas Kesehatan	Pembayaran premi bantuan iuran (jkn)	Dana	Orang	2.892.553	8.099.148.400,00	7.506.385.600,00
7	Dinas Sosial	Belanja bantuan paket natal dan ramadhan	Dana	Paket	2.600	2.127.421.165,00	2.003.352.235,00
8	Dinas Sosial	Bantuan sosial tunai bagi lansia	Dana	orang	500	500.000.000,00	485.000.000,00
9	Dinas Sosial	Bantuan sosial tunai bagi disabilitas	Dana	orang	1.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
10	Dinas Sosial	Belanja bantuan pendidikan Belanja bantuan sosial	Dana Dana	Orang Rutan	500 1 Thn	1.500.000.000,00 988.693.916,00	398.095.125,00 970.000.000,00
11	Dinas Sosial	kepada keluarga/ kelompok masyarakat rentan	Dana	Rutan	1 11111	900.093.910,00	97 0.000.000,00
12	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Pemasangan pipa distribusi air bersih tersebar di kota medan	Barang	Rumah	500	11.934.200.000,00	11.312.068.000,00
13	Dinas Perumahan Kawasan	Pemasangan pipa distribusi air limbah dan	Barang	Rumah	17900	11.835.200.000,00	11.145.932.000,00

NO	CKBD	LIDALAN	DENTIN	TARG	ET	ANGGARAN	REALISASI
NO.	SKPD	URAIAN	BENTUK	SATUAN	JUMLAH	Rp	Rp
14	Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	sambungan rumah (dak fisik) Perbaikan rumah tidak layak huni	Barang	Unit	70	13.183.834.000,00	13.003.334.000,00
	-		Jumlah			203.383.121.581,00	182.298.693.760,00

Data diolah

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Pengendalian Inflasi TA. 2024

NO.	SKPD	URAIAN	BENTUK	TARGET		ANGGARAN	REALISASI
NO.		UNAIAN	BENTOK	SATUAN	JUMLAH	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Barang	kegiatan	4	1.162.400.000	826.621.500
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan	Pengembangan usaha mikro	Dana	Kegiatan/Pelatihan	2	68.750.000,00	68.750.000,00
3	Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi	Dana	Kegiatan/Pelatihan	3	251.964.000,00	250.214.000,00
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan	SDM Koperasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	Dana	Peserta	65	1.000.000.000,00	9.861.584.320,00
5	Perdagangan Dinas Ketenagakerjaan	Industri Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Dana	orang	108	515.560.700,00	507.532.950,00
6	21 Kecamatan	Kompetensi Pembangunan Sarana dan Prasarana	Dana	orang	528	14.802.374.359,00	12.518.662.914,00
7	21 Kecamatan	Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana	orang	12.081	13.372.959.649,00	11.054.217.402,00
		Neiuranan	liii	mlah		23.083.756.900,00	19.181.108.935,00

Sumber: Data diolah

Sesuai dengan data tabel tersebut di atas, tercatat alokasi anggaran untuk berbagai program perlindungan sosial, termasuk pengurangan dampak sosial inflasi tercatat sebesar Rp. 203.383.121.581,00 dengan realisasi sebesar Rp 182.298.693.760,00 atau 89,63 persen. Selanjutnya

untuk program khusus pengendalian inflasi tercatat dianggarkan sebesar Rp 31.174.008.708, dengan realisasi Rp26.212.157.101 atau 84,08 persen. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan berbagai program perlindungan sosial dimaksud dapat diselenggarakan secara efektif dan optimal guna menjaga stabilitas perekonomian kota dan menjaga daya beli masyarakat luas.

Adapun bentuk-bentuk program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan perlindungan social dan pengendalian inflasi adalah seperti pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat kota yang berprestasi dan berkebutuhan khusus, bantuan uang tunai kepada siswa miskin tingkat SD, bantuan kesejahteraan guru honorer, pembayaran premi bantuan iuran (JKN), belanja bantuan paket natal dan ramadhan, bantuan sosial tunai bagi lansia, bantuan sosial tunai bagi disabilitas, belanja bantuan pendidikan, belanja bantuan sosial kepada keluarga/kelompok masyarakat rentan, pemasangan pipa distribusi air bersih tersebar, pemasangan pipa distribusi air limbah dan sambungan rumah. Sedangkan untuk kegiatan pengendalian inflasi diselenggarakan berbagai kegiatan seperti pasar murah, pelatihan, pelatihan manajemen usaha bagi wirausaha pemula, pembangunan sarana dan prasarana, dan sosialisasi dan pelatihan yang relevan secara ekonomi serta izin usaha, operasi pasar, sarana/prasarana, nelayan, budi daya ikan, angkutan umum, dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Melalui program ini, Kota Medan mampu mengendalikan inflasi dan memberikan perlindungan social dampak inflasi selama tahun 2024 secara efektif dan optimal, sehingga dapat mempertahankan stabilitas perekonomian kota dan juga daya beli masyarakat khususnya terhadap kebutuhan pokok masyarakat sekaligus juga menciptakan lapangan kerja baru, dengan tingkat inflasi 2,12 persen tahun 2024 sehingga lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

#### d. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi pegawai sekaligus belanja yang bersifat mengikat dan mendapatkan prioritas alokasi terlebih dahulu dibandingkan untuk urusan belanja lainnya. Berdasarkan data yang ada maka jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 tercatat sebanyak 13.246 orang terdiri dari PNS 9.637 dan PPPK 3.609 orang. Besarnya jumlah ASN tersebut menjadikannya salah satu unsur belanja daerah yang cukup signifikan alokasinya dalam belanja operasional T.A 2024 dalam struktur belanja pegawai.

Besarnya jumlah ASN dan komponen belanja pegawai lainnya dalam APBD akan menyebabkan kebutuhkan alokasi belanja yang relative cukup besar, yang wajib dianggarkan dalam APBD sehingga di sisi lain cenderung dapat menurunkan alokasi belanja daerah yang bersifat investasi. Untuk itu, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2024 juga telah ditetapkan mandatory spending untuk alokasi belanja pegawai sebesar maksimal 30 persen dari total belanja daerah. Adapun anggaran dan realisasi belanja ASN Pemerintah Kota Medan TA 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	2.098.444.676.253	1.926.958.217.928	91,83
2	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	185.322.722.000	174.309.743.260	94,06
3	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	5.097.920.000	5.047.850.000	99,02

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
4	Total Belanja Pegawai Di Luar TPG Dan Tamsil	1.908.024.034.253	1.747.600.624.668	91,59
5	Belanja Daerah	7.235.090.422.451		
6	Persentase Belanja Pegawai (%)	26,37		

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui anggaran belanja pegawai TA 2024 tercatat sebesar Rp1.908.024.034.253,00 atau 26,37 persen di luar tunjangan penghasilan guru dan tambahan penghasilan guru dari total belanja daerah. Sedangkan realisasinya tercatati Rp1.747.600.624.668,00 atau mencapai 91,59 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam tahun 2024. Adapun realisasi belanja pegawai dimaksud dipergunakan untuk antara lain belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, belanja gaji dan tunjangan DPRD dan lain-lain. Realisasi belanja pegawai yang hanya mencapai 91,59 persen tersebut selama tahun 2024 tentunya dapat mendorong realisasi belanja daerah lebih besar yang bersifat investasi sehingga memberikan multiplier effect sekaligus menjadi stimulan perekonomian kota. Sebagai bagian pokok belanja daerah maka belanja pegawai juga merupakan belanja yang dapat dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum dan mendukung pembangunan kota serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### e. Urusan Pengawasan

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan selalu menempatkan fungsi pengawasan sebagai salah satu pilar pokok guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2024 maka salah satu mandatory spending lainnya ditetapkan sebagai ketentuan dan norma umum penyusunan APBD T.A 2024 adalah alokasi belanja untuk urusan pengawasan. Alokasi belanja untuk urusan pengawasan ini tentunya cukup penting dalam rangka efektivitas pengawasan dan pengendalian pembangunan kota, sehingga seluruh pelaksanaan belanja daerah dapat efesien, efektif dan optimal. Adapun alokasi belanja daerah T.A 2024 untuk urusan pengawasan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Urusan Pengawasan T.A 2024

No.	Kom	ponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a.	Belanja Inspektorat	24.954.170.856,00	21.094.553.387	84,53
	b.	Gaji dan Tunjangan	18.197.379.657,00	16.384.694.758	90,04
2	a.	Alokasi Anggaran Pengawasan (1a-1b)	6.756.791.199,00	4.709.858.629	69,71
	b.	Total Belanja Daerah	7.194.825.174.451,00	-	0,00
	c.	Persentase alokasi anggaran pengawasan (2a : 2b) x 100%	0,09%	-	0,00

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui anggaran belanja untuk urusan pengawasan dalam T.A 2024 dialokasikan sebesar Rp. 6.756.791.199,00,- dengan realisasi sebesar Rp 4.709.858.629,00 atau 69,71 persen. Melalui alokasi belanja daerah urusan pengawasan tersebut yang tercatat 0,09 persen

dari total belanja daerah maka penyelenggaraan pengawasan internal, pendampingan dan asistensi pengawasan termasuk reviu pelaksanaan program dan kagiatan yang diperlukan dalam pembangunan kota selama tahun berjalan relative dapat terselenggara secara efektif guna menghindari adanya potensi kebocoran, pemborosan, dan kerugian keuangan daerah, sekaligus mewujudkan pelaksanaan APBD TA.2024 yang transparan, akuntabel dan sehat.

#### f. Urusan Infrastruktur

Sebagaimana diketahui salah satu dari 5 (lima) prioritas pokok pembangunan kota yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah pembangunan infrastruktur kota. Hal tersebut ditetapkan sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan kepentingan yang paling besar masyarakat sekaligus sesuai dengan fungsinya sebagai stimulus perekonomian kota. Alokasi belanja daerah yang cukup penting dan strategis ini dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yang termasuk dalam urusan infrastruktur daerah baik itu dalam kelompok belanja modal seperti tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi, asset tetap lainnya, jasa ketersediaan layanan serta belanja hibah dan bantuan sosial.

Diketahui alokasi belanja untuk urusan infrastruktur daerah dilihat dari sisi perekonomian kota tentunya akan memunculkan kemudahan, fasilitas dan intensif kegiatan perekonomian serta berinvestasi sekaligus mendorong efesiensi, dan efektifitas perekonomian daerah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin progresif, kesempatan kerja baru, sekaligus menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur daerah TA. 2024 diyakini akan mendorong terwujudnya perekonomian kota yang semakin dimanis dan progresif sekaligus menjadi daya tarik penanaman modal ke Kota Medan. Adapun alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah untuk urusan infrastruktur daerah TA. 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Urusan Infrastruktur TA. 2024

No		Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a.	Belanja Modal	2.099.128.929.675,00	1.571.143.142.440,00	74,85
		Tanah	99.826.874.013,00	39.241.989.901,00	39,31
		Peralatan dan Mesin	175.355.768.482,00	160.535.564.193,00	91,55
		Bangunan dan Gedung	1.215.100.679.477,00	856.812.504.048,00	70,51
		Jalan, Jaringan, dan irigasi	506.957.248.139,00	423.161.734.129,00	83,47
		Aset tetap lainnya	9.515.277.846,00	8.300.145.086,00	87,23
		aset lainnya	364.751.350,00	363.351.350,00	99,62
		Belanja Pemeliharaan	92.008.330.368,00	82.727.853.733,00	89,91
2	a.	Belanja Hibah	338.351.503.979,00	313.250.004.750,00	92,58
	b.	Belanja Bantuan Sosial	111.459.378.316,00	103.141.248.725,00	92,54
3	Jun (1+2	nlah Belanja Infrastruktur Daerah 2)	2.548.939.811.970,00	1.987.534.395.915,00	77,97
4		al Belanja Daerah	7.235.090.422.451,00		
5	Per 100	sentase belanja infrastruktur (3+4 x %)	35,23%		

Sumber Data: Diolah

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui alokasi anggaran untuk urusan infrastruktur daerah TA. 2024 tercatat sebesar Rp2.548.939.811.970,00 dengan realisasi sebesar Rp1.987.534.395.915,00 atau sebesar 77,97 persen. Dengan demikian dibandingkan dengan total belanja daerah, maka alokasi

belanja untuk urusan infrastruktur daerah TA. 2024 tercatat mencapai 35,23 persen dengan alokasi terbesar pada belanja bangunan dan gedung, diikuti belanja jalan, jaringan dan irigasi, hibah dan peralatan dan mesin.

Alokasi belanja daerah untuk urusan infrastruktur daerah TA. 2024 ini telah memberikan hasil dan manfaat yang luas baik untuk meningkatkan persentase jaringan jalan mantap dan tidak berlubang yang tercatat telah mencapai 100 persen dan kawasan bebas banjir yang semakin merata. Demikian juga ketersediaan prasarana-sarana perkotaan lainnya seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, kawasan perumahan dan pemukiman, cipta karya dan tata ruang, sehingga secara umum mendukung terwujudnya pelayanan public yang semakin berkualitas. Adapun beberapa pembangunan infrastruktur yg cukup menonjol dalam tahun 2024 antara lain revitalisasi stadion kebun bunga, lapangan merdeka, gedung warenhuis, medan Islamic centre, overpass jalan stasiun, underpass jalan Ahmad Yamin, kolam retensi martubung, dan USU, pedestrian, pertamanan, dan lain-lain.

#### 4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagaimana diketahui manfaat dan dampak kesejahteraan kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan kota tentunya harus dapat diukur secara konkrit bahkan dapat dikuantifisir dengan baik. Oleh karena itu dalam rencana strategis pembangunan kota atau RPJMD selalu disajikan proyeksi ukuran makro pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan target kinerja sebagai gambaran dampak atau kemajuan sekaligus derajad kesejahteraan masyarakat yang ingin diwujudkan. Selanjutnya, secara umum indikator capaian keberhasilan pembangunan kota sebagai implementasi penyelenggaraan tugas—tugas dan fungsi otonomi daerah (desentralisasi) sekaligus gambaran pencapaian visi dan misi (RPJMD 2021 – 2026) yang ditetapkan, dalam laporan keuangan ini didiskripsikan dalam bentuk indikator kinerja makro sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kebikan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) TA.2024. Adapun capaian kinerja ekonomi makro pembangunan kota tahun 2024 berdasarkan implementasi pelaksanaan APBD TA.2024 disajikan sebagai berikut:

#### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu dan juga struktur ekonomi sera kinerja sector perekonomian daerah. Untuk itu guna menggambarkan sekaligus mengetahui capaian kinerja ekonomi makro Kota Medan selama tahun 2024 salah satunya adalah melalui penyajian terhadap perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan nilai tambah bruto atau nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Secara umum besaran nilai PDRB selalu digunakan sebagai indikator untuk menilai dan menjelaskan kinerja perekonomian suatu daerah, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga besaran nilai PDRB dapat dijadikan ukuran kondisi sekaligus penjelasan dan informasi keberhasilan pembangunan di suatu daerah, termasuk di Kota Medan. PDRB Kota Medan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan 2020-2024 dalam bentuk tabel dan grafik dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 8, PDRB Kota Medan ADHB dan ADHK Periode Tahun 2020-2024

	Tahun ( Milyar Rp )				
Sektor/Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Harga Berlaku	242.198,24	252.540,10	280.159,04	303.311,88	329.609,17
PDRB Harga Konstan	153.669,82	157.619,13	165.120,01	173.445,69	182.242,59

Sumber: BPS Kota Medan

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui PDRB Kota Medan baik ADHB dan ADHK selama periode 2020–2024 cenderung selalu meningkat secara signifikan sehingga secara umum menggambarkan pertambahan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan produktivitas berbagai unit produksi yang semakin tinggi.

Grafik: Produk Domestik Regional Bruto 2020-2024 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA MEDAN ADHB DAN ADHK TAHUN 2020-2024 Triliun Rupiah (TRILIUN RUPIAH) 182.24 153.66 157.61 2020 2021 2022 2023 2024 Tahun (Triliun Rp) PDRB Harga Konstan

Walaupun dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Kota Medan relatif masih banyak tertekan akibat situasi, kondisi dan kecenderungan ekonomi global, nasional dan regional, namun dengan mengikuti dan menjalankan arahan serta kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah secara kreatif dan berdimensi local, maka selama periode tahun 2020 - 2024 PDRB Kota Medan baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan cenderung terus mengalami peningkatan secara positif yaitu dari 242,19 Triliun rupiah tahun 2020 menjadi 329,60 Triliun rupiah pada tahun 2024 (atas dasar harga berlaku) atau meningkat sebesar Rp 87,41 trilyun dalam 5 (lima) tahun terakhir atau juga meningkat rata-rata sebesar 7 persen per tahun. Sedangkan atas dasar harga konstan tercatat juga meningkat dari 153,66 Triliun rupiah tahun 2020 menjadi 182,24 Triliun rupiah pada tahun 2024 atau dengan kata lain meningkat sebesar 28,57 trilyun selama 5 (lima) tahun terakhir atau juga meningkat rata-rata sebesar 4 persen per tahun

Peningkatan PDRB Kota Medan selama 4 (empat) tahun terakhir tentunya juga tidak terlepas dari kontribusi realisasi belanja daerah yg juga terus meningkat secara signifikan selama periode tersebut artinya, APBD Kota Medan juga harus dimaknai sebagai salah satu variable pembentuk PDRB secara positif dan signifikan yang selalu menjadi salah satu stimulus dalam perekonomian kota, baik di sektor produksi barang dan jasa melalui belanja investasi maupun juga konsumsi masyarakat. Adanya peningkatan dan pertumbuhan PDRB tersebut sekaligus juga meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan termasuk daya beli masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

#### b. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

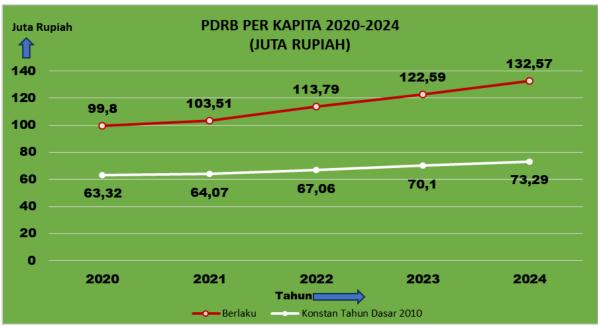
Selanjutnya, untuk menggambarkan manfaat dan dampak pembangunan kota secara makro indicator lainnya adalah Produk Domestik Regional Bruto Perkapita. Secara umum Produk Domestik Regional Bruto per Kapita menjelaskan sekaligus merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama satu tahun. Indikator ini secara umum juga digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengamati tingkat kesejahteraan masyarakat, walaupun disisi lain parameter ini diketahui belum dapat digunakan sepenuhnya sebagai ukuran tingkat kesejahteraan secara menyeluruh terutama dari sisi pemerataannya. Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan per kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan selama Tahun 2020 - 2024 dalam bentuk tabel dan grafik disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kota Medan Periode 2020-2024

Tahun	PDRB Pe	r Kapita ( Juta Rupiah )	Perubahan ( % )		
ranun	Berlaku	Konstan Tahun Dasar 2010	Berlaku	Konstan	
2020	99,80	63,32	(5,51)	(7,66)	
2021	103,51	64,07	3,72	1,20	
2022	113.79	67.06	9,42	4,17	
2023*	122.59	70.10	7,73	4,52	
2024**	132.57	73.29	8,14	4,56	

<sup>\*)</sup>Angka Sementara

<sup>\*\*)</sup>Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Kota Medan



Sumber: BPS Kota Medan

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, diketahui bahwa walaupun sebahagian masyarakat masih ada yang mengalami dampak ekonomi akibat ketidakpastian ekonomi global, nasional/regional namun melalui kebijakan, program terarah dan kreatif, serta insentif sosial (perlindungan sosial) yang dijalankan Pemerintah Kota, Propinsi dan Pusat, maka selama periode tahun 2020 - 2024 PDRB

perkapita masyarakat Kota Medan relative tumbuh menjadi lebih baik yaitu dari Rp 99,80 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 132.57 juta pada tahun 2024 (Atas Dasar Harga Berlaku) atau dengan kata lain meningkat Rp 32,77 juta dalam 5 (lima) tahun terakhir atau meningkat rata-rata sebesar 7 persen per tahun. Sedangkan berdasarkan harga konstan tercatat meningkat dari Rp 63,32 juta tahun 2020 menjadi Rp 73.29 juta pada tahun 2024 atau dengan kata lain meningkat sebesar RP 9,97 juta dalam 5 (lima) tahun terakhir atau meningkat rata-rata 3 persen per tahun.

Dengan semakin membaiknya PDRB perkapita masyarakat secara umum, yang meningkat sebesar Rp 32,77 juta dalam 5 (lima) tahun terakhir, tentunya cenderung akan meningkatkan daya beli dan tabungan masyarakat secara keseluruhan, sehingga secara bersamaan mampu juga meningkatkan produktifitas perekonomian kota, walaupun masyarakat kota masih harus menghadapi tantangan ekonomi global/nasional/regional yang kurang menggembirakan sampai saat ini.

#### c. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum diketahui pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah gambaran keseluruhan yang menjelaskan aktifitas perekonomian masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang dan umumnya dalam analisis ekonomi dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dari keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi termasuk di Kota Medan. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data PDRB. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi daerah umumnya juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jumlah barang modal, aspek geografis, sumber daya alam dan teknologi yang digunakan. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi dimana salah satu factor pengungkitnya adalah anggaran juga selanjutnya digunakan untuk mengamati keadaan dan tingkat kemajuan serta kesejahteraan masyarakat dari periode ke periode.

Diketahui setelah mengalami pertumbuhan negative dalam tahun 2020 maka selama periode tahun 2021 – 2024 perekonomian Kota Medan terus mengalami pertumbuhan positif yakni dari sebesar 2,62 persen pada tahun 2021, menjadi 4,71 persen tahun 2022 dan tercatat sebesar 5,04 persen tahun 2023 bahkan tercatat lebih tinggi lagi mencapai 5,07 persen tahun 2024. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kota Medan dalam 5 (lima) tahun terakhir meningkat rata-rata 3,09 persen per tahun. Hal ini menunjukkan walaupun selama beberapa tahun terakhir Kota Medan masih terus bergelut dengan ketidakpastian perekonomian global, nasional dan regional, namun berkat kebijakan ekonomi daerah yang kreatif, terintegrasi secara regional dan nasional sekaligus dengan pemberian stimulus ekonomi kepada pelaku usaha menengah ke bawah, maka Kota Medan relative mampu mendorong peningkatan produktivitas produksi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat secara lebih optimal

Pertumbuhan ekonomi kota yang cukup positif ini tentunya juga tidak terlepas dari kontribusi belanja daerah yang bersumber dari APBD, sehingga mampu berfungsi sebagai stimulus perekonomian kota. Demikian juga perbaikan kualitas perizinan usaha dan fasilitas serta kemudahan berinvestasi yang diterapkan, mampu mendorong sector swasta tetap dapat berkembang dan meningkatkan investasinya diberbagai sector usaha ekonomi. Hal ini juga tentunya secara masif meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, sehingga mampu tetap mengendalikan bahkan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Secara lebih rinci pertumbuhan ekonomi kota dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk tabel dan grafik disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024

Indikator Makro	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,98	2,62	4,71	5,04	5,07

Sumber: BPS Kota Medan

GRAFIK: Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Medan

Secara empiris dapat disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah selama tahun 2020 - 2024 juga dominan didorong oleh sektor konsumsi masyarakat yang masih cukup baik, serta pengeluaran Pemerintah (APBN/APBD), dan besarnya investasi sektor swasta di Kota Medan. Selanjutnya dari sisi produksi, tiga kategori lapangan usaha yang memberikan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi. Dari sisi pengeluaran, tiga komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga diikuti komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan pembentukan modal tetap bruto.

#### d. Kondisi Inflasi

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat maka stabilitas perekonomian daerah yang sangat penting dikendalikan secara ketat adalah variable inflasi. Oleh karena itu, salah satu fungsi APBD juga adalah fungsi pokok stabilisasi, menjaga stabilitas harga, khususnya harga kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, sebagai bagian dari fungsi ekonomi yang diselenggarakan, maka Pemerintah Kota juga mengefektifkan salah satu wadah efektif yang dinamakan dengan Tim Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Melalui wadah koordinasi dan tindaklanjut yang bersifat lintas sektoral ini, dimana di dalamnya juga termasuk Bank Indonesia (Cabang Medan) maka selama periode tahun 2020 - 2024 tingkat inflasi daerah relative tercatat dapat lebih terkendali yaitu 1, 76 persen tahun 2020 dan tetap terkendali setiap tahunnya dimana dalam tahun 2024 tercatat sebesar 2,12 persen. Angka inflasi tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat

pada tahun 2022 yaitu 6,10 persen, walaupun situasi dan kondisi tersebut tidak sampai mengganggu secara signifikan daya beli masyarakat. Dengan demikian tingkat inflasi Kota Medan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 2,77 persen per tahun.

Melalui tingkat inflasi yang relative cukup terkendali tersebut maka secara makro, daya beli masyarakat cenderung dapat terus terjaga dan terpelihara, sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak kalah pentingnya upaya pengendalian inflasi ini juga diintervensi melalui berbagai program efektif lainnya seperti operasi pasar, khususnya terhadap 9 (sembilan) kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan bersama – sama institusi terkait lainnya termasuk Bulog, khususnya pada hari-hari besar keagamaan, dan kondisi-kondisi pasar tertentu yang dianggap memerlukan intervensi pasar. Pengendalian inflasi juga didukung program kerjasama antar daerah yang dilakukan dengan Kabupaten/Kota lainnya, sebagai daerah penghasil kebutuhan pokok masyarakat. Perkembangan inflasi di Kota Medan dalam 5 (Lima) tahun terakhir (2020 – 2024) dalam bentuk tabel dan grafik disajikan sebagai berikut:

Tabel 11. Inflasi Periode Tahun 2020-2024

Tahun

Indikator Makro			Tahun	Tahun	
	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi (%)	1,76	1,70	6,10	2,19	2,12

Sumber: BPS Kota Medan



GRAFIK: Angka Inflasi 2020-2024

Secara keseluruhan kedudukan, fungsi dan peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah cukup penting dan strategis. Melalui TPID, kondisi pasar berbagai kebutuhan pokok masyarakat secara periodik dipantau dan dimonitor serta dievaluasi setiap saat, bahkan melalui rapat koordinasi Pusat-Daerah, guna menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran atas berbagai kebutuhan bahan pokok masyarakat di pasar, dan jika perlu dilakukan operasi pasar.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pengendalian inflasi daerah secara konsisten, dalam empat tahun terakhir juga dialokasikan anggaran program perlindungan sosial secara khusus dalam bentuk program pengendalian inflasi maupun dampak inflasi, dengan kelompok sasaran seperti Usaha Menengah Kecil dan Mikro, Nelayan, biaya transfortasi angkutan barang, pendidikan, kesehatan, termasuk program penciptaan lapangan kerja yang berjalan efektif, guna membantu pengendalian inflasi Kota Medan secara efektif dan berkelanjutan.

### e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Bila beberapa indicator makro pembangunan kota sebagaimana disajikan di atas sebelumnya lebih menggambarkan dimensi ekonomi maka Indeks Pembangunan Manusia merupakan indicator makro yg cenderung menggabungkan dimensi ekonomi dan social. Secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian kualitas pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai subyek yang menerima manfaat dan dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan - pilihan penduduk khususnya dalam kegiatan sosial ekonomi. Tiga pilihan yang dianggap paling penting yaitu, panjang umur dan sehat, berpendidikan, serta akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup layak.

Dengan demikian, salah satu ukuran umum tingkat kualitas kesejahteraan masyarakat yang paling banyak digunakan sebagai ukuran makro, yang mengintegrasikan beberapa aspek pokok pembangunan seperti tingkat pendapatan, derajat pendidikan, dan kesehatan adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Medan selama 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024) secara berurutan dapat disajikan sebagai berikut :

Pada tahun 2024 indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan meningkat dari 80,31 pada tahun 2020 menjadi 83,23 tahun 2024. Dengan demikian dalam 5 (lima) tahun terakhir IPM Kota Medan meningkat 2,92 point, atau meningkat rata-rata sebesar 0,58 pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Medan selama beberapa tahun terakhir melalui berbagai kebijakan pokok pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif dan kreatif seperti di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat dinilai cukup berhasil meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, sehingga Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan cenderung meningkat dengan cukup baik. Secara berkelanjutan angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan dalam 5 (Lima) tahun terakhir (2020 - 2024) dalam bentuk tabel dan grafik dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020-2024

Indikator Makro	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	80,98	81,21	81,76	82,61	83,23

Sumber: BPS Kota Medan

Grafik: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2024



Berdasarkan data tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan di atas, dapat dimaknai bahwa kualitas masyarakat kota selama beberapa tahun terakhir secara umum cenderung terus meningkat melalui kolaborasi pembangunan kota yang diselenggarakan. Di samping itu, angka IPM Kota Medan tahun 2024 juga menunjukkan kecenderungan secara bersamaan dan varalel meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat secara simultan, yang berdampak kepada peningkatan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## f. Gini Rasio

Salah satu isu pembangunan yang paling banyak didiskusikan adalah aspek ketimpangan social ekonomi dalam masyarakat. Sesuai dengan visi pembangunan kota yang ditetapkan, maka pembangunan kota diarahkan untuk mewujudkan kemajuan, keberlanjutan dan meningkatkan pemerataan serta kesejahteraan masyarakat. Namun bila peningkatan dan pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan pemerataan, maka cenderung akan menimbulkan fenomena ketimpangan pendapatan.

Gini ratio atau koefisien gini merupakan koefisien yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang ditampilkan dengan kurva Lorens. Sebagaimana diketahui Rasio Gini secara umum banyak digunakan untuk mengamati tingkat ketidakmerataan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat. Konsep Rasio Gini dalam kelompok 0 - 0,40 umumnya diartikan berada dalam ketidakmerataan pendapatan dengan kategori rendah, sedangkan 0,40 - 0,50 masuk dalam kelompok ketidakmerataan kategori sedang dan 0,50 – 1,0 sering diartikan ketidakmerataan pendapatan kategori tinggi. Selanjutnya gambaran umum Rasio Gini selama 5 (Lima) tahun terakhir secara tabel dan grafik dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Rasio Gini 2020-2024

Indikator Makro			Tahun		
	2020	2021	2022	2023	2024
GINI Ratio	0,32	0,40	0,39	0,37	0,35

Sumber: BPS Kota Medan

Grafik: Gini Ratio 2020-2024



Sesuai dengan data tabel di atas diketahui selama periode tahun 2020 - 2024 ketidakmerataan antar kelompok pendapatan di Kota Medan cenderung dapat terus dikurangi dan menunjukkan tren menurun kecuali pada tahun 2021 yang cenderung meningkat walaupun tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2020. Angka rasio gini Kota Medan dalam tahun 2024 tercatat sebesar 0,35 sehingga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun belum optimal, disebabkan program-program intervensinya juga harus dilakukan secara berkelanjutan terutama pada kelompok pendapatan 40 persen terendah melalui stimulus ekonomi yang semakin kreatif dan efektif, namun dapat dimaknai bahwa tingkat ketidakmerataan pendapatan masyarakat kota Medan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung berada dalam kategori rendah dan tidak pernah dalam kategori sedang ataupun tinggi. Oleh karena itulah, salah satu misi strategis pembangunan kota selama beberapa tahun terakhir yang dikelola adalah program prioritas pembinaan UMKM, sehingga diharapkan pelaku-pelaku usaha termasuk di sektor non formal dapat naik kelas menjadi pelaku usaha di sektor formal. Pembinaan UMKM ini juga sangat penting dilakukan secara berkelanjutan melalui belanja APBD, sebab pelaku ekonomi kota yang dapat menahan ketidakstabilan ekonomi global-regional selama ini, cenderung dominan adalah sektor Informal dan UMKM.

Selanjutnya berdasarkan indikator makro Rasio Gini beberapa tahun terakhir sebagaimana disajikan melalui grafik garis di atas dapat dipahami perlunya terus mengoptimalkan fungsi-fungsi distributive atau pemerataan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, artinya bukan hanya memperioritaskan fungsi – fungsi alokatif, guna dapat menurunkan Rasio Gini lebih rendah lagi pada masa yang akan datang, maka perlu meningkatkan program-program penciptaan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan ekstrim, secara lebih luas dan masif.

#### g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sebagaimana diketahui tingginya kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang memilih bekerja akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian jumlah angkatan kerja di Kota Medan yang relatif cukup besar akan menjadi salah satu factor yang menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya berupa proses produksi. Selanjutnya, untuk mewujudkan program pembangunan kota yang berhasil guna dan berdaya guna perlu didukung oleh sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena sumber daya manusia merupakan penggerak factor—faktor produksi lainnya dimana sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah penduduk kota yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Berkat stimulus ekonomi yang digerakkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan terutama terhadap pembinaan UMKM, (walaupun dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, regional) secara kolaboratif serta program-program pembinaan ketenagakerjaan, maka tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan selama periode tahun 2020 - 2024 relatif dapat diturunkan yaitu dari 10,74 persen tahun 2020 menjadi 8,13 persen tahun 2024 atau menurun sebesar 2,61 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir atau rata-rata menurun 0,52 persen per tahun. Untuk terus dapat menekan angka pengangguran, sangat menonjol kedudukan, fungsi dan peranan pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja daerah yang diselenggarakan. Melalui belanja daerah yang direalisasikan maka Pemerintah Kota dapat juga tetap membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat di tengah—tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, sehingga melalui mekanisme belanja daerah, Pemerintah Kota Medan dapat mempertahankan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan cukup baik.

Secara lebih rinci kecenderungan angka pengangguran terbuka dalam 5 (Lima) tahun terakhir dalam bentuk tabel dan grafik dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Periode Tahun 2020-2024

Indikator Makro	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengangguran Terbuka (TPT) %	10,74	10,81	8,89	8,67	8,13

Sumber: BPS Kota Medan

Grafik: Pengangguran Terbuka 2020-2024



Pengurangan angka pengangguran terbuka yang relative cukup signifikan tersebut juga didorong dengan terbangunnya iklim investasi atau penanaman modal yang semakin kondusif melalui perbaikan-perbaikan kualitas perizinan usaha, terutama dengan penerapan PTSP (Mall Pelayanan Publik) dan kemudahan, fasilitas serta insentif penanaman modal lainnya dalam bentuk peraturan daerah, guna mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi angkatan kerja melalui aplikasi lapangan kerja, termasuk membangun jiwa kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan kerja yang optimal bagi angkatan kerja. Adanya kepercayaan sector swasta terhadap kepastian hukum juga mempengaruhi masuknya investasi yang lebih besar ke Kota Medan baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negari

#### h. Angka Kemiskinan

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan kota, maka salah satu tantangan pokok pembangunan kota dalam RPJMD 2021 – 2026 adalah masalah kemiskinan ekstrim. Oleh karena kemiskinan pada prinsipnya menggambarkan kondisi ketidakmampuan masyarakat secara sosial ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar kesehatan masyarakat dan juga standar pendidikan.

Dalam pengertian yang lebih luas, standar hidup kelompok masyarakat sesungguhnya tidak sekedar tercukupi kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Di samping itu, tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak juga merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan

kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari ratarata pendapatan, sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan keluarga.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu indikator pokok kinerja pembangunan kota lainnya yang digunakan dalam rangka mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah angka kemiskinan. Keberhasilan pembangunan pada dasarnya banyak diukur melalui parameter berkurangannya angka kemiskinan.

Selama periode tahun 2020 - 2024 Pemerintah Kota secara luas menyelenggarakan berbagai program intervensi langsung maupun tidak langsung penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh OPD/SKPD maupun melalui mekanisme bantuan sosial dan belanja hibah. Program penanggulangan kemiskinan secara luas dikelola di sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, termasuk melalui pendekatan wilayah (kawasan kumuh), sehingga melalui program – program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan secara terintegrasi, Pemerintah Kota Medan dapat menurunkan angka kemiskinan dari 8,01 persen tahun 2020 menjadi 7,94 persen tahgun 2024. Kemampuan untuk tetap dapat mengendalikan angka kemiskinan ini artinya dalam beberapa tahun terakhir jumlah keluarga miskin relative dapat diturunkan walaupun belum cukup signifikan dan harus dapat diturunkan lagi secara lebih masif pada masa yang akan datang. Adapun perkembangan angka kemiskinan selama 5 (Lima) tahun terakhir (2020 -2024) dalam bentuk tabel dan grafik dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Angka Kemiskinan Periode Tahun 2020-2024

Indikator Makro	Indikator Makro			Tahun	
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kemiskinan (%)	8,01	8,34	8,07	8,00	7,94

Sumber: BPS Kota Medan

Grafik: Angka Kemiskinan 2020-2024



Dapat disampaikan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan secara sistematis dan terintegrasi dilakukan dari berbagai sumber pembiayaan termasuk APBN, APBD Prov, APBD Kota, sumber-sumber pembiayaan partisipatif dan lainnya, sehingga memberikan hasil dan manfaat yang lebih optimal untuk membantu keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan, termasuk melalui program-program perlindungan sosial yang khusus dialokasikan

untuk kelompok Nelayan, UMKM, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja dari program prasarana – sarana serta pemberdayaan kelurahan, termasuk program penanggulangan kemiskinan efektif lainnya.

Selain persentase penduduk miskin, dapat digambarkan juga indeks kedalaman kemiskinan sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang cenderung menurun dari 1,10 point tahun 2021, menjadi 1,09 point tahun 2024. Namun di sisi lain tercatat juga indeks keparahan kemiskinan di Kota Medan yang merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin yang cenderung meningkat dari 0,23 point tahun 2021 point menjadi 0,26 tahun 2024. Berdasarkan data angka kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan sebagaimana disajikan di atas perlu pendekatan kebijakan alokasi anggaran dalam APBD yg semakin berpihak kepada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari seluruh sector secara terpadu dan terintegrasi baik untuk mengatasi fenomena kemiskinan yg bersifat structural maupun yang bersifat kultural dengan menetapkannya sebagai salah satu masalah pokok dalam pembangunan kota pada masa yang akan datang.

## BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

## 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

Tabel 16. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Pendapatan - LRA	7.166.410.196.201,00	6.294.920.537.089,02	87,84
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	3.477.735.991.080,00	2.770.372.461.103,14	79,66
Pendapatan Pajak Daerah –LRA	2.963.036.949.123,00	2.483.892.895.537,00	83,83
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	287.995.694.769,00	139.920.386.103,00	48,58
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LRA	18.630.706.918,00	16.973.995.298.79	91,11
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	208.072.640.270,00	129.585.184.164,35	62,28
Pendapatan Transfer – LRA	3.582.204.963.000,00	3.429.257.072.514,00	95,73
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LRA	2.714.204.963.000,00	2.748.283.711.210,00	101,26
Dana Perimbangan	2.714204.963.000,00	2.748.283.711.210,00	101,26
Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	208.897.527.000,00	275.734.243.000,00	131,99
Dana Alokasi Umum – LRA	1.931.432.611.000,00	1.927.311.908.517,00	99,79
Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA	32.700.499.000,00	30.396.472.723,00	92,95
Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA	541.174.326.000,00	514.841.086.970,00	95,13
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	868.000.000.000,00	680.973.361.304,00	78,45
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	728.000.000.000,00	540.973.361.304,00	74,31
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi – LRA	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	106.469.242.121,00	95.291.003.471,88	89,50
Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	3.280.000.000,00	1.304.000.000,00	39,76
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LRA	103.189.242.121,00	93.987.003.471,88	91,08
Belanja	7.235.090.422.451,00	6.258.347.667.812,28	86,50
Belanja Operasi	5.202.756.617.110,00	4.764.607.106.892,98	91,58
Belanja Pegawai	2.098.444.676.253,00	1.926.958.217.929,00	91,83
Belanja Barang dan Jasa	2.647.001.058.562,00	2.421.257.635.488,98	91,47
Belanja Bunga	7.500.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	338.351.503.979,00	313.250.004.750,00	92,58
Belanja Bantuan Sosial	111.459.378.316,00	103.141.248.725,00	92,54
Belanja Modal	2.007.120.599.307,00	1.488.415.288.707,30	74,16
Belanja Modal Tanah	99.826.874.013,00	39.241.989.901,00	39.31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.355.768.482,00	160.535.564.193,00	91,55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.215.100.679.477,00	856.812.504.048,00	70,51
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	506.957.248.139,00	423.161.734.129,30	83,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.515.277.846,00	8.300.145.086,00	87,23
Belanja Modal Aset Lainnya	364.751.350,00	363.351.350,00	99,62
Belanja Tidak Terduga	25.213.206.034,00	5.325.272.212,00	21,12
Belanja Tak terduga	25.213.206.034,00	5.325.272.212,00	21,12
Surplus/(Defisit)	(68.680.226.250,00)	36.572.869.276,74	(53,25)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	268.680.226.250,00	68.680.706.826,30	25,56
Penggunaan SiLPA	68.680.226.250,00	68.680.226.250,00	100,00
Koreksi SiLPA Pinjaman Daerah dari	0,00	480.576,00 0,00	0,00
Lembaga Keuangan Bank Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000.000,00	0,00	0,00
i engelualan rembiayaan	200.000.000.000,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	68.680.226.250,00	68.680.706.826,30	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	105.253.576.103,04	0,00

## 2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, Pemerintah Kota Medan secara kolaboratif telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan prinsip prinsip efisiensi, effektifitas, transparan dan akuntabel.

Secara umum hambatan dan kendala pencapaian target pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

#### a. Pendapatan

Beberapa tantangan dan kendala sehingga anggaran pendapatan daerah sebesar Rp7.166.410.196.201,00 belum dapat dicapai secara lebih optimal dengan realisasi tercatat sebesar Rp6.294.921.900.176,02 atau 87,84%, sampai 31 Desember 2024, dapat disajikan sebagai berikut:

- 1) Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara dominan terdiri dari pajak dan retribusi daerah kurang realisasi disebabkan secara garis besar oleh:
  - (a) Adanya pengaruh perekonomian daerah (makro) yang menyebabkan objek-objek pajak dan retribusi daerah tertentu sepeti halnya Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, BPHTB, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan lain-lain pertumbuhan omsetnya terganggu, dan belum optimal sehingga secara langsung juga mempengaruhi jumlah pajak/retribusi daerah yang dapat dipungut.
  - (b) Kesadaran perpajakan/retribusi daerah (budaya sadar pajak/retribusi) dari wajib pajak/retribusi daerah yang belum seluruhnya baik, sehingga pajak/retribusi belum terpungut secara optimal seperti halnya PBB, retribusi persampahan, parkir tepi jalan umum, dan lainlain.
  - (c) Sistem perpajakan/retribusi daerah yang belum sepenuhnya berbasis elektonik, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak/retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya, sekaligus dapat meningkatkan pengawasan/pengendalian pengelolaannya.
  - (d) Sistem sanksi perpajakan/retribusi daerah yag secara operasional belum dapat diterapkan sepenuhnya.
  - (e) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan perpajakan/retribusi daerah yang belum sepenuhnya dapat mencakup seluruh wajib pajak/retribusi daerah.
  - (f) Potensi adanya integritas oknum fiskus yang masih harus ditingkatkan.
- 2) Sedangkan untuk kelompok pendapatan daerah yang bersifat dana transfer, baik transfer pusat maupun provinsi, dari target anggaran sebesar Rp3.582.204.963.000,00 maka per 31 Desember 2024 realisasinya tercatat sebesar Rp3.429.257.072.514,00 atau 95,73%.
  - Oleh karena itu, secara umum realisasi pendapatan daerah yang bersifat dana transfer pada dasarnya relatif cukup baik, sebab hampir seluruhnya dapat direalisasikan sesuai anggaran yang ditetapkan, sedangkan yang tidak terealisasi seperti:

Jenis Bagi Hasil Pajak PPH Pasal 21, dan lain-lain, tetap direalisasikan oleh pemerintah pusat seluruhnya, sebesar Rp. 66 Milyar namun dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF). Selanjutnya untuk pendapatan daerah yang bersifat DAK Fisik dan Non- Fisik secara prinsip penyalurannya diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kota Medan. Namun sisa anggaran yang tidak terealisasi hanyalah disebabkan oleh perbedaan antara pagu (Anggaran) dengan kontrak, atau dan DAU juga berdasarkan alokasi efektif yang diperhitungkan oleh Pemerintah Pusat yang harus disalurkan berdasarkan sisa-sisa dana DAK Fisik-Non Fisik yang ada pada RKUD Pemerintah Kota Medan sebelumnya.

#### b. Belanja Daerah

Secara umum, realisasi belanja daerah TA 2024 cukup baik, dalam arti program- program prioritas pembangunan kota seperti halnya di bidang infrastruktur, sosial ekonomi dapat diimplementasikan dengan baik.

Sedangkan adanya belanja daerah yang tidak direalisasikan lebih disebabkan karena adanya perbedaan pagu dengan kontrak kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya kegiatan yang dirasionalisasi berdasarkan perkiraan out-came dan manfaatnya yang harus direviu ulang, perlunya penyesuaian ulang harmonisasi program pembangunan kota-provinsi dan pusat sehingga harus diintregrasikan kembali, termasuk kepatuhan terhadap arus kas yang berjalan dalam tahun 2024 dan peningkatan kualitas perencanaan/penganggaran.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki pengertian sebagai berikut.

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan yang ada di Kota Medan adalah Pemerintah Kota Medan.
- b. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dengan menetapkan Perda Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, termasuk Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kota Medan adalah SKPD sebanyak 50 unit yang terdiri dari Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan yaitu:
  - 1) Sekretariat sebanyak dua unit, yaitu:
    - a) Sekretariat Daerah terdiri dari beberapa Bagian yaitu:
      - Bagian Tata Pemerintahan;
      - Bagian Kesejahteraan Rakyat;
      - Bagian Hukum;
      - Bagian Kerjasama;
      - Bagian Perekonomian;
      - Bagian Administrasi Pembangunan
      - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
      - Bagian Sumber Daya Alam;
      - Bagian Umum;
      - Bagian Organisasi;
      - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
      - Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - b) Sekretariat DPRD.
  - 2) Inspektorat Daerah sebanyak satu unit, yaitu Inspektorat Daerah;
  - 3) Dinas sebanyak 19 unit, yaitu:
    - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b) Dinas Kesehatan (termasuk didalamnya BLUD RSUD Dr. Pirngadi);
    - c) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi;
    - d) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;

# PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

- e) Satuan Polisi Pamong Praja;
- f) Dinas Sosial;
- g) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- h) Dinas Ketenagakerjaan;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- k) Dinas Lingkungan Hidup;
- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m) Dinas Perhubungan;
- n) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
- q) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- r) Dinas Pariwisata;
- s) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 4) Badan sebanyak tujuh, yaitu:
  - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d) Badan Pendapatan Daerah;
  - e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g) Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- 5) Kecamatan sebanyak 21, yaitu:
  - a) Kecamatan Medan Belawan;
  - b) Kecamatan Medan Labuhan;
  - c) Kecamatan Medan Kota;
  - d) Kecamatan Medan Timur;
  - e) Kecamatan Medan Helvetia;
  - f) Kecamatan Medan Marelan;
  - g) Kecamatan Medan Denai;
  - h) Kecamatan Medan Area;
  - i) Kecamatan Medan Baru;
  - j) Kecamatan Medan Polonia;
  - k) Kecamatan Medan Tembung;
  - 1) Kecamatan Medan Perjuangan;
  - m) Kecamatan Medan Barat;
  - n) Kecamatan Medan Tuntungan;
  - o) Kecamatan Medan Selayang;
  - p) Kecamatan Medan Petisah;
  - q) Kecamatan Medan Johor;
  - r) Kecamatan Medan Maimun;
  - s) Kecamatan Medan Deli;
  - t) Kecamatan Medan Amplas;
  - u) Kecamatan Medan Sunggal.

Sebagai entitas pelaporan maka laporan keuangan Pemerintah Kota Medan disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah, terdiri atas.

#### a. Laporan realisasi anggaran

LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Unsur yang dicakup dalam LRA terdiri atas pendapatan - LRA, belanja, dan pembiayaan.

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

LPSAL menyajikan informasi mengenai perubahan gunggungan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya

c. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu saat (tanggal) tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atasaset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca Pemerintah Kota Medan disusun berdasarkan Neraca SKPD.

d. Laporan operasional

LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

e. Laporan arus kas

LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitorisyang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

f. Laporan perubahan ekuitas

LPE menyajikan informasi mengenai nilai ekuitas awal, surplus/defisit LO dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas serta nilai ekuitas akhir dari pemerintah daerah.

- g. Catatan atas laporan keuangan.
- 2. CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, Neraca, LPE, LPSAL, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Secara umum asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggaran yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas.

#### a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa Pemerintah Kota Medan sebagai entitas pelaporan dan SKPD di lingkup Pemerintahan Kota Medan, sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antara unit pemerintahan dalam laporan keuangan. Salah satu

indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan masing-masing entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Setiap entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

### b. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kota Medan akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melikuidasi. Dalam pengertian kesinambungan entitas adalah bahwa Pemerintah Kota Medan dibentuk untuk menjalankan tugas kepemerintahan dalam jangka waktu panjang dan tidak dimaksudkan untuk dibubarkan.

### c. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan Pemerintah Kota Medan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan - LRA dan belanja - LRA serta basis akrual untuk pengakuan pendapatan - LO dan beban - LO, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

#### a. Basis Kas

Untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), diterima oleh bendahara penerimaan, diterima oleh SKPD dan digunakan langsung dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke Bendahara Umum Daerah (BUD) termasuk pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri dan pendapatan dari entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUD. Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau pada saat pengeluaran dari bendahara pengeluaran mendapatkan pengesahan oleh BUD. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kota Medan tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran pemerintah daerah tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja.

### b. Basis Akrual

Untuk laporan operasional dan neraca berarti bahwa pendapatan-lo, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Medan, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Medan:

#### a. Prinsip Nilai Historis (Historical Cost)

Prinsip ini menetapkan bahwa dasar pencatatan pertama kali terhadap aktiva dan kewajiban adalah menggunakan nilai perolehan pertama kali (nilai historis). Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai perolehan (*historis*) lebih dapat diandalkan dari pada penilaian

yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal ini jika tidak terdapat nilai historis maka dapat digunakan nilai wajar aktiva atau kewajiban terkait.

## b. Prinsip Realisasi (Realization)

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah di otorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah selama periode tahun anggaran dimaksud.

## c. Prinsip Substansi Mengungguli Formal (Subtance Over Form)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

### d. Prinsip Perioditas (Accounting Period)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja Pemerintah Kota Medan dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah tahunan. Periode pelaporan semesteran untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam semester sebelumnya.

#### e. Prinsip Konsistensi (Consistency)

Prinsip akuntansi yang harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

#### f. Prinsip Pengungkapan Lengkap(Full Disclosure)

Laporan keuangan Pemerintah Kota Medan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan.Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

#### g. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan Pemerintah Kota Medan diarahkan untuk menyajikan dengan wajar LRA, Neraca, LPSAL, LO, LAK, LPE, dan CaLK, serta Laporan Kinerja Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

## h. Prinsip Kehati-hatian (Conservatism)

Prinsip ini perlu diperhatikan pada saat timbul ketidakpastian dan keragu-raguan yang berkaitan dengan peristiwa dan keadaan tertentu. Sehubungan dengan hal ini, maka faktor pertimbangan sehat (*professional judgement*) perlu dilakukan oleh penyusun laporan keuangan. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan menggunakan hakikat serta dengan tingkahnya dengan menggunakan pertimbangan yang sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan yang sehat mengandung unsur kehatihatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

## 3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu.

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan disusun dengan memenuhi dasar pengukuran yakni:

## a. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya, pengukuran pos-pos dalam lapoan keuangan Pemerintah Kota Medan menggunakan nilai perolehan historis.

#### b. Koreksi Kesalahan

Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan. Kesalahan adalah penyajian akun-akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan ditetapkan oleh Perda. Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Perda.

#### c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal suatuentitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, kebijakan akuntansi yang diterapkan mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan, yang diikhtisarkan sebagai berikut.

#### a. Laporan Realisasi Anggaran

#### 1) Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan - LRA diakui pada saat kas diterima di RKUD, diterima oleh bendahara penerimaan, diterima oleh SKPD dan digunakan langsung dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD termasuk pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri

dan pendapatan dari entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUD. Pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Donasi/hibah dalam bentuk uang dicatat sebagai pendapatan hibah dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Perlakuan terhadap hibah dalam bentuk barang adalah dengan pengakuan aset atas barang tersebut dalam laporan neraca.

## 2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan bendahara pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau pada saat pengeluaran dari bendahara pengeluaran mendapatkan pengesahan oleh BUD. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

- a) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
  - (1) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
  - (2) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
  - (3) Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
  - (4) Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
  - (5) Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
  - (6) Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  - (7) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- b) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain

belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- (1) Belanja modal tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Belanja modal tanah juga meliputi harga bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalansi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak.
- (4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringandiakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- (5) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya pimpinan kegiatan (kuasa pengguna anggaran), PPTK, biaya alat tulis kantor untuk administrasi kegiatan, dan lain-lain.

Biaya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi, kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh biaya permulaan atau pra produksi yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya studi kelayakan. Biaya yang dikeluarkan setelah aset tetap diperoleh yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus diakui sebagai belanja modal, bukan merupakan aktivitas pemeliharaan. Dengan kata lain, biaya setelah perolehan aset tetap tersebut dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.

#### 3) Transfer

Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Surplus/(defisit) dicatat sebesar selisih lebih atau kurang antara pendapatan - LRA dengan belanja dan transfer selama satu periode pelaporan. **Pembiayaan** 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Salah satu komponen pembiayaan ini adalah penerimaan atas pinjaman dan pembayaran pinjaman jangka panjang.

#### 4) Selisih Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

Dalam penyusunan APBD, SiLPA/SiKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran, pada umumnya SiLPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain, jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan pembiayaan neto

### b. Laporan Operasional

#### 1) Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Donasi/hibah dalam bentuk uang dicatat sebagai pendapatan hibah dan dilaporkan dalam laporan operasional. Perlakuan terhadap hibah dalam bentuk barang adalah dengan pengakuan aset atas barang tersebut dalam laporan neraca.

#### 2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih atau kurang antara pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.

#### c. Neraca

#### 1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar,investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

#### a) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kas lainnya, setara kas, investasi

jangka pendek, piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

#### (1) Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah mencakup seluruh kas yang berada di bawah penguasaan BUD dan disimpan pada RKUD yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. **Kas di Bendahara Penerimaan** 

Kas di bendahara penerimaan mencakup saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang berasal dari setoran para wajib pajak dan retribusi yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal neraca.

#### (2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaranmencakup saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaranyang berasal dari Sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### (3) Kas di BLUD

Kas di BLUD mencakup seluruh kas yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.

## (4) Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

Kas Dana Kapitasi Pada FKTP mencakup seluruh kas yang dikelola oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditujukan menampung seluruh penerimaan FKTP dan membayar seluruh pengeluaran operasional fasilitas kesehatan tingkat pertama pada puskesmas.

#### (5) Kas BOSP

Kas BOSP mencakup seluruh kas yang dikelola oleh satuan pendidikan dasar SD maupun SMP yang ditujukan menampung seluruh penerimaan bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat dan membayar seluruh pengeluaran untuk mendukung operasional sekolah.

## (6) BOK Puskesmas

BOK Puskesmas mencakup seluruh kas yang dikelola oleh puskesmas yang ditujukan menampung seluruh penerimaan BOK Puskesmas dari pemerintah pusat dan membayar seluruh pengeluaran operasional puskesmas ke masyarakat.

#### (7) Kas lainnya

Kas lainnya mencakup seluruh uang tunai yang masih berada di bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran sampai akhir periode yang bukan berasal dari pendapatan atau sisa uang muka kerja.

#### (8) Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek

Setara kas dan investasi jangka pendek mencakup semua investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari perubahan nilai yang signifikan.

#### (9) Piutang

Piutang mencakup piutang pajak, retribusi, dan piutang lain-lain.

#### (a) Piutang pajak/retribusi

Piutang pajak/retribusi dicatat sebesar nilai nominalnya berdasarkan surat ketetapan pajak/retribusi yang telah terbit, namun pembayarannya belum diterima sampai dengan tanggal neraca.

#### (b) Piutang lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar piutang pajak/retribusi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR). piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### (c) Penyisihan piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

#### (d) Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka mencakup seluruh pembayaran atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu yang sampai akhir periode belum dipergunakan seluruhnya.

### (10) Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah yang digunakan dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan seperti: alat tulis kantor, komponen peralatan dan pipa, dan komponen bekas. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

### (a) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat dengan metode *Perpectual*.

## (b) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar.

- i. Biaya perolehan,apabila diperoleh dengan pembelian.
  - Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- ii. Biaya standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalamproses konversi bahan menjadi persediaan.
- iii. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

#### b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang diklasifikasikan kedalam investasi non permanen dan investasi permanen, yaitu:

#### (1) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen meliputi.

- (a) Seluruh dana Pemerintah Kota Medan yang diberikan dalam bentuk pinjaman uang atau barang bergulir kepada pihak ketiga.
- (b) Seluruh dana Pemerintah Kota Medan yang digunakan untuk pembelian saham yang telah terdaftar dalam pasar bursa saham dan tidak mempengaruhi secara signifikan dalam jangka panjang.

## (2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menambahkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah atau badan hukum lainnya. Metode penilaian yang digunakan oleh Pemerintah Kota Medan, yaitu:

## (a) Metode Biaya

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian

hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkuat.

## (b) Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

## c) Aset Tetap

#### (1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### (a) Pengakuan

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### (b) Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

#### (c) Pengungkapan

Dalam CaLK harus diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan mutasilainnya.

## (2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alatelektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

## (a) Pengakuan

Peralatan dan mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat peralatan dan mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

#### (b) Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

## (c) Pengungkapan

Dalam CaLK diungkapkan.

- i. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) peralatan dan mesin.
- ii. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan peralatan dan mesin.
  - Rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari KDP, dan penilaian);
  - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin;
  - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

## (3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### (a) Pengakuan

Gedung dan bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat gedung dan bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

#### (b) Pengukuran

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

#### (c) Pengungkapan

### Dalam CaLK diungkapkan:

- i. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) gedung dan bangunan.
- ii. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan gedung dan bangunan.
- iii. Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari KDP, dan penilaian);
  - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
  - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

#### (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### (a) Pengakuan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.Pengakuan atas Jalan, irigasi, dan jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

#### (b) Pengukuran

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

## (c) Pengungkapan

Dalam CaLK diungkapkan.

- i. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) jalan, irigasi, dan jaringan.
- ii. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan jalan, irigasi, dan jaringan.
- iii. Rekonsiliasi nilai tercatat jalan, irigasi, dan jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari KDPdanpenilaian);
  - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk jalan, irigasidan jaringan;
  - Pengurangan (penjualan, penghapusan dan penilaian).

## (5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### (a) Pengakuan

Aset tetap lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Aset tetap lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat aset tetap lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas aset tetap lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan.

### (b) Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

#### (c) Pengungkapan

Dalam CaLK diungkapkan.

- i. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap lainnya.
- ii. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap lainnya.
- iii. Rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari KDP, dan penilaian);
  - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset tetap lainnya;
  - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

## (6) Konstruksi dalam Pengerjaan

KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal neraca. KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

#### (a) Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- i. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- ii. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- iii. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

## (b) Pengukuran

KDP dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan melalui kontrak konstruksi meliputi:

- i. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- ii. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

#### (c) Pengungkapan

Dalam CaLK diungkapkan.

- Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- ii. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- iii. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- iv. Uang muka kerja yang diberikan;
- v. Retensi:
- vi. Kebijakan akuntansi untuk KDP.

## (7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

#### (8) Aset Bersejarah

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

## (9) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Menurut Pernyataan SAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).

## c) Dana Cadangan

Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mendefinisikan dana cadangan sebagai dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan diakui ketika pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan. Mutasi tambah atas saldo dana cadangan ketika Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembentukan dana cadangan diperlukan, dan mutasi kurang timbul pada saat pemerintah daerah melakukan pencairan dana cadangan yang penerimaan atas pencairan tersebut dianggarkan dalam pembiayaan. Hasil yang diterima dari pengelolaan dana cadangan, yaitu pendapatan bunga diakui menambah saldo dana cadangan, sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya administrasi deposito.

#### d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Medan selain aset lancar, investasi, dan aset tetap

## e) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti yang terdiri dari aset tanah dan aset gedung bagunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset atau keduanya serta tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

#### 2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban pada SKPD berupa kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar

kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca, dan kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek misalnya.

- a) Utang PFK;
- b) Bagian lancar utang jangka panjang;
- c) Utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban dibukukan dalam neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban tersebut. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan nilai (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

#### 3) Ekuitas

Ekuitas pada pos neraca adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

### 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 telah menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan SAP. Penerapan SAP di Pemerintah Kota Medan telah mengadopsi semua kebijakan akuntansi yang disarankan oleh SAP berbasis akrual sesuai ketentuan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Sebagai penjelasan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Medan secara umum sebagai berikut.

- a) Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan- LRA telah mengacu pada SAP, yaitu dengan mengakui pendapatan pada saat kas dan setara kas diterima dan masuk ke RKUD (dalam hal ini adalah rekening yang dikelola oleh BUD/kuasa BUD dan pengguna anggaran). Perlakuan terhadap koreksi atas transaksi pendapatan juga telah sesuai dengan SAP. Restitusi atas pendapatan tahun berjalan, sedangkan restitusi atas realisasi pendapatan tahun sebelumnya diakui sebagai belanja tak terduga yang pada akhirnya mengurangi ekuitas.
- b) Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan LO telah mengacu pada SAP, yaitu dengan mengakui pendapatan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). Pengakuan pendapatan LO diterapkan pada saat terbitnya surat ketetapan pajak/retribusi atau dokumen lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c) Penerapan kebijakan akuntansi belanja juga telah mengadopsi kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam SAP. Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari RKUD dan/atau rekening bendahara pengeluaran dan ketika belanja tersebut telah definitif dan dinyatakan sah oleh pihak yang berwenang. Penyetoran atas pengembalian realisasi belanja ke RKUD yang terjadi pada tahun berkenaan diakui mengurangi realisasi belanja yang bersangkutan. Sedangkan penerimaan atas pengembalian realisasi belanja tahun sebelumnya ke RKUD diakui sebagai pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja.
- d) Terkait dengan kebijakan akuntansi atas belanja modal, Pemerintah Kota Medan telah mengakui realisasi belanja modal berdasarkan prinsip harga perolehan, dan pada saat yang sama diakui menambah aset Kota Medan. Jika pada akhir tahun pelaporan terdapat aset yang masih dalam proses pengerjaan, maka dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengurangi realisasi pertambahan aset dan memindahkan ke KDP
- e) Penerapan kebijakan akuntansi beban juga telah mengadopsi kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam sap. beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau jasa.

- f) Perlakuan atas transaksi pembiayaan juga telah mengacu pada SAP dengan kebijakan akuntansi yang setara dengan kebijakan akuntansi pendapatan LRA dan belanja yang telah dibahas diatas.
- g) Pemerintah Kota Medan telah menetapkan kriteria dan metode penyusutan yang akan diberlakukan di seluruh SKPD, sehingga pelaporan aset untuk periode yang berakhir Tahun sudah disajikan dengan harga perolehan, dan dikurangi dengan penyusutan.

## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a.	Pendapatan - LRA	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		(Rp)	(Rp)
		6.294.920.537.089,02	5.802.580.478.749,50

Realisasi pendapatan-LRA Pemerintah Kota Medan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.294.920.537.089,02 dan Rp5.802.580.478.749,50. Pendapatan-LRA adalah penerimaan pendapatan daerah yang diterima BUD dan telah disetorkan ke RKUD, diterima oleh bendahara penerimaan, diterima oleh SKPD dan digunakan langsung dan telah dilaporkan ke BUD termasuk pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri dan pendapatan dari entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17. Realiasi Pendapatan - LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah - LRA	3.477.735.991.080,00	2.770.372.461.103,14	2.442.782.732.668,50
Pendapatan Transfer - LRA	3.582.204.963.000,00	3.429.257.072.514,00	3.260.957.621.792,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	106.469.242.121,00	95.291.003.471,88	98.840.124.289,00
Jumlah	7.166.410.196.201,00	6.294.920.537.089,02	5.802.580.478.749,50

Realisasi pendapatan-LRA TA 2024 sebesar Rp6.294.920.537.089,02 mencapai 87,84% dari anggaran sebesar Rp7.166.410.196.201,00 dengan kontribusi PAD sebesar 44,01%.

1)	Pendapatan Asli Daerah-LRA	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>	
		(Rp)	(Rp)	
		2 770 372 461 103 14	2.442.782.732.668.50	

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah. Realisasi PAD - LRA TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.770.372.461.103,14 dan Rp2.442.782.732.668,50 terdiri dari:

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Asli Daerah- LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Pajak Daerah - LRA	2.963.036.949.123,00	2.483.892.895.537,00	2.108.199.782.497,00
Retribusi Daerah - LRA	287.995.694.769,00	139.920.386.103,00	155.490.820.088,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	18.630.706.918,00	16.973.995.298,79	15.934.174.811,00
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	208.072.640.270,00	129.585.184.164,35	163.157.955.272,50
Jumlah	3.477.735.991.080,00	2.770.372.461.103,14	2.442.782.732.668,50

Realisasi PAD-LRA TA 2024 sebesar Rp2.770.372.461.103,14 mencapai 79,66% dari anggaran sebesar Rp3.477.735.991.080,00.

a)	Pendapatan	Pajak	Daerah	-	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	LRA				(Rp)	(Rp)
					2.483.892.895.537.00	2.108.199.782.497.00

Realisasi pendapatan pajak daerah-LRA TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.483.892.895.537,00 dan Rp2.108.199.782.497,00 terdiri dari:

Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Pajak Hotel - LRA	43.375.021.551,00	45.013.131.509,00	142.767.169.498,00
Pajak Restoran - LRA	107.756.342.064,00	111.846.363.162,00	357.473.609.152,00
Pajak Hiburan - LRA	18.599.933.389,00	19.030.721.417,00	71.633.400.148,00
Pajak Reklame - LRA	141.358.814.538,00	100.826.998.995,00	90.981.956.972,00
Pajak Penerangan Jalan - LRA	82.332.069.027,00	82.332.069.027,00	320.947.657.428,00
Pajak Parkir - LRA	6.161.755.258,00	6.270.376.708,00	31.723.902.140,00
Pajak Air Tanah - LRA	23.207.172.733,00	25.193.806.134,00	15.767.684.661,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - LRA	865.848.698.375,00	683.344.914.978,00	632.837.656.755,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	730.758.291.942,00	690.927.836.350,00	444.066.745.743,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman - LRA	309.511.744.518,00	275.710.141.460,00	0,00
PBJT Tenaga Listrik - LRA	388.710.422.001,00	270.140.579.790,00	0,00
PBJT Jasa Perhotelan - LRA	133.621.595.420,00	116.101.900.973,00	0,00
PBJT Jasa Parkir - LRA	44.338.244.742,00	12.530.077.313,00	0,00
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan - LRA	67.456.843.565,00	44.623.977.721,00	0,00
Jumlah	2.963.036.949.123,00	2.483.892.895.537,00	2.108.199.782.497,00

Realisasi pendapatan pajak daerah-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp2.483.892.895.537,00 atau 83,83% dari anggaran sebesar Rp2.963.036.949.123,00. Rincian pada **Lampiran 1**.

b)	Pendapatan Retribusi Daerah -	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	LRA	(Rp)	(Rp)
		139.920.386.103.00	155.490.820.088.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 adalah Rp139.920.386.103,00 dan Rp155.490.820.088,00 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2024 sebesar Rp139.920.386.103,00 atau 48,58% dari anggaran sebesar Rp287.995.694.769,00. Rincian pada **Lampiran 2.** 

Tabel 20. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2024 dan 2023

	•		
Uraian Retribusi	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Jasa Umum	152.555.401.545,00	48.859.768.298,00	59.351.469.375,00
Jasa Usaha	34.470.933.544,00	4.466.034.298,00	59.764.816.153,00
Perizinan Tertentu	100.969.359.680,00	86.594.583.507,00	36.374.534.560,00
Jumlah	287.995.694.769,00	139.920.386.103,00	155.490.820.088,00

1. Retribusi Jasa Umum	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	( <b>Rp</b> )
	48.859.768.298.00	59.351.469.375.00

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023 adalah Rp48.859.768.298,00 dan Rp59.351.469.375,00 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 adalah sebesar Rp48.859.768.298,00 atau 32,03% dari anggaran sebesar Rp152.555.401.545,00.

Tabel 21. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA TA 2024 dan 2023

Urajan Retribusi	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pelayanan Kesehatan	1.750.000.000,00	2.379.158.420,00	61.015.000,00
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	48.921.445.030,00	25.166.547.604,00	24.037.348.900,00
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan	0.00	268.055.000.00	395.943.000.00
Mayat	0,00	200.000.000,00	393.943.000,00
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000.000,00	19.114.346.759,00	24.883.189.962,00
Pengujian Kendaraan Bermotor	1.883.956.515,00	1.883.956.515,00	7.118.025.493,00
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00		2.411.997.000,00
Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	22.704.000,00	37.291.320,00
Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00		406.658.700,00

Uraian Retribusi	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Pelayanan Kebersihan	0,00	25.000.000,00	0,00
Jumlah	152.555.401.545,00	48.859.768.298,00	59.351.469.375,00

2. Retribusi Jasa Usaha	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	4.466.034.298.00	59.764.816.153.00

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023 adalah Rp4.466.034.298,00 dan Rp59.764.816.153,00 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 adalah sebesar Rp4.466.034.298,00 atau 12,96% dari anggaran sebesar Rp34.470.933.544,00.

Tabel 22. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA TA 2024 dan 2023

Uraian Retribusi	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Oralali Ketribusi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pemakaian Kekayaan Daerah	634.664.734,00	2.694.761.623,00	58.793.605.153,00
Terminal	0,00	49.231.000,00	273.516.000,00
Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	152.431.000,00	622.460.000,00
Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	43.660.000,00
Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000,00	41.275.000,00	31.575.000,00
Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	207.500.000,00	0,00	0,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.000.000,00	2.280.000,00	0,00
Pemanfaatan Aset Daerah	32.607.768.810,00	1.526.055.675,00	0,00
Jumlah	34.470.933.544,00	4.466.034.298,00	59.764.816.153,00

3. Retribusi Perizinan Tertentu	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	86,594,583,507,00	36,374,534,560,00

Realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023 adalah Rp86.594.583.507,00 dan Rp36.374.534.560,00 Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 adalah sebesar Rp86.594.583.507,00 atau 85,76% dari anggaran sebesar Rp100.969.359.680,00.

Tabel 23. Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA TA 2024 dan 2023

Uraian Retribusi	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	36.191.169.560,00
Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	183.365.000,00
Persetujuan Bangunan Gedung	98.200.000.000,00	84.771.555.040,00	0,00
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.769.359.680,00	1.823.028.467,00	0,00
Jumlah	100.969.359.680,00	86.594.583.507,00	36.374.534.560,00

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Tahun 2024 Tahun 2023 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp) (Rp) - LRA 16.973.995.298,79 15.934.174.811,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp16.973.995.298,79 dan Rp15.934.174.811,00 mencapai 91,11% dari anggaran sebesar Rp18.630.706.918,00.

Tabel 24. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Perusahaan Umum Daerah (Perumda)	1.000.000.000,00	264.446.944,00	405.099.549,00
PT Bank Sumut	16.124.076.918,00	16.124.076.918,79	15.529.075.262,00
PT KIM	1.506.630.000,00	585.471.436,00	0,00
Jumlah	18.630.706.918,00	16.973.995.298,79	15.934.174.811,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp16.973.995.298,79 atau 91,11% dari anggaran sebesar Rp18.630.706.918,00. Perumda Rumah Potong Hewan dan Perumda Pembangunan sesuai dengan laporan keuangan (*audited*) Tahun 2023 masih mengalami kerugian sehingga tidak ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2024.

d) Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2024 Tahun 2023
(Rp) (Rp)
129.585.184.164,35 163.157.955.272,50

Realisasi lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp129.586.547.251,35 dan Rp163.157.955.272,50 terdiri dari:

Tabel 25. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Penerimaan Jasa Giro – LRA	23.000.000.000,00	4.413.453.111,00	10.681.594.614,00
Pendapatan Denda Pajak – LRA	69.640.248.000,00	11.696.064.545,00	16.798.793.885,00
Pendapatan dari Pengembalian	73.920.470.173,00	86.263.879.136,35	55.932.124.150,20
Pendapatan BLUD – LRA	41.511.922.097,00	27.211.787.372,00	79.745.442.623,30
Jumlah	208.072.640.270,00	129.585.184.164,35	163.157.955.272,50

Realisasi lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp129.585.184.164,35 atau 62,28% dari anggaran sebesar Rp208.072.640.270,00.

2) Pendapatan Transfer -LRA Tahun 2024 Tahun 2023
(Rp) (Rp)
3.429.257.072.514,00 3.260.957.621.792,00

Pendapatan Transfer-LRA merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, serta DBH Pajak dan Bantuan Keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pendapatan Transfer selain dimaksudkan membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Realisasi Pendapatan Transfer - LRA TA 2024 dan 2023 masingmasing sebesar Rp3.429.257.072.514,00 dan Rp3.260.957.621.792,00 terdiri dari:

Tabel 26. Rincian Pendapatan Transfer-LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Transfer Pem. Pusat - LRA	2.714.204.963.000,00	2.748.283.711.210,00	2.482.957.621.792,00
DBH – LRA	208.897.527.000,00	275.734.243.000,00	231.740.767.929,00
DAU – LRA	1.931.432.611.000,00	1.927.311.908.517,00	1.678.680.488.000,00
DAK Fisik – LRA	32.700.499.000,00	30.396.472.723,00	38.650.129.380,00
DAK Non Fisik – LRA	541.174.326.000,00	514.841.086.970,00	533.886.236.483,00

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Transfer Antar Daerah - LRA	868.000.000.000,00	680.973.361.304,00	778.000.000.000,00
DBH Pajak - LRA	728.000.000.000,00	540.973.361.304,00	738.000.000.000,00
BK - LRA	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	40.000.000.000,00
Jumlah	3.582.204.963.000,00	3.429.257.072.514,00	3.260.957.621.792,00

Realisasi pendapatan transfer-LRA TA 2024 sebesar Rp3.429.257.072.514,00. mencapai 95,73% dari anggaran sebesar Rp3.582.204.963.000,00.

a)	Transfer Pemerintah Pusat -	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	LRA	(Rp)	(Rp)
		2.748.283.711.210,00	2.482.957.621.792,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.748.283.711.210,00 dan Rp2.482.957.621.792,00. Alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian APBN TA 2024 tanggal 28 Nopember 2023 terdiri dari

(1) <b>DBH - LRA</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	275.734.243.000,00	231.740.767.929,00

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp275.734.243.000,00 dan Rp231.740.767.929,00 terdiri dari.

Tabel 27.Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	3.963.422.000,00	4.636.188.000,00	5.059.059.642,00
DBH PPh	198.620.135.000,00	264.215.458.000,00	220.232.636.040,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LRA	266.375.000,00	293.512.000,00	294.658.110,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi – LRA	0,00	1.113.824.000,00	13.850.238,00
DBH SDA Gas Bumi – LRA	1.111.352.000,00	6.111.000,00	17.506.741,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi – LRA	70.732.000,00	108.107.000,00	109.464.576,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty - LRA	1.596.420.000,00	2.091.952.000,00	2.018.636.100,00
DBH Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA	71.338.000,00	71.338.000,00	2.490.980.271,00
DBH SDA Perikanan – LRA	1.125.152.000,00	1.125.152.000,00	1.503.976.211,00
DBH Sawit	2.072.601.000,00	2.072.601.000,00	0,00
Jumlah	208.897.527.000,00	275.734.243.000,00	231.740.767.929,00

Realisasi DBH-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp275.734.243.000,00 atau 131,99% dari anggaran sebesar Rp208.897.527.000,00.

(2) DAU - LRA	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	1.927.311.908.517,00	1.678.680.488.000,00

Realisasi DAU selama TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.927.311.908.517,00 dan Rp1.678.680.488.000,00 terdiri dari:

Tabel 28. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA TA 2024 dan 2023

	=	-	
Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya – LRA	1.602.382.293.000,00	1.602.382.293.000,00	1.395.962.151.000,00
DAU Bidang Pendidikan – LRA	226.268.087.000,00	226.268.087.000,00	93.202.829.000,00
DAU Bidang Kesehatan – LRA	37.659.729.000,00	37.659.729.000,00	73.579.860.000,00

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
DAU Bidang Pekerjaan Umum – LRA	12.010.707.000,00	12.010.707.000,00	7.300.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan – LRA	30.200.000.000,00	30.200.000.000,00	30.200.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja – LRA	22.911.795.000,00	18.791.092.517,00	78.435.648.000,00
Jumlah	1.931.432.611.000,00	1.927.311.908.517,00	1.678.680.488.000,00

Realisasi DAU-LRA TA 2024 sebesar Rp1.927.311.908.517,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp1.931.432.611.000,00 Realisasi kurang dari 100% disebabkan kondisi regulasi pelaksanaannya yang masih belum optimal.

(3) DAK Fisik - LRA Tahun 2024 Tahun 2023 (Rp) (Rp) 30.396.472.723,00 38.650.129.380,00

Realisasi penerimaan dari DAK Fisik-LRA yang berasal dari pemerintah pusat selama TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.396.472.723,00 dan Rp38.650.129.380,00 terdiri dari:

Tabel 29. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Uraian	Tahun 2024(Rp)	Tahun 2024(Rp)	Tahun 2023(Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD – LRA	0,00	0,00	280.646.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD – LRA	3.770.288.000,00	3.770.033.000,00	3.888.261.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP – LRA	2.155.772.000,00	2.155.418.000,00	5.761.967.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-			_
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian	0,00	0,00	1.873.750.000,00
Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat - LRA			
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-	81.192.000.00	80.917.200,00	17.470.132.000,00
Penurunan Stunting (KB) – LRA	61.192.000,00	00.917.200,00	17.470.132.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler – LRA	8.284.489.000,00	7.667.975.000,00	3.168.556.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler – LRA	6.077.769.000,00	4.920.266.000,00	2.579.209.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-	12.235.991.000.00	11.708.123.523.00	2.382.556.772,00
Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan – LRA	12.233.991.000,00	11.700.123.323,00	2.302.330.772,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-	94.998.000,00	93.740.000.00	1.245.051.608,00
Keluarga Berencana – LRA	54.550.000,00	93.740.000,00	1.245.051.000,00
Jumlah	32.700.499.000,00	30.396.472.723,00	38.650.129.380,00

Realisasi DAK Fisik - LRA TA 2023 sebesar Rp38.650.129.380,00 atau 92,95% dari anggaran sebesar Rp32.700.499.000,00 Realisasi Kurang dari 100% disebabkan kondisi regulasi pelaksanaannya yang masih belum optimal.

(4) DAK Non Fisik – LRA	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	514.841.086.970,00	533.886.236.483,00

Realisasi penerimaan dari DAK Non Fisik-LRA yang berasal dari pemerintah pusat selama TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp514.841.086.970,00 dan Rp533.886.236.483,00 terdiri dari:

Tabel 30. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA TA 2024 dan 2023

Uraian DAK Non Fisik	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler – LRA	277.194.440.000,00	276.586.084.720,00	285.089.967.555,00
BOS Kinerja – LRA	7.172.500.000,00	7.092.500.000,00	8.680.000.000,00
TPG PNSD – LRA	185.322.722.000,00	172.074.457.080,00	176.750.832.000,00
Tamsil Guru PNSD – LRA	5.097.920.000,00	7.002.899.000,00	4.400.851.134,00
BOP PAUD – LRA	12.811.930.000,00	12.742.695.000,00	14.587.745.500,00

Uraian DAK Non Fisik	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
BOP Pendidikan Kesetaraan	7.784.550.000,00	7.632.690.000,00	7.793.220.000,00
BOKKB-BOK – LRA	13.420.242.000,00	9.905.473.267,00	16.178.268.789,00
BOKKB-Akreditasi Puskesmas - LRA	19.436.703.000,00	10.593.519.127,00	12.078.320.200,00
BOKKB-BOKB – LRA	11.632.746.000,00	10.322.598.053,00	7.607.093.953,00
PK2UKM – LRA	343.484.000,00	332.529.000,00	409.670.000,00
Fasilitasi Penanaman Modal – LRA	355.089.000,00	291.461.750,00	72.915.918,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak – LRA	342.000.000,00	220.967.473,00	182.663.934,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian – LRA	260.000.000,00	43.212.500,00	54.687.500,00
Jumlah	541.174.326.000,00	514.841.086.970,00	533.886.236.483,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA TA 2024 sebesar Rp514.841.086.970,00 atau 95,13% dari anggaran sebesar Rp541.174.326.000,00 Realisasi Kurang dari 100% disebabkan kondisi regulasi pelaksanaannya yang masih belum optimal.

b) Pendapatan Transfer Antar	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>	
Daerah – LRA	(Rp)	(Rp)	
	680.973.361.304.00	778.000.000.000.00	

Realisasi pendapatan transfer antar daerah-LRA TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp680.973.361.304,00 dan Rp778.000.000.000,00 terdiri dari:

(1) Bagi Hasil Pajak - LRA		<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		(Rp)	(Rp)
		540.973.361.304,00	738.000.000.000,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp540.973.361.304,00 dan Rp738.000.000.000,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya pada tahun 2024 berdasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/175/KPTS/2024 tentang "Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 Tanggal 18 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Oralan	Tahun 2024(Rp)	Tahun 2024(Rp)	Tahun 2023(Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	263.301.738.377,00	187.926.155.204,00	274.421.342.266,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	131.372.320.039,00	94.020.180.815,00	145.476.392.655,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	211.394.115.993,00	144.425.592.601,00	221.716.324.001,00
Pajak Pengambilan Pemanfaan Air Permukaan - LRA	3.891.172.613,00	1.533.478.437,00	4.378.752.932,00
Pajak Rokok - LRA	118.040.652.978,00	113.067.954.247,00	92.007.188.146,00
Jumlah	728.000.000.000,00	540.973.361.304,00	738.000.000.000,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024 sebesar Rp540.973.361.304,00 atau 74,31% dari anggaran sebesar Rp728.000.000.000,00.

(2) Bantuan Keuangan	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>	
	(Rp)	(Rp)	
	140,000,000,000,00	40.000.000.000.00	

Realisasi Bantuan Keuangan-LRA TA 2024 sebesar Rp140.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp140.000.000.000,00. yaitu bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3) Lain-lain Pendapatan Tahun 2024		<b>Tahun 2023</b>
Daerah yang Sah -LRA	(Rp)	(Rp)
	95.291.003.471,88	98.840.124.289,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp95.291.003.471,88 dan Rp98.840.124.289,00 yang terdiri dari.

a) Pendapatan Hibah	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>	
Pemerintah Pusat - LRA	(Rp)	(Rp)	
	1.304.000.000,00	0,00	

Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp1.304.000.000,00 atau 39,76% dari anggaran sebesar Rp3.280.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat TA 2024 berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Medan untuk Hibah Sanitasi (Air Limbah Terpusat) yang bersumber dari Penerimaan dalam Negeri APBN TA 2024, nomor: PHD-06/MK.7/DTK.03/ALT/2024 tanggal 26 maret 2024.

b) Pendapatan Dana	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
Kapitasi JKN pada	(Rp)	(Rp)
FKTP-LRA	93.987.003.471,88	98.840.124.289,00

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp93.987.003.471,88 atau 91,08% dari anggaran sebesar Rp103.189.242.121,00 Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yaitu pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 41 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Medan.

b. Belanja	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	6.258.347.667.812,28	6.282.441.543.317,28

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan bendahara pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau pada saat pengeluaran dari bendahara pengeluaran mendapatkan pengesahan oleh BUD. Realisasi belanja pada Pemerintah Kota Medan untuk TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.258.347.199.239,28 dan Rp6.282.441.543.317,28 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Belanja Operasi	5.202.756.617.110,00	4.764.607.106.892,98	4.788.957.849.977,28
Belanja Modal	2.007.120.599.307,00	1.488.415.288.707,30	1.493.367.508.931,00
Belanja Tidak Terduga	25.213.206.034,00	5.325.272.212,00	116.184.409,00
Jumlah	7.235.090.422.451.00	6.258.347.667.812.28	6.282.441.543.317.28

# 1) Belanja Operasi

Tahun 2024 Tahun 2023 (Rp) (Rp) 4.764.607.106.892,98 4.788.957.849.977,28

Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial. Belanja operasi TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.764.607.106.892,98 dan Rp4.788.957.849.977,28 terdiri dari.

Tabel 33. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Belanja Pegawai	2.098.444.676.253,00	1.926.958.217.929,00	1.854.598.838.131,00
Belanja Barang dan Jasa	2.647.001.058.562,00	2.421.257.635.488,98	2.571.197.143.166,28
Belanja Bunga	7.500.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	338.351.503.979,00	313.250.004.750,00	290.823.938.445,00
Belanja Bantuan Sosial	111.459.378.316,00	103.141.248.725,00	72.337.930.235,00
Jumlah	5.202.756.617.110,00	4.764.607.106.892,98	4.788.957.849.977,28

Realisasi Belanja Operasi ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 40,44%, Belanja Barang dan Jasa 50,82%, Belanja Hibah 6,57% dan Belanja Bantuan Sosial 2,16%.

a) Belanja Pegawai	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	1.926.958.217.929.00	1.854.598.838.131.00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 sebesar Rp1.926.958.217.929,00 dan Rp1.854.598.838.131,00 Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.030.174.074.820,00	969.547.767.222,00	906.399.189.138,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	679.616.997.102,00	619.729.497.155,00	605.681.111.372,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	298.259.843.295,00	258.584.191.745,00	261.908.858.348,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	43.997.351.448,00	43.494.095.765,00	44.153.194.342,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.499.101.868,00	875.618.428,00	1.264.659.716,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.897.307.720,00	4.198.419.584,00	3.931.455.004,00
Belanja Pegawai BLUD	40.000.000.000,00	30.528.628.030	31.260.370.211,00
Jumlah	2.098.444.676.253,00	1.926.958.217.929,00	1.854.598.838.131,00

Realisasi belanja pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp1.926.958.217.929,00 atau 91,83% dari anggaran sebesar Rp2.098.444.676.253,00.

b) Belanja Barang dan Jasa	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	( <b>Rp</b> )	(Rp)
	2.421.257.635.488,98	2.571.197.143.166,28

Belanja barang dan jasa TA 2024 dan 2023 sebesar Rp2.421.257.635.488,98 dan Rp2.571.197.143.166,28 Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk

pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 35. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	681.938.287.331,00	609.116.911.803,16	703.483.649.785,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.604.960.804,00	6.618.024.000,00	15.648.990.828,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.251.150.159,00	1.041.329.700,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	1.222.177.533.791,00	1.131.005.381.371,86	1.160.082.219.040,00
Belanja luaran Jaminan/ Asuransi	228.209.356.039,00	227.178.237.961,00	245.366.578.910,00
Belanja Sewa Tanah	421.000.000,00	361.404.000,00	615.900.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	56.834.882.547,00	38.528.079.867,00	33.089.044.312,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.727.753.500,00	4.360.092.903,00	6.626.044.760,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	492.700.000,00	301.058.000,00	433.745.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	52.348.834.960,00	46.913.164.206,00	44.864.939.960,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.078.274.142,00	1.858.291.610,00	3.116.100.430,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.769.985.000,00	2.072.961.766,00	4.108.309.910,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	15.957.647.735,00	13.689.027.243,00	12.861.896.288,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	594.949.136,00	539.593.561,00	51.631.605,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	200.000.000,00	199.600.000,00	2.773.487.042,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.286.022.810,00	52.761.220.109,00	58.631.360.968,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.122.691.328,00	25.927.081.240,94	35.223.997.218,33
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.158.458.590,00	3.799.272.384,00	5.142.665.924,50
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	241.157.640,00	40.680.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.513.253.000,00	69.804.398.245,00	96.702.043.433,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.392.762.795,00	1.586.992.409,00	1.462.132.467,00
Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat	6.276.159.699,00	5.463.450.598,00	3.333.162.010,00
Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	448.900.006,00	133.425.000,00	670.050.000,00
Masyarakat			
Belanja Barang dan Jasa BOS	103.495.690.550,00	122.075.487.921,00	93.075.848.403,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.358.647.000,00	2.909.718.999,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.000.000.000,00	52.972.750.591,02	43.793.344.872,45
Jumlah	2.647.001.058.562,00	2.421.257.635.488,98	2.571.197.143.166,28

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 adalah sebesar Rp2.421.257.635.488,98 atau 91,47% dari anggaran sebesar Rp2.647.001.058.562,00 Belanja Barang dan Jasa ini untuk meningkatkan penyelengaraan pelayanan dasar wajib urusan desentralisasi Pemko Medan.

c) Belanja Bunga	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	0.00	0.00

Realisasi Belanja Bunga pada TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00. Belanja Bunga merupakan pembayaran bunga atas utang pemerintah. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Medan menganggarkan Belanja Bunga atas rencana pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan Bank di tahun 2024.

d) Belanja Hibah	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	313.250.004.750,00	290.823.938.445,00

Realisasi belanja hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan badan/lembaga/organisasi swasta pada TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp313.250.004.750,00 dan Rp290.823.938.445,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	200.792.729.450,00	181.983.261.574,00	189.041.708.121,00
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7.222.170.832,00	7.222.170.826,00	5.058.655.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)	4.043.750.000,00	1.366.000.000,00	4.852.500.000,00
Dinas Kesehatan	500.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR)	10.000.000.000,00	9.960.000.000,00	11.455.000.000,00
Dinas Sosial (Dinsos)	1.017.425.918,00	800.000.000,00	1.850.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPM dan KB)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora)	12.773.897.847,00	12.727.430.918,00	15.710.089.345,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbanpol)	101.001.529.932,00	98.191.141.432,00	61.355.985.979,00
Jumlah	338.351.503.979,00	313.250.004.750,00	290.823.938.445,00

Pada tahun anggaran 2024, sesuai amanat peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 belanja Hibah anggaran dan realisasinya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp313.250.004.750,00 atau 92,58% dari anggaran sebesar Rp338.351.503.979,00.

e) Belanja Bantuan Sosial	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	( <b>Rp</b> )
	103.141.248.725,00	72.337.930.235,00

Realisasi belanja bantuan sosial pada TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp103.141.248.725,00 dan Rp72.337.930.235,00. Realisasi tersebut merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat/perorangan yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Sosial adapun anggaran dan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 37. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Disdikbud	34.000.000.000,00	32.712.716.800,00	4.694.481.535,00
Dinas PKPCKTR	160.000.000,00	0,00	0,00
Dinsos	77.299.378.316,00	70.428.531.925,00	67.643.448.700,00
Jumlah	111.459.378.316,00	103.141.248.725,00	72.337.930.235,00

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 sudah mengikuti aturan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp103.141.248.725,00 atau 92,54% dari anggaran sebesar Rp111.459.378.316,00.

# 2) Belanja Modal Tahun 2024 Tahun 2023 (Rp) (Rp) (Rp) 1.488.415.288.707,30 1.493.367.508.931,00

Belanja modal TA 2024 dan 2023 terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan Aset Lain-lain dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Uraian Belanja Modal	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Tanah	99.826.874.013,00	39.241.989.901,00	102.440.925.657,00
Peralatan dan Mesin	175.355.768.482,00	160.535.564.193,00	287.203.939.384,00
Gedung dan Bangunan	1.215.100.679.477,00	856.812.504.048,00	404.944.131.783,00
Jalan, Irigasi. dan Jaringan	506.957.248.139,00	423.161.734.129,30	683.514.637.511,00
Aset Tetap Lainnya	9.515.277.846,00	8.300.145.086,00	15.263.874.596,00
Aset Lainnya	364.751.350,00	363.351.350,00	0,00
Jumlah	2.007.120.599.307,00	1.488.415.288.707,30	1.493.367.508.931,00

a) Belanja Tanah	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	39.241.989.901,00	102.440.925.657,00

Realisasi belanja tanah di lingkungan SKPD Kota Medan TA 2024 dan 2023 masingmasing sebesar Rp39.241.989.901,00 dan Rp102.440.925.657,00. Realisasi belanja Modal Tanah TA 2024 merupakan Realisasi Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp39.241.989.901,00 atau 39,31% dari anggaran sebesar Rp99.826.874.013,00.

b) Belanja	Peralatan	dan	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
Mesin			(Rp)	(Rp)
			160.535.564.193.00	287.203.939.384.00

Realisasi belanja peralatan dan mesin di lingkungan SKPD Kota Medan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp160.535.564.193,00 dan Rp287.203.939.384,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

Pangadaan	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Pengadaan	Tahun 2024(Rp)	Tahun 2024(Rp)	Tahun 2023(Rp)
Alat Besar	12.455.924.223,00	9.809.078.180,00	55.007.540.363,00
Alat Angkutan	4.323.044.400,00	3.859.300.000,00	63.600.444.140,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.270.895.060,00	341.349.672,00	2.218.976.342,00
Alat Pertanian	8.876.025,00	7.486.250,00	96.803.768,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	93.414.876.893,00	88.591.892.890,00	58.111.766.031,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.655.256.681,00	1.368.677.683,00	3.861.821.387,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.002.069.913,00	5.275.660.427,00	31.889.184.284,00
Alat Laboratorium	868.991.024,00	652.667.004,00	2.483.567.500,00
Komputer	35.239.604.363,00	32.718.981.621,00	39.154.420.074,00
Alat Eksplorasi	0,00	0,00	6.926.400,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	5.746.900.000,00
Alat Keselamatan Kerja	1.543.429.900,00	1.443.085.400,00	358.215.129,00
Rambu-Rambu	15.260.900.000,00	14.972.664.682,00	24.217.984.996,00
Peralatan Olahraga	311.900.000,00	300.587.080,00	449.388.970,00
Peralatan dan Mesin BLUD	3.000.000.000,00	1.194.133.304,00	0,00
Jumlah	175.355.768.482,00	160.535.564.193,00	287.203.939.384,00

Realisasi belanja peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp160.535.564.193,00 atau 91,55% dari anggaran sebesar Rp175.355.768.482,00.

c) Belanja Gedung dan Tahun 2024 Tahun 2023 Bangunan (Rp) (Rp) 856.812.504.048,00 404.944.131.783,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan di lingkungan SKPD Kota Medan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp856.812.504.048,00 dan Rp404.944.131.783,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Bangunan Gedung	1.214.607.835.173,00	856.326.734.201,00	404.492.558.787,00
Monumen	110.000.000,00	104.737.693,00	86.366.201,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	382.844.304,00	381.032.154,00	365.206.795,00
Jumlah	1.215.100.679.477,00	856.812.504.048,00	404.944.131.783,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp856.812.504.048,00 atau 70,51% dari anggaran sebesar Rp1.215.100.679.477,00.

d) Belanja Jalan, Irigasi,	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>	
dan Jaringan	(Rp)	(Rp)	
	423.161.734.129,30	683.514.637.511,00	

Realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan di lingkungan SKPD Kota Medan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp423.161.734.129,30 dan Rp683.514.637.511,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Jalan dan Jembatan	368.764.953.230.00	295.878.247.552,30	327.251.939.785,00
Bangunan Air	96.573.618.883,00	96.323.385.451,00	333.767.295.415,00
Instalasi	41.618.676.026,00	30.960.101.126,00	21.195.263.711,00
Jaringan	0,00	0,00	1.300.138.600,00
Jumlah	506.957.248.139,00	423.161.734.129,30	683.514.637.511,00

Realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan TA 2024 sebesar Rp423.161.734.129,30 atau 83,47% dari anggaran sebesar Rp506.957.248.139,00.

e) Belanja Aset Tetap Lainnya	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	( <b>Rp</b> )
	8.300.145.086,00	15.263.874.596,00

Realisasi belanja aset tetap lainnya di lingkungan SKPD Kota Medan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.300.145.086,00 dan Rp15.263.874.596,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	Realisasi Tahun 2023(Rp)
Bahan Perpustakaan	50.000.000,00	49.950.000,00	854.480.500,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.800.000.000,00	4.739.500.000,00	24.420.000,00
Tanaman	0,00	0,00	170.642.445,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	3.665.277.846,00	3.510.695.086,00	12.200.098.116,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	2.014.233.535,00
Jumlah	9.515.277.846,00	8.300.145.086,00	15.263.874.596,00

Realisasi belanja aset tetap lainnya pada TA 2024 sebesar Rp8.300.145.086,00 atau 87,23% dari anggaran sebesar Rp9.515.277.846,00.

f) Belanja Aset Lainnya	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	363.351.350,00	0,00

Realisasi belanja aset lainnya di lingkungan SKPD Kota Medan TA 2024 sebesar Rp363.351.350,00 atau 99,62% dari anggaran sebesar Rp364.751.350,00 Belanja Aset lainnya TA 2024 merupakan Realisasi belanja Pemerintah Kota medan terhadap pengadaan Aset Tidak Berwujud seperti Software.

3)	Belanja Tidak Terduga	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		(Rp)	(Rp)
		5.325.272.212,00	116.184.409,00

Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.325.272.212,00 dan Rp116.184.409,00. Belanja Tidak Terduga merupakan pegeluaran anggaran yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Belanja ini digunakan untuk mengatasi keadaan darurat dan keperluan mendesak. Realisasi belanja tidak terduga pada Tahun 2024 merupakan Realisasi Pengembalian atas lebih bayar pajak daerah dan lebih bayar pengembalian pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024(Rp)
Peng	embalian Pajak PBB-P2	
1	Pengembalian lebih bayar/double bayar PBB-P2 An. Edy Suanto, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	3.415.813,00
2	Pengembalian lebih bayar/double bayar PBB-P2 An. PT. Bank Sumut, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	27.278.102,00
3	Pengembalian lebih bayar/double bayar PBB-P2 An. Rahim Haloho Cs, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	10.276.627,00
4	Pengembalian lebih bayar/double bayar PBB-P2 An. PT. Kurnia Tetap Mulia, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	4.602.631,00
5	Pengembalian lebih bayar/double bayar PBB-P2 An. PT. Pelindo, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	4.924.356.800,00
Peng	embalian BPHTB	
1	Pengembalian lebih bayar/double bayar BPHTB An. Nurhayati Lubis, S.Ag, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	1.985.300,00
2	Pengembalian lebih bayar/double bayar BPHTB An. Ijo Sam, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	88.161.000,00
Peng	embalian Pajak Reklame	
1	Pengembalian lebih bayar/double bayar Pajak Reklame An. PT. Rekso Nasional Food, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	13.901.048,00
2	Pengembalian lebih bayar/double bayar Pajak Reklame An. PT.AIA Financial, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	232.789.689,00
Peng	embalian Pajak Restoran	
1	Pengembalian lebih bayar/double bayar Pajak Restoran An. RM. UD. Lau Yu, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	8.900.202,00
Peng	embalian ke Pegawai	
1.	Pengembalian lebih bayar/double bayar An. Yunita Sari, SH, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	4.845.000,00
2.	Pengembalian lebih bayar/double bayar An. Drs. Zulkarnain, M.Si, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	510.000,00
3.	Pengembalian lebih bayar/double bayar An. Muhammad Sofyan, S.Sos, M.AP, Sesuai SK Walikota Nomor: 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	4.250.000,00
	Jumlah	5.325.272.212,00

Belanja Tak Terduga Tahun 2024 dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan. Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp5.325.272.212,00 atau 21,12% dari anggaran sebesar Rp25.213.206.034,00.

# c. Surplus/Defisit Tahun 2024 Tahun 2023 (Rp) (Rp) (Rp) (479.861.064.567,78)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dalam tahun anggaran berkenaan. Realisasi TA 2024 mengalami surflus sebesar Rp36.572.869.276,74 yang merupakan selisih kurang antara jumlah realisasi pendapatan dikurangi dengan jumlah realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Surplus/(Defisit) TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan	7.166.410.196.201,00	6.294.920.537.089,02	5.802.580.478.749,50
Belanja	7.235.090.422.451,00	6.258.347.667.812,28	6.282.441.543.317,28
Surplus/(Defisit)	(68.680.226.250,00)	36.572.869.276,74	(479.861.064.567,78)

d. Pembiayaan Netto	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	68.680,706.826,30	548.541.290.818,08

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan serta koreksi-koreksi tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan netto Pemerintah Kota Medan TA 2024 sebesar Rp68.680.706.826,30 merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp68.680.706.826,30 dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00. Realisasi pembiayaan netto TA 2024 sebesar Rp68.680.706.826,30 mencapai 25,56% dari anggaran sebesar Rp268.680.226.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	` · · ·		
Penggunaan SiLPA			
Penggunaan Silpa Tahun	69 690 226 250 00	68.680.226.250.30	E40 E44 020 E62 00
Sebelumnya	68.680.226.250,00	00.000.220.230,30	548.544.830.563,08
Koreksi SiLPA	0,00	480.576,00	(3.539.745,00)
Penerimaan Pinjaman Daerah		·	, , ,
Pinjaman Daerah dari Lembaga	200 000 000 000 00	0.00	0.00
Keuangan Bank	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	268.680.226.250,00	68.680.706.826,30	548.541.290.818,08
Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
Pembayaran cicilan pokok utang	200 000 000 000 00	0.00	0.00
yang jatuh tempo	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	68.680.226.250,00	68.680.706.826,30	548.541.290.818,08

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	68.680.706.826.30	548.541.290.818.08

Penerimaan pembiayaan TA 2024 terealisasi sebesar Rp68.680.706.826,30 atau 25,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp268.680.226.250,00 terdiri atas:

a)	Penggunaan SiLPA	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		(Rp)	(Rp)
		68.680.226.250.30	548.544.830.563.08

Penggunaan SiLPA merupakan SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau pembiayaan netto positif pada tahun berjalan. Realisasi penggunaan SiLPA TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp68.680.226.250,30 dan Rp548.544.830.563,08.

b) Koreksi SiLPA - LRA	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	480.576,00	(3.539.745,00)

Koreksi SiLPA TA 2024 dan TA 2023 masing-masing Rp480.576,00 dan Rp(3.539.745,00). Realisasi koreksi SiLPA TA 2024 Rp480.576,00 merupakan sisa Dana BOS pada tahun 2023 yang tidak tercatat sebagai Silpa Dana BOS pada TA.2023.

c) Pinjaman Daerah dari lembaga	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
keuangan BANK	(Rp)	(Rp)
	0.00	0.00

Pinjaman daerah dari Lembaga keuangan Bank TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00. Pinjaman daerah dari Lembaga keuangan Bank merupakan pinjaman jangka pendek guna membiayai kegiatan investasi prasarana dan sarana, menutup defisit APBD, membiayai Pengeluaran pembiayaan dan mengatasi kekurangan kas.

2) Pengeluaran Pembiayaan	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	0.00	0.00

Pengeluaran pembiayaan TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00. Pengeluran Pembiayaan TA 2024 merupakan Pengeluaran yang dianggarkan guna Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dari Lembaga keuangan Bank.

e. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
Anggaran (SiLPA)	( <b>Rp</b> )	(Rp)
	105.253.564.103,04	68.680.226.250,30

Realisasi Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 dan TA.2023 adalah sebesar Rp105.253.564.100,04 dan Rp68.680.226.250,30. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) LRA TA 2024 sebesar Rp105.253.564.100,04 merupakan saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp105.073.564.103,04 dan saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar

Rp180.000.000,00 yang merupakan sisa UYHD tahun 2024 Kecamatan Medan Area yang disetorkan ke RKUD pada tanggal 25 Maret 2025.

#### 2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi mengenai perubahan gunggungan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL Pemerintah Kota Medan TA 2024 menyajikan informasi nilai SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SiLPA/SiKPA, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan nilai SAL akhir, rincian sebagai berikut:

a. SAL Awal	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	68.680.226.250,30	548.544.830.563,08

SAL awal Pemerintah Kota Medan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp68.680.226.250,30 dan Rp548.544.830.563,08.

b. Penggunaan SAL Sebagai	<b>Tahun 2024</b>	Tahun2023
Penerimaan Pembiayaan	(Rp)	(Rp)
	68.680.706.826,30	548.541.290.818,08

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp68.680.706.826,30 dipergunakan sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaan TA 2024 dan Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp548.541.290.818,08 dipergunakan sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaan TA.2023.

c. SiLPA/SiKPA	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	105,253,576,103,04	68.680.226.250,30

SiLPA TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp105.253.576.103,04 dan Rp68.680.226.250,30 merupakan selisih antara surplus/defisit LRA dengan pembiayaan netto masing-masing periode.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
Tahun Sebelumnya	(Rp)	(Rp)
	480.576,00	(3.539.745,00)

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah merupakan koreksi SiLPA tahun lalu yang disajikan di tahun anggaran 2024 yaitu koreksi kas BOS Tahun 2023 sebesar Rp480.576,00.

e. SAL Akhir	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	105.253.576.103,04	68.680.226.250,30

Nilai SAL akhir TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp105.253.576.103,04 dan Rp68.680.226.250,30. SAL akhir TA 2024 sebesar Rp105.253.576.103,04 merupakan selisih antara SAL awal dikurangi dengan penggunaan SiLPA/SiKPA tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah dengan SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

#### 3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

a. Aset Tahun 2024 Tahun 2023
(Rp) (Rp)
38,568,706,399,913.70 36.956.177.428.429,36

Saldo aset Pemko Medan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp38,568,706,399,913.70 dan Rp36.956.177.428.429,36. Saldo aset sebesar Rp38,568,706,399,913.70 tersebut terbagi dalam lima kelompok, yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Property Investasi.

1) Aset Lancar 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 1.419.265.116.165,27 1.476.645.687.955,74

Saldo Aset Lancar Pemko Medan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.419.265.116.165,27 dan Rp1.476.645.687.955,74. Saldo aset lancar Rp1.419.265.116.165,27 tersebut terbagi dalam sebelas jenis, yaitu Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana di BOSP, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana BOK Puskesmas, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan.

a) Kas di Kas Daerah 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 76.412.749.939,66 48.547.162.000,10

Saldo Kas Di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp76.412.749.939,66 dan Rp48.547.162.000,10 merupakan saldo kas milik Pemko Medan yang dikelola oleh BUD Kota Medan Pada PT. Bank Sumut dengan Nomor Rekening AC.100.01.02.019344-0, mutasi tambah dan kurang atas Kas di Kas Daerah tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 46. Mutasi Kas di Kas Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	Nilai
I	Saldo Awal	48.547.162.000,10
1	Pendapatan Daerah	5.800.525.897.082,88
2	Belanja Daerah	5.772.480.309.143,32
3	UYHD yang belum disetor per 31 Desember 2024	180.000.000,00
II	Saldo Akhir (I+1-2-3)	76.412.749.939,66

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.412.749.939,66 berdasarkan sumber dana, terdiri dari:

(1)	DAU yang Ditentukan	Rp	25.320.584.677,00
(2)	DAK Fisik	Rp	11.189.002.601,00
(3)	DAK Non Fisik	Rp	13.454.949.131,00
(4)	Pengembalian BOS, BOP dan BOK pada	Rp	7.256.108.763,00
	RKUD		
(5)	PAD yang tidak ditentukan penggunaannya	Rp	19.192.104.767,66

Rincian Kas di Kas Daerah per sumber dana disajikan pada Lampiran 3a.

Saldo total kas di RKUD Pemko Medan pada PT Bank Sumut per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.412.749.939,66 merupakan saldo rekonsiliasi dengan saldo Rekening Koran 31 Desember 2024 sebesar Rp76.555.681.213,66 Rekonsiliasi dapat dilihat pada **Lampiran 3b**.

b) Kas di BLUD	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	9.223.068.584,16	8.157.069.734,92

Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.223.068.584,16 dan Rp8.157.069.734,92. Saldo kas sebesar Rp9.223.068.584,16 tersebut adalah jumlah sisa kas yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 yang merupakan selisih antara pendapatan dan kas pada bendahara penerimaan dan pengeluaran di Tahun 2024 dengan belanja Tahun 2024 ditambah dengan saldo awal Tahun 2024 kas di BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian Perhitungan Kas di BLUD Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo Awal Kas di BLUD	8.157.069.734,92	3.855.409.985,07
(+) Pendapatan BLUD	85.761.510.774,26	79.745.442.623,30
(-) Belanja BLUD	84.695.511.925,02	75.443.782.873,45
Saldo Akhir Kas di BLUD	9.223.068.584,16	8.157.069.734,92

Saldo kas di BLUD sebesar Rp9.223.068.584,16 terdiri dari:

- (1) Saldo pada rekening koran di Bank Sumut dengan rekening Nomor 10401020000560 sebesar Rp9.164.324.395,81;
- (2) Kas tunai di bendahara pengeluaran sebesar Rp58.744.188,35.

c) Kas Dana Kapitasi	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
pada FKTP	(Rp)	(Rp)
	8.734.858.922,22	11.963.406.673,28

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.734.858.922,22 dan Rp11.963.406.673,28. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 merupakan nilai saldo Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 ditambahkan Pendapatan Dana Kapitasi 2024 dikurangi belanja Dana Kapitasi 2024 dan dikurangi dengan saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 yang tercatat masih merupakan bagian Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada tahun 2023 sebesar Rp3.012.172.973,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48. Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024

Uraian	Kas Dana Kapitasi pada FKTP (Rp)	
Saldo Awal	11.963.406.673,28	
Pendapatan Tahun 2024	93.987.003.471,88	
Belanja TA 2024	(94.203.378.249,94)	
Saldo Kas Dana BOK TA.2023	(3.012.172.973,00)	
Saldo Akhir 31 Desember 2024	8.734.858.922,22	

Rekonsiliasi rekening dana kapitasi JKN dapat dilihat pada Lampiran 4.

# d) Kas Dana BOSP

31 Desember 2024 (Rp) 6.925.556,00 **31 Desember 2023** 

(Rp) 12.587.842,00

Saldo kas di BOSP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.925.556,00 dan Rp12.587.842,00. Saldo kas sebesar Rp6.925.556,00 tersebut merupakan saldo awal kas setelah koreksi, ditambah pendapatan dan dikurangi belanja dana BOSP yang dikeluarkan selama Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 49. Kas di Bantuan Operasional Sekolah per 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Awal	Mu	tasi	Saldo Akhir
Saluo Awai	Tambah	Kurang	Saluo Akilii
12.587.842,00	304.054.450.296,00	304.060.112.582,00	6.925.556,00

#### Rincian mutasi tambah:

(+) Penerimaan Dana BOS Reguler	296.376.469.720,00
(+) Penerimaan Dana BOS Kinerja	7.677.500.000,00
(+) Penerimaan Dana BOS Sekolah Swasta	0,00
(+) Jasa Giro, Biaya Administrasi, dan Pajak	0,00
Jumlah	304.054.450.296.00

#### Rincian mutasi kurang:

(-) Pengeluaran Beban Pegawai dan Barang Jasa	122.075.487.921,00
(-) Pengeluaran Belanja Aset Tetap	0,00
(-) Pengeluaran Dana BOS Kinerja	0,00
(-) Pengeluaran Dana BOS Sekolah Swasta	181.983.261.574,00
(-) Penyetoran Kas BOS ke RKUD	1.363.087,00
Jumlah	304.060.112.582,00

Perhitungan saldo akhir kas BOSP merupakan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kota Medan terhadap BKU dana BOSP Tahun 2024 yang terdiri dari Dana BOS Reguler, Dana Bos Kinerja, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Rincian Sisa Kas BOSP pada sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

e) Kas Dana BOK	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Puskesmas	(Rp)	(Rp)
	10.695.973.101.00	0.00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.695.973.101,00 sedangkan saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 disajikan sebagai bagaian dari saldo kas dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp3.012.172.973,00.

Tabel 50. Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024

Uraian	BOK (Rp)
Saldo Awal	0,00
Pendapatan Tahun 2024	10.593.519.127,00
Belanja TA 2024	(2.909.718.999,00)
Mutasi Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.012.172.973,00
Saldo Akhir 31 Desember 2024	10.695.973.101,00

Rincian Sisa KAS Dana BOK Puskemas pada Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 6.

f) Piutang Pendapatan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 2.443.747.178.187,79 2.074.811.264.578,71

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.443.747.178.187,79 dan Rp2.074.811.264.578,71 terdiri dari:

Tabel 51. Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	2.181.175.795.728,99	2.020.256.315.498,77
Piutang Retribusi Daerah	13.353.184.632,00	11.273.952.897,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	554.870.510,60	3.508.734.843,50
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	19.502.448.516,20	20.014.595.003,44
Piutang Transfer Antar Daerah	229.160.878.800,00	19.757.666.336,00
Piutang Pendapatan	2.443.747.178.187,79	2.074.811.264.578,71

(1) Piutang	Pajak	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Daerah		(Rp)	(Rp)
		2.181.175.795.728.99	2,020,256,315,498,77

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.181.175.795.728,99 dan Rp2.020.256.315.498,77. Piutang pajak daerah sebesar Rp2.181.175.795.728,99 tersebut merupakan piutang pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah, Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang telah diterbitkan, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dilunasi oleh wajib pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pajak Hotel	7.034.032.382,37	9.223.618.313,15
Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.780.866.416,51	12.664.505.114,51
Pajak Hiburan – Tontonan Film	570.192.424,73	677.158.953,73
Pajak Reklame	7.688.042.722,00	5.487.212.247,00
Pajak Parkir	2.246.930.081,00	2.327.679.481,00
Pajak Air Tanah	360.441.988,38	863.357.678,38
PBB - P2	2.145.788.662.146,00	1.989.012.783.711,00
PBJT	7.706.627.568,00	0,00
Jumlah	2.181.175.795.728,99	2.020.256.315.498,77

Rincian piutang pajak daerah di BAPENDA pada Lampiran 7.

Saldo piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.181.175.795.728,99 tersebut termasuk di dalamnya Piutang Pajak Reklame yang dikelola oleh Bapenda sebesar Rp7.688.042.722,00, terdiri dari sebesar Rp1.702.203.368,00 yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sampai dengan Tahun 2013, Rp623.172.658,00 yang sebelumnya dikelola oleh DPMPTSP yang diserahkan ke BAPENDA dan Rp3.161.836.221,00 adalah penambahan piutang di Tahun 2024 yang dikelola oleh BAPENDA, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
I. Yang Dahulu Dikelola Dinas Kebersihan dan		
Pertamanan		
Piutang Tahun 2009	597.866.296,00	597.866.296,00
Piutang Tahun 2010	51.852.912,00	51.852.912,00
Piutang Tahun 2011	244.620.588,00	244.620.588,00
Piutang Tahun 2012	185.922.510,00	185.922.510,00
Piutang Tahun 2013	621.941.062,00	621.941.062,00
Jumlah I	1.702.203.368,00	1.702.203.368,00
II. Yang Dahulu Dikelola DPMPTSP	·	
Piutang Tahun 2014	132.634.722,00	132.634.722,00
Piutang Tahun 2015	152.783.261,00	152.783.261,00
Piutang Tahun 2016	190.104.921,00	190.104.921,00
Piutang Tahun 2017	147.649.754,00	147.649.754,00
Jumlah II	623.172.658,00	623.172.658,00
III. Yang Sekarang Dikelola BAPENDA	·	
Piutang Tahun 2021	106.786.238,00	106.786.238,00
Piutang Tahun 2022	488.545.046,00	488.545.046,00
Piutang Tahun 2023	422.320.832,00	2.566.504.937,00
Piutang Tahun 2024	4.345.014.580,00	0,00
Jumlah III	5.362.666.696,00	3.161.836.221,00
Jumlah I + II + III	7.688.042.722,00	5.487.212.247,00

Rincian piutang pajak reklame pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan d Lampiran 8a s.d. 8i.

<b>(2)</b>	Piutang Retribusi Daerah	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
		(Rp)	(Rp)
		13.353.184.632,00	11.273.952.897,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.353.184.632,00 dan Rp11.273.952.897,00, terdiri dari:

Tabel 54. Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian Piutang Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Pelayanan Kebersihan	4.084.667.990,00	2.885.658.100,00
2.	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	746.057.076,00	0,00
3.	Pemakaian Kekayaan Daerah	8.142.048.663,00	8.388.294.797,00
4.	Perizinan Tertentu	380.410.903,00	0,00
	Jumlah	13.353.184.632,00	11.273.952.897,00

1. Piutang Retribusi	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Pelayanan Kebersihan	(Rp)	(Rp)
	4.084.667.990,00	2.885.658.100,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.084.667.990,00 dan Rp.2.885.658.100,00. Saldo piutang Tahun 2024 sebesar Rp4.088.737.990,00 merupakan piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, untuk piutang yang timbul setelah terbitnya karcis/kupon sampah yang sampai dengan akhir periode Tahun 2024 belum dipertanggungjawabkan oleh pemungut. Dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 55. Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan per 31 Desember 2024

No	URAIAN	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	2.885.658.100,00
4.	Rekening/Karcis Sampah dicetak Tahun 2024	26.219.227.494,00
6.	Pembayaran	25.020.217.604,00
8.	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 (8=3+4+5-6-7)	4.084.667.990,00

Piutang tersebut terdiri dari sisa tunggakan Tahun 2011 s.d. 2024. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 56. Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan Per 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
2011	27.595.000,00	27.595.000,00
2012	202.506.000,00	202.506.000,00
2013	65.960.250,00	65.960.250,00
2014	45.525.500,00	45.525.500,00
2015	10.757.000,00	10.757.000,00
2016	708.002.250,00	708.002.250,00
2017	1.147.491.600,00	1.147.491.600,00
2018	286.207.600,00	286.207.600,00
2019	126.801.950,00	126.801.950,00
2020	41.572.850,00	41.572.850,00
2021	78.241.100,00	82.311.100,00
2022	0,00	0,00
2023	9.920.000,00	21.976.000,00
2024	510.981.390,00	0,00
Pemaparan	13.680.000,00	13.680.000,00
Perumda Pasar	809.425.500,00	105.271.000,00
Total	4.084.667.990,00	2.885.658.100,00

2. Piutang Retribusi	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Parkir Tepi Jalan	(Rp)	(Rp)
Umum	746.057.076,00	0,00

Piutang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum merupakan piutang atas Perjanjian kerjasama Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) dengan sembilan mitra kerjasama dalam pemungutan retribusi parkir pada beberapa ruas jalan di Kota Medan.

Pada per tanggal 31 Desember 2024 terdapat kewajiban mitra kerjasama yang belum dibayar ke Pemko Medan sesuai Perjanjian Kerjasama yang disepakati dengan nilai Rp.746.057.076,00.

3. Piutang Retribusi	<b>31 Desember 2024</b>	31 Desember 2023
Pemakaian	(Rp)	(Rp)
kekayaan Daerah	8.142.048.663,00	8.388.294.797,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan piutang retribusi sewa bangunan milik Pemko Medan pada Dinas PKPCKTR sebesar Rp8.142.048.663,00.

Piutang tersebut ditetapkan berdasarkan surat Kepala Dinas PKPCKTR perihal tunggakan retribusi sewa toko/rumah milik Pemko Medan namun belum ditetapkan SKRD, dengan rincian sebagai berikut:

Tagihan sewa toko dan rumah dinas sejak Tahun 1999 s.d. 2023 yang disajikan dalam laporan keuangan TA. 2023 sebesar Rp8.388.294.797,00. Terdapat pembayaran retribusi sewa bangunan pada Tahun 2024 sebesar Rp246.246.134,00 sehingga sisa tunggakan per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp8.142.048.663,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 57. Piutang Retribusi sewa Bar	ngunan milik Pemerintah Kota Medan

Tabel 57. Plutang Retribusi sewa Bangunan milik Pemerintah Kota Medan				
Tahun	Saldo Awal Piutang	Ketetapan	Pembayaran	Saldo Akhir Piutang
1999	1.740.600,00	-	-	1.740.600,00
2000	2.320.800,00	-	-	2.320.800,00
2001	2.536.800,00	=	-	2.536.800,00
2002	2.536.800,00	-	-	2.536.800,00
2003	5.806.800,00	=	-	5.806.800,00
2004	6.086.400,00	-	-	6.086.400,00
2005	6.345.600,00	-	-	6.345.600,00
2006	6.445.200,00	-	-	6.445.200,00
2007	9.514.800,00	-	-	9.514.800,00
2008	9.779.400,00	-	-	9.779.400,00
2009	10.567.800,00	-	-	10.567.800,00
2010	15.712.200,00	-	5.144.400,00	10.567.800,00
2011	17.407.200,00	-	5.144.400,00	12.262.800,00
2012	19.269.600,00	=	5.144.400,00	14.125.200,00
2013	296.238.918,00	=	19.292.412,00	276.946.506,00
2014	378.168.175,00	=	21.167.448,00	357.000.727,00
2015	555.717.062,00	=	14.067.492,00	541.649.570,00
2016	586.778.700,00	=	14.265.012,00	572.513.688,00
2017	602.207.052,00	-	-	602.207.052,00
2018	712.441.542,00	=	16.222.758,00	696.218.784,00
2019	782.569.668,00	-	10.705.572,00	771.864.096,00
2020	950.712.864,00	-	14.872.656,00	935.840.208,00
2021	993.443.256,00	-	17.208.084,00	976.235.172,00
2022	1.282.470.980,00	-	11.076.540,00	1.271.394.440,00
2023	1.131.476.580,00	-	91.934.960,00	1.039.541.620,00
2024	-	-	-	-
Jumlah	8.388.294.797,00		- 246.246.134,00	8.142.048.663,00

4. Piutang Retribusi	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Perizinan Tertentu	(Rp)	(Rp)
	380.410.903,00	0,00

Piutang Retribusi Perizinan tertentu merupakan Piutang atas izin usaha hotel, salon, hiburan umum, rumah makan/bar dan travel pada dibawah Tahun 2012 yang belum dibayar. Piutang Retribusi Perizinan tertentu Rp.380.410.903,00 pada dibawah Tahun 2012 dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang saat ini menjadi Dinas Pariwisata. Pada Tahun 2013 retribusi atas izin-izin tersebut sudah diberhentikan sesuai dengan Surat Walikota Medan Nomor: 973/2001 tanggal 30 Januari 2013. Adapun rincian Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut.

Tabel 58. Rincian Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2024

No.	Jenis Retribusi	Nilai Piutang
1	Izin Hotel	102.406.283,00
2	Izin Salon Kecantikan	7.114.500,00
3	Izin ODTW	83.552.620,00
4	Izin Rumah Makan, Rest dan BAR	167.447.500,00
5	Izin Travel	19.890.000,00
	Total	380.410.903.00

(3) Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

31 Desember 2024
(Rp)
(Rp)
554.870.510,60

31 Desember 2023
32 (Rp)
3.508.734.843,50

Saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp554.870.510,60 dan Rp3.508.734.843,50. Piutang Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 31 Desember 2024 Rp.554.870.510,60 merupakan Piutang deviden dari Perumda Pasar Kota Medan yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetorkan ke RKUD Pemerintah Kota Medan.

Adapun rincian mutasi atas piutang Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam hal ini Piutang atas Deviden Perumda Pasar Kota Medan ada pada **Lampiran 9.** 

(4) Piutang Lain-lain PAD	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
yang Sah	(Rp)	(Rp)
	19.502.448.516,20	20.014.595.003,44

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp19.502.448.516,20 dan Rp20.014.595.003,44 terdiri dari:

Tabel 59. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.845.635.105,52	0,00
2	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	3.960.330.992,80	0,00
3	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	180.000.000,00	291.748.000,00
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.229.435.141,28	2.587.640.237,44
5	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	89.237.079,60	0,00
6	Piutang Pendapatan BLUD	10.197.810.197,00	17.135.206.766,00
	Jumlah	19.502.448.516,20	20.014.595.003,44

1. Piutang Hasil	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Pemanfaatan BMD	(Rp)	(Rp)
	1.845.635.105,52	0,00

Piutang hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan pada 31 Desember 2024 Rp1.845.635.105,52 merupakan nilai piutang atas tagihan angsuran *Build, Operate, Transfer* (BOT) kepada mitra kerjasama yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 60. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD Tahun 2024

Mitra Kerjasama	USD	Rp
PT. Anugrah Prima	49.535,00	800.584.670,00
PT. Rahmat Mulia	16.358,00	264.377.996,00
PT. Multi Arta Semesta	40.802,96	659.457.439,52
PT. Inti Griya Prima Sakti	7.500,00	121.215.000,00
Jumlah	114.195,96	1.845.635.105,52

Kurs yang digunakan yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.16.162,00 rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 10.** 

2. Piutang Hasil 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kerjasama Daerah (Rp) (Rp) 3.960.330.992,80 0,00

Piutang Hasil Kerjasama Daerah per 31 Desember 2024 Rp.3.960.330.992,80 terdiri dari:

- a. Piutang atas Kontribusi tetap atas pendapatan dari Pasar Tuntungan, Pasar Marelan dan Pasar Peringgan sebesar Rp.3.748.494.741,30; dan
- b. Piutang atas perjanjian kerjasama antara Pemko Medan dan Perumda Pasar untuk pengelolaan Pasar Induk Tuntungan sebesar Rp211.836.251,50. Atas Piutang Hasil Kerjasama Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 61. Rincian Piutang Hasail Kerjasama Daerah 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pembayaran 2024	Per 31 Desember 2024
1	Kontribusi Tetap Perumda.Pasar	2.929.427.978,30	819.066.763,00	0,00	25.109.500,00
2	Pengelolaan Pasar Induk tuntungan	211.836.251,50	0,00	0,00	20.837.500,00
	Jumlah	3.141.264.229,80	819.066.763,00	0,00	3.960.330.992,80

Penjelasan lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran 11.

3. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti (Rp) (Rp)
Kerugian Daerah 180.000.000,00 0,00

Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah merupakan pengembalian UYHD TA 2024 pada Bendahara Pengeluaran Kec. Medan Area yang telah disetorkan seluruhnya ke RKUD Pemko Medan pada tanggal 25 Maret 2025 berdasarkan STS Nomor: 900/02/III/Area/2025.

4. Piutang Pendapatan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Denda Pajak Daerah (Rp) (Rp) 3.229.435.141,28 2.587.640.237,44

Saldo Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.229.435.141,28 dan Rp2.587.640.237,44. Piutang Denda Pajak Daerah sebesar Rp3.229.435.141,28 tersebut merupakan piutang dalam pengelolaan Bapenda, dalam SKP Daerah, SPTPD, dan SKPDKB yang telah diterbitkan, namun s.d. tanggal 31 Desember 2024 belum dilunasi oleh wajib pajak (WP) daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 62. Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pembayaran 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Denda Pajak Hotel	810.084.421,86	411.754.376,84	197.032.591,00	1.024.806.207,70
Denda Pajak Restoran	1.057.433.957,63	99.153.160,00	135.719.859,00	1.020.867.258,63
Denda Pajak Hiburan	85.035.370,45	475.442.762,00	6.577.682,00	553.900.450,45
Denda Pajak Parkir	635.086.487,50	0,00	5.225.263,00	629.861.224,50
Jumlah	2.587.640.237.44	986.350.298.84	344.555.395.00	3.229.435.141.28

Secara akumulatif Piutang Denda Pajak Daerah pada BAPENDA terjadi kenaikan dari Rp2.587.640.237,44 Tahun 2023 menjadi Rp3.229.435.141,28 pada Tahun 2024.

5. Piutang Pendapatan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Denda Retribusi	(Rp)	(Rp)
Daerah	89.237.079,60	0,00

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 Rp.89.237.079,60 merupakan nilai atas denda Piutang Perjanjian kerjasama Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) dengan beberapa mitra kerjasama dalam pemungutan retribusi parkir pada beberapa ruas jalan di Kota Medan.

6. Piutang Pendapatan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
BLUD	(Rp)	(Rp)
	10.197.810.197,00	17.135.206.766,00

Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.10.197.810.197,00 dan Rp.17.135.206.766,00. Piutang Pendapatan BLUD merupakan piutang yang dikelola oleh Dinas Kesehatan/RSUD.Dr.Pirngadi Kota Medan yang terdiri dari:

Tabel 63. Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pembayaran 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Klaim BPJS	13.196.605.754,00	68.985.821.555,00	75.997.004.624,00	6.185.422.685,00
COVID-19	1.152.647.360,00	0,00	0,00	1.152.647.360,00
Klaim Jamkesmas – Kemenkes	2.588.626.018,00	0,00	0,00	2.588.626.018,00
Klaim Farmasi – PT Askes (Persero)	125.706.543,00	0,00	0,00	125.706.543,00
Jasa Raharja	71.621.091,00	259.473.242,00	185.686.742,00	145.407.591,00
Jumlah	17.135.206.766,00	69.245.294.797,00	76.182.691.366,00	10.197.810.197,00

(5) Piutang Transfer Pemerintah	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Daerah Lainnya	(Rp)	(Rp)
	229.160.878.800,00	19.757.666.336,00

Saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp229.160.878.800,00 dan Rp19.757.666.336,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64. Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember	Mut	asi	31 Desember
Uraian	2023 (Rp)	Tambah	Kurang	2024 (Rp)
PKB	3.055.687.198,00	285.805.883.700,00	187.926.155.204,00	100.935.415.694,00
BBNKB	2.261.902.463,00	145.101.861.195,00	94.020.180.815,00	53.343.582.843,00
PBB-KB	5.058.923.768,00	212.106.284.933,00	144.425.592.601,00	72.739.616.100,00
PAP	965.529.866,00	2.710.212.734,00	1.533.478.437,00	2.142.264.163,00
Pajak Rokok	8.415.623.041,00	104.652.331.206,00	113.067.954.247,00	0,00
Jumlah	19.757.666.336,00	750.376.573.768,00	540.973.361.304,00	229.160.878.800,00

Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/97/KPTS/2025 tanggal 22 Januari 2025.

g) Piutang Lainnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp)

980.173.622,00 64.326.850.349,16

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp980.173.622,00 dan Rp64.326.850.349,16, yang terdiri dari:

Tabel 65. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Piutang Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	1.758.686.724,56
2.	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	398.273.622,00	990.520.776,50
3.	Uang Muka	581.900.000,00	61.577.642.848,10
	Jumlah	980.173.622,00	64.326.850.349,16

### 1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang merupakan nilai piutang atas tagihan angsuran BOT kepada mitra kerjasama yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang pada 31 Desember 2023 Rp1.758.686.724,56 dan pada 31 Desember 2024 pencatatannya di catat pada Piutang hasil kerjasama pemanfaatan BMD.

#### 2. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing Rp.398.273.622,00 dan Rp990.520.776,50. Nilai piutang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada 31 Desember 2024 Rp398.273.622,00 merupakan piutang yang terdiri dari:

(a) Saldo piutang bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah sebesar Rp130.377.522,00 merupakan tagihan atas pinjaman yang diberikan kepada Perumda Pasar untuk renovasi Pasar Bakti yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi dengan rincian berikut:

Tabel 66. Piutang Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

Uraian	Piutang (Rp)
Tahun 2003	11.337.120,00
Tahun 2004	11.337.120,00
Tahun 2005	11.337.120,00
Tahun 2006	11.337.120,00
Tahun 2007	11.337.120,00
Penyesuaian atas Laporan Keuangan Perumda Pasar Tahun 2007	17.714.054,00
Tahun 2008	11.337.120,00
Penyesuaian atas Laporan Keuangan Perumda Pasar Tahun 2008	2.834.542,00
Tahun 2009	14.171.482,00
Tahun 2010 (reklasifikasi)	14.171.482,00
Tahun 2011	13.463.242,00
Jumlah	130.377.522,00

Pembayaran atas pinjaman kepada Perumda Pasar senilai Rp130.377.522,00 dilakukan dengan angsuran selama sepuluh tahun dari Tahun 2002 s.d. 2011 namun sampai berakhirnya TA 2024 tidak pernah ada pembayaran atas angsuran pinjaman tersebut.

(b) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 Rp.267.896.100,00. Merupakan piutang yang diberikan kepada pedagang IPP Pasar Bhakti. Nilai piutang sebesar Rp267.896.100,00 merupakan sisa tagihan atas pinjaman yang diberikan kepada Perumda Pasar untuk biaya fisik renovasi kios yang dibebankan kepada pedagang senilai Rp366.912.000,00 dan telah dibayar pada Tahun 2013 sebesar Rp71.548.300,00 dan pada Tahun 2016 sebesar Rp27.467.100,00 serta terdapat koreksi kurang di Tahun 2016 atas kelebihan penyajian nilai piutang sebesar Rp500,00 sehingga nilai piutang akhir per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp267.896.100,00.

#### 3. Uang Muka

Piutang uang muka 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp581.900.000,00 dan Rp61.577.642.848,10. Nilai piutang uang muka 31 Desember 2024 Rp581.900.000,00 merupakan saldo piutang uang muka operasional pada Dinas Kesehatan/RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Uang Muka Operasional pada Dinas Kesehatan Tahun 2024

No.	Uraian	Sisa Uang Muka (Rp)
1	Diklat:	
	a.KKS/Remedial	403.200.000,00
	b.PelatihanHD	120.000.000,00
2	SewaTempat:	
	a.Firdalriani	4.000.000,00
	b.Yunan	13.000.000,00
	c.Hatta	1.500.000,00
	d.KantinLantai2	3.000.000,00
	e.PT.Indosat,Tbk/BiayaListrik	37.200.000,00
	Jumlah	581.900.000,00

## h) Penyisihan Piutang

31 Desember 2024 (Rp) (1.249.389.076.572,66) 31 Desember 2023 (Rp) (1.006.632.172.476,78)

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(1.249.389.076.572,66) dan Rp(1.006.632.172.476,78), terdiri dari:

Tabel 68. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.237.298.647.645,61)	(996.564.128.558,80)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(6.885.070.106,45)	(5.592.983.010,00)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(5.180.262.820,60)	(4.162.384.907,98)
Penyisihan Piutang Lainnya – Uang Muka	(25.096.000,00)	(20.928.000,00)
Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	(291.748.000,00)
Sisa	(1.249.389.076.572,66)	(1.006.632.172.476,78)

Rincian perhitungan penyisihan piutang pada Lampiran 12a s.d. 12e.

i) Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 722.333.337,00 52.695.362.852,95

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp33.304.348.347,95 dan Rp52.695.362.852,95. Jumlah tersebut merupakan belanja sewa tempat yang dilakukan oleh SKPD untuk mengakui jumlah yang belum menjadi beban sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp43.333.333,33;
- (2) Sekretariat Daerah Bagian Umum sebesar Rp364.833.337,00;
- (3) Bapenda sebesar Rp264.166.666,67;
- (4) Kecamatan Medan Area sebesar Rp50.000.000,00.

Dengan rincian pada Lampiran 13.

j) Persediaan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	118.130.931.488.10	222,764,156,401,40

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp118.130.931.488,10 dan Rp222.764.156.401,40. Jumlah tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemko Medan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2024 yang dikelola oleh penyimpan barang pada masing-masing SKPD dengan rincian pada Lampiran 14a. Diluar nilai persediaan tersebut terdapat nilai persediaan yang kadaluarsa Pada Dinas Lingkungan Hidup Rp.183.000.000,00 dan pada Dinas Kesehatan Rp.2.405.641.497,90 dalam proses penghapusan dengan rincian pada Lampiran 14b.

2) Investasi Jangka Panjang	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	342.972.182.106,53	349.617.364.759,53

Investasi jangka panjang pada Pemko Medan merupakan investasi permanen dan tidak terdapat invetasi non permanen per 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

a) Penyertaan Modal	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	342.972.182.106,53	349.617.364.759,53

Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp342.972.182.106,53 dan Rp349.617.364.759,53. Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal pada perusahaan daerah, dengan rincan sebagai berikut:

Tabel 69. Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 dan 2023

BUMD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Perumda Pasar	108.824.780.011,00	109.316.536.068,00
Perumda Pembangunan	142.716.645.515,00	147.935.382.234,00
Perumda Rumah Potong Hewan	17.761.299,00	952.451.176,00
PT Bank Sumut	76.412.995.281,53	76.412.995.281,53
PT Kawasan Industri Medan (KIM)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Jumlah	342.972.182.106,53	349.617.364.759,53

(1) Investasi Permanen 31 Desember 2024 31 Desember 2023 pada Perumda Pasar (Rp) (Rp) 108.824.780.011,00 109.316.536.068,00

Saldo penyertaan modal pada Perumda Pasar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp108.824.780.011,00 dan 109.316.536.068,00. Penyertaan modal tersebut berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 25 Juni 2001. Seluruh modal Perumda Pasar 100% dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan. Saldo penyertaan modal pada Perumda Pasar per 31 Desember 2024 sebesar Rp108.824.780.011,00 dinilai menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Pasar Tahun 2024 (audited), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70. Penyertaan Modal pada Perumda Pasar per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Modal Disetor	37.355.771.420,00	37.355.771.420,00
Modal Donasi	72.018.027.656,00	72.018.027.656,00
Tambahan Modal Donasi	0,00	0,00
Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	(1.637.798.041,00)	(1.077.132.870,00)
Pembagian Deviden	0,00	0,00
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Pembagian Jasa Produksi	0,00	0,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	600.026.476,00	661.117.362,00
CSR Bank Sumut	488.752.500,00	358.752.500,00
Jumlah	108.824.780.011,00	109.316.536.068,00

 (2) Investasi Permanen pada Perumda Pembangunan
 31 Desember 2024 (Rp)
 31 Desember 2023 (Rp)

 142.716.645.515,00
 147.935.382.234,00

Saldo penyertaan modal pada Perumda Pembangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp142.716.645.515,00 dan Rp147.935.382.234,00. Penyertaan modal tersebut berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 25 Juni 2001. Seluruh modal Perumda Pembangunan 100% dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan. Saldo penyertaan modal pada Perumda Pembangunan sebesar Rp142.716.645.515,00 tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas berdasarkan LK Perumda Pembangunan Tahun 2024 (audited), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71. Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan

per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023(Rp)	
Modal Disetor	192.293.993.457,00	192.293.993.457,00	
Cadangan Dana	5.341.247,00	5.341.247,00	
Donasi	2.101.593.385,00	2.086.093.385,00	
Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	(46.450.045.855,00)	(40.637.613.313,00)	
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	(280.402.258,00)	(680.054.889,00)	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.953.834.461,00)	(5.132.377.653,00)	
Jumlah	142.716.645.515,00	147.935.382.234,00	

Terdapat perbedaan pencatatan nilai Penyertaan Modal Pemko Medan kepada Perumda Pembangunan. Pada LK Perumda Pembangunan tercatat Rp187.924.708.383,00, sedangkan pada LK Pemko Medan tercatat Rp Rp192.293.993.457,00, dengan nilai perbedaan sebesar Rp4.369.285.074,00. Nilai perbedaan tersebut merupakan aset fasilitas umum (jalan raya) Medan Zoo yang masih merupakan bagian dari nilai Penyertaan Modal di Perumda Pembangunan, sedangkan pada LK Perumda Pembangunan nilai perbedaan tersebut dikurangkan atas dasar surat PD. Pembangunan kepada Walikota Medan c/q Sekretaris Daerah kota Medan selaku Ketua Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Medan No. 1256/024/PDPKM/IX/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Mohon Pemisahan Aset berupa jalan masuk sepanjang kurang lebih 2 km yang merupakan fasilitas umum menuju Kebun Binatang Medan.

<b>(3)</b>	Investasi Permanen pada	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	Perumda Rumah Potong	(Rp)	(Rp)
	Hewan	17.761.299,00	952.451.176,00

Saldo penyertaan modal pada Perumda Rumah Potong Hewan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp17.761.299,00 dan Rp952.451.176,00. Penyertaan modal tersebut berdasarkan Perda 10 Tahun 2001 tanggal 25 Juni 2001. Seluruh modal Perumda Rumah Potong Hewan 100% dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan. Saldo penyertaan modal sebesar Rp17.761.299,00 tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Rumah Potong Hewan Tahun 2024 (*audited*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72. Penyertaan Modal pada Perumda Rumah Potong Hewan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Modal Disetor	13.188.237.062,00	13.188.237.062,00
Hibah	37.323.177,00	37.323.177,00
Cadangan Bertujuan	275.653.551,00	275.653.551,00
Cadangan Dana Pensiun	(538.345.443,00)	(538.345.443,00)
Cadangan Dana Pendidikan/Sosial	42.185.894,00	42.185.894,00
Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	(12.052.603.065,00)	(11.142.481.136,00)
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	(37.721.815,00)	0,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(896.968.062,00)	(910.121.929,00)
Jumlah	17.761.299,00	952.451.176,00

(4) Investasi Permanen pada PT. Bank Sumut Sumut (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 76.412.995.281,53

Saldo penyertaan modal pada PT. Bank Sumut per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp76.412.995.281,53 dan Rp76.412.995.281,53. Penyertaan modal tersebut merupakan nilai yang dihitung menggunakan metode harga perolehan. Jumlah saham atas penyertaan modal pada PT. Bank Sumut Tahun 2024 sebanyak 272.178.360 lembar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp68.044.590.000,00. Perbedaan saldo Penyertaan Modal dengan nominalnya merupakan Premi Saham senilai Rp8.368.405.281,53. Rincian Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut lihat **Lampiran 15.** 

(5) Investasi Permanen pada 31 Desember 2024 31 Desember 2023 PT Kawasan Industri Medan (Rp) (Rp) (Rp) 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

Saldo penyertaan modal pada PT. Kawasan Industri Medan (KIM) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.000.000.000,00. Saldo penyertaan tersebut dinilai dengan metode harga perolehan. PT. KIM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nilai penyertaan modal pada PT. KIM disajikan sebesar 15% atau senilai Rp15.000.000.000,00 dalam jumlah sebanyak 15.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar saham berdasarkan akte notaris Titiek Irawaty S, SH Nomor 20 tanggal 13 Maret 2009 dan Laporan Keuangan PT. KIM TA 2010 (*audited*) serta perubahan akta Nomor 46 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat di hadapan notaris Titiek Irawaty S, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 12 Juni 2014.

3) Aset Tetap 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 35.052.593.377.330,32 34.383.396.590.200,79

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp35.052.593.377.330,32 dan Rp34.383.396.590.200,79 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 73. Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

Urajan	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
Uraian	(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Tanah	27.872.998.527.222,62	154.708.635.707,00	679.810.884.116,64	27.347.896.278.812,98
Peralatan dan Mesin	2.478.839.492.954,26	205.470.613.828,76	64.286.686.625,10	2.620.023.420.157,92
Gedung dan Bangunan	2.271.471.270.233,69	1.225.771.826.263,17	1.094.007.950.958,99	2.403.235.145.537,87
Jalan Irigasi Jaringan	7.758.593.152.697,60	596.873.206.100,74	401.793.142.888,01	7.953.673.215.910,33
Aset Tetap Lainnya	88.432.954.407,91	47.417.929.050,16	19.638.758.045,71	116.212.125.412,36
Konstruksi Dalam Pengerjaan	487.593.247.783,52	907.443.043.254,40	135.535.067.474,50	1.259.501.223.563,42
Akumulasi Penyusutan	(6.574.532.055.098,81)	(301.275.290.318,67)	(227.859.313.352,92)	(6.647.948.032.064,56)
Jumlah	34.383.396.590.200,79	2.836.409.963.885,56	2.167.213.176.756,03	35.052.593.377.330,32

a) Tanah 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 27.347.896.278.812,98 27.872.998.527.222,62

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp27.347.896.278.812,98 dan Rp27.872.998.527.222,62. Nilai tanah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai dan Hak Pengelolaan (HPL) per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 2.121 bidang tanah. Sertifikat Tanah disimpan di Bidang Aset pada BKAD. Tanah milik Pemko Medan yang sedang dalam pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 101 persil. Rincian pada **Lampiran 16**. Selain hal tersebut di atas, terdapat 8 bidang tanah minimal seluas 65.097 m² yang sedang dalam sengketa baik dengan pihak ketiga maupun dengan sekelompok masyarakat. Rincian pada **Lampiran 17**.

Selain itu, atas saldo Tanah sebesar Rp27.347.896.278.812,98 tersebut, diantaranya berupa satu persil tanah yang tercatat pada BKAD dengan status Hak Pengguna Lahan (HPL) Nomor I yang berlokasi di Kelurahan Petisah Tengah seluas 393.575 m² sebesar Rp4.114.826.625.000,00. Tanah tersebut merupakan tanah yang digunakan sebagai:

- a. Tanah untuk operasional Pemerintahan Kota Medan yaitu tanah untuk gedung Kantor Lurah Petisah Tengah, Disduk Capil, Perpustakaan Kota Medan, Kantor Camat Medan Petisah, Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, UPT Puskesmas Bestari, Dinas Kesehatan Kota Medan, Gedung Serbaguna PKK, dan Kantor Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Kota Medan;
- Tanah untuk operasional pemerintah provinsi dan instansi vertikal yaitu tanah untuk gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Utara, Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Sektor Medan Baru, Mess Penerbangan Medan TNI Angkatan Udara;
- c. Tanah untuk disewakan kepada pihak ketiga;
- d. Tanah untuk Fasilitas Umum dan Sosial yaitu tanah untuk gedung keagamaan seperti gereja, vihara, masjid, dan;
- e. Tanah untuk gedung pasar Petisah yang dikelola oleh Perumda Pasar; dan
- f. Tanah di bawah konstruksi jalan sebanyak 29 ruas jalan.

Atas penggunaan tanah tersebut, Pemko medan akan melakukan reklasifikasi saldo tanah ke dalam Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Properti Investasi. Namun hal tersebut belum dapat dilakukan karena Pemko Medan belum dapat menyajikan nilai tanah berdasarkan penggunaan karena belum memiliki data ukuran luas secara akurat. Atas hal tersebut, Pemko Medan sedang melakukan inventarisasi dan pengukuran di lapangan terkait ukuran luas masing-masing peruntukan tanah. Saldo Tanah sebagai berikut:

Tabel 74. Rincian Tanah per 31 Desember 2024

Objek BMD	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	
Tanah Persil	7.380.778.334.691,85	
Tanah Non Persil	257.110.867.923,62	
Lapangan	19.710.007.076.197,51	
Jumlah	27.347.896.278.812,98	

## Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	27.872.998.527.222,62
Komponen Penambah:		
Belanja Modal TA 2024	Rp	39.241.989.901,00
Hibah	Rp	115.287.776.206,00
Koreksi selama Tahun 2024	Rp	178.869.600,00
Total Komponen Penambah	Rp	154.708.635.707,00
Komponen Pengurang:		
Reklasifikasi ke Properti Investasi dan Aset Lainnya	Rp	633.433.321.987,00
Mutasi Ke Aset Lain	Rp	46.377.562.129,64
Total Komponen Pengurang	Rp	679.810.884.116,64
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	27.347.896.278.812,98

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan pada Lampiran 18.

b) Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 2.620.023.420.157,92 2.478.839.492.954,26

Nilai Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.620.023.420.157,92 dan Rp2.478.839.492.954,26 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	2.478.839.492.954,26
Komponen Penambah:		
Belanja Modal TA 2024	Rp	160.535.564.193,00
Utang TA 2024	Rp	4.986.063.138,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa TA 2024	Rp	10.672.425.872,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	20.207.751.813,76
Hibah	Rp	2.445.761.640,00
Koreksi selama TA 2024	Rp	6.623.047.172,00
Total Komponen Penambah	Rp	205.470.613.828,76
Komponen Pengurang:		
Pembayaran Utang TA 2023	Rp	14.209.171.250,00
Koreksi selama TA 2024	Rp	718,842,933.00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	139.673.000,00
Hibah	Rp	299.847.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	2.673.365.349,10
Penghapusan	Rp	1.091.809.794,00
Ekstrakomptable	Rp	45.153.977.299,00
Total Komponen Pengurang	Rp	64.286.686.625,10
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	2.620.023.420.157,92

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan pada Lampiran 19.

c) Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 2.403.235.145.537,87 2.271.471.270.233,69

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.403.235.145.537,87 dan Rp2.271.471.270.233,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

Objek BMD	Saldo per 2024 (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.298.277.224.850,14
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	58.894.910.148,31
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	22.480.573.609,56
Bangunan Menara Perambuan	1.787.127.800,00
Tugu/Tanda Batas	21.795.309.129,86
JUMLAH	2.403.235.145.537.87

Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	2.271.471.270.233,69
Komponen Penambah:	-	
Belanja Modal TA 2024	Rp	856.812.504.048,00
Utang TA 2024	Rp	173.622.890.988,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa TA 2024	Rp	29.338.713.802,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	116.505.069.353,00
Koreksi selama TA 2024	Rp	2.142.769.050,00
Hibah	Rp	18.623.307.236,17
Kapitalisasi dari Pengeluaran Setelah Perolehan Awal	Rp	28.726.571.786,00
Total Komponen Penambah	Rp	1.225.771.826.263,17
Komponen Pengurang:		
Pembayaran Utang TA 2023	Rp	95.451.599.086,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	38.109.166.709,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	760.795.917.816,00
Mutasi ke Aset Lainnya	Rp	179.851.640.033,19
Koreksi selama TA 2024	Rp	19.753.782.154,80
Ekstrakomptabel	Rp	45.845.160,00
Total Komponen Pengurang	Rp	1.094.007.950.958,99
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	2.403.235.145.537,87

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan pada Lampiran 20.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	7 953 673 215 910 33	7 758 593 152 697 60

Nilai Jalan, Irigasi, Dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.953.673.215.910,33 dan Rp7.758.593.152.697,60 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	7.758.593.152.697,60
Komponen Penambah:		
Belanja Modal TA 2024	Rp	423.161.734.129,30
Utang TA 2024	Rp	56.768.541.282,45
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa TA 2024	Rp	55.926.395.173,86
Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	44.822.849.005,00
Hibah	Rp	4.238.853.325,94
Kapitalisasi Pengeluaran Setelah Perolehan Awal	Rp	10.833.225.184,19
Koreksi selama TA 2024	Rp	1.121.608.000,00
Total Komponen Penambah	Rp	596.873.206.100,74
Komponen Pengurang:		
Ekstrakomptabel	Rp	1.121.608.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	1.121.608.000,00
Pembayaran Utang TA 2023	Rp	163.586.064.767,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	140.129.154.610,45
Koreksi selama TA 2024	Rp	1.381.049.462,86
Hibah	Rp	94.453.658.047,70
Total Komponen Pengurang	Rp	401.793.142.888,01
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	7.953.673.215.910,33

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan pada Lampiran 21.

e) Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 116.212.125.412,36 88.432.954.407,91

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp116.212.125.412,36 dan Rp88.432.954.407,91 Nilai tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	88.432.954.407,91
Komponen Penambah:		
Belanja Modal TA 2024	Rp	8.300.145.086,00
Utang TA 2024	Rp	149.628.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa TA 2024	Rp	29.628.357.899,95
Hibah	Rp	93.205.000,00
Koreksi selama TA 2024	Rp	9.246.593.064,21
Total Komponen Penambah	Rp	47.417.929.050,16
Komponen Pengurang:		
Ekstrakomptabel	Rp	748.185.240,00
Reklas Antar Aset Tetap	Rp	1.387.406.709,76
Pembayaran Utang TA 2023	Rp	2.364.796.846,00
Penghapusan	Rp	0,00
Ekstrakomptable	Rp	15.138.369.249,95
Total Komponen Pengurang	Rp	19.638.758.045,71
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	116.212.125.412,36

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan pada Lampiran 22.

f) Konstruksi Dalam	Pengerjaan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
		(Rp)	(Rp)
		1.259.501.223.563,42	487.593.247.783,52

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.259.501.223.563,42 dan Rp487.593.247.783,52 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	487.593.247.783,52
Komponen Penambah:		
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa TA 2024	Rp	32.582.015.010,95
Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	874.861.028.243,45
Total Komponen Penambah	Rp	907.443.043.254,40
Komponen Pengurang:		
Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	133.149.582.009,00
Koreksi	Rp	2.385.485.465,50
Total Komponen Pengurang	Rp	135.535.067.474,50
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	1.259.501.223.563,42

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan pada Lampiran 23.

g) Akumulasi Penyusutan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	(6.647.948.032.064,56)	(6.574.532.055.098,81)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.647.948.032.064,56 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.574.532.055.098,81 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76. Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo Awal 31 desember 2023	Koreksi TA 2024	Beban Penyusutan TA 2024	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	1.908.191.375.978,49	3.533.296.119,11	107.211.006.159,67	2.018.935.678.257,27
Gedung dan Bangunan	561.938.012.946,02	-113.392.384.867,19	23.506.351.717,91	472.051.979.796,74
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.104.402.666.174,30	-114.466.928.485,73	153.690.132.113,87	4.143.625.869.802,44
Aset Tetap Lainnya	0,00	10.950.132.713,21	2.384.371.494,90	13.334.504.208,11
Total	6.574.532.055.098,81	-213.375.884.520,60	286.791.861.486,35	6.647.948.032.064,56

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan pada Lampiran 24a s.d 24d.

4) Aset Lainnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 758.681.922.284,10 746.517.785.513,30

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp758.681.922.284,30 dan Rp746.517.785.513,30, terdiri dari:

Tabel 77. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	19.071.085.975,82	10.142.112.094,88
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	221.435.725.853,83	338.550.426.659,52
Aset Tidak Berwujud	15.675.315.515,78	15.610.315.515,78
Aset Lain-lain	600.534.282.965,46	336.069.483.000,53
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.980.151.249,39)	(10.259.232.473,62)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(88.640.676.777,40)	(10.404.898.283,79)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	1.586.340.000,00	66.809.579.000,00
Jumlah	758.681.922.284,10	746.517.785.513,30

a) Tagihan Jangka Panjang 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) Rp19.071.085.975,82 10.142.112.094,88

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp19.071.085.975,82 dan Rp10.142.112.094,88 merupakan nilai dari:

1. Royalti yang belum jatuh tempo atas perjanjian kerjasama BOT antara Pemko Medan dengan pihak ketiga/swasta dalam pengelolaan aset tanah yang terdiri dari :

Tabel 78. Royalti Kerjasama BOT per 31 Desember 2024 dan 2023

Pihak Ketiga	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
Fillak Ketiga	USD	Rp	(Rp)	
PT Anugrah Prima	198.140,00	3.202.338.680,00	3.818.157.800,00	
PT Multi Arta Semesta	306.022,22	4.945.931.119,64	5.346.656.974,88	
PT Inti Griya Prima Sakti	15.000,00	242.430.000,00	346.860.000,00	
PT Rahmad Mulia	32.716,00	528.755.992,00	630.437.320,00	
Jumlah	551.878,22	8.919.455.791,64	10.142.112.094,88	

Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.162,00. Rincian pada **Lampiran 25.a – 25.d.** 

- 2. Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) yang terdiri dari:
  - a. TP berupa ketekoran Kas JKN pada Bendahara Puskesmas Glugur Darat pada TA 2019 senilai Rp2.552.596.786,00.

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kota Medan TA 2019, nilai kerugian senilai Rp2.789.533.186,00 dan pada TA 2020 telah dibayar senilai Rp236.936.400,00, sehingga sisa ketekoran kas sebesar Rp2.552.596.786,00 (Rp2.789.533.186,00 - Rp236.936.400,00). Bendahara tersebut sedang menjalani proses hukum di Kejaksaan Negeri Medan atas kasus kerugian yang dilakukan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor 16/L.2.10/Fd.2/02/2021 dan sudah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-113/L.2.10/Fd.2/05/2021, dan telah dilakukan penahanan sesuai dengan Keputusan Pengeadilan Negeri No 74/Pid.sus-TPK/2021/PN.Mdn.

- b. TGR atas pekerjaan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sebesar Rp2.697.325.165,00 atas pekerjaan yang mengalami putus kontrak dan realisasi keuangan melebihi realisasi fisik pekerjaan, dengan rincian pada **Lampiran 26**.
- c. TGR atas pekerjaan pada Dinas SDABMBK sebesar Rp303.197.698,10 merupakan uang muka pekerjaan pada tahun 2016, dengan rincian:

Tabel 79. Rincian Uang Muka Barang dan Jasa 2024

No.	Kegiatan	Pengembalian (Rp)	Sudah Dibayar (Rp)	Belum Dibayar (Rp)
1.	Kekurangan volume pekerjaan (LHP BPK) kegiatan jalan Tahun 2016	151.432.303,70	0,00	151.432.303,70
2.	Kekurangan volume pekerjaan (LHP BPK) kegiatan gedung pendidikan Tahun 2016	151.765.394,40	0,00	151.765.394,40
	Total			303.197.698,10

d. TGR sebesar Rp291.748.000,00 merupakan ketekoran kas atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) TA 2011, 2012, 2013, dan 2014 pada para juru pungut/mandor yang tidak disetorkan, dengan rincian:

Tabel 80. Rincian TGR DLH per 31 Desember 2024 dan 2023

No. Tahun	Per	Penambahan	Pembayaran	Per	
140.	ranun	31 Desember 2023	2024	2024	31 Desember 2024
1	2011	25.109.500,00	0,00	0,00	25.109.500,00
2	2012	20.837.500,00	0,00	0,00	20.837.500,00
3	2013	148.303.000,00	0,00	0,00	148.303.000,00
4	2014	97.498.000,00	0,00	0,00	97.498.000,00
	Jumlah	291.748.000.00	0.00	0.00	291.748.000.00

e. TGR sebesar Rp4.306.762.535,08 merupakan penerimaan/pengembalian atas kekurangan retribusi dan kelebihan pembayaran belanja pada TA 2024 berdasarkan temuan BPK RI, yang telah disetorkan ke kas daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81. Rincian Piutang SKTJM per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024
1	Retribusi Daerah	227.215.400,00
2	Belanja Pegawai	152.662.687,80
3	Belanja Barang dan Jasa	2.420.778.255,76
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.012.854,79
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.382.093.336.73
	Jumlah	4.306.762.535,08

b) Kemitraan Dengan Pihak 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Ketiga (Rp) (Rp) 221.435.725.853,83 338.550.426.659,52

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp221.435.725.853,83 dan Rp338.550.426.659,52.

Tabel 82. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	Pihak Ketiga	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dinas PKPCKTR	Para Penyewa	87.254.881.377,19	0,00
BKAD	Para Penyewa	134.180.844.476,64	0,00
	Jumlah	221.435.725.853,83	338.550.426.659,52

- (1) Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp87.254.881.377,19 pada Dinas PKPCKTR merupakan Nilai Gedung Bangunan Rusunawa Kayu Putih yang terletak di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli dan Rusunawa Seruai yang terletak di Jalan Seruai, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan. Sewa tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada BKAD sebesar Rp134.180.844.476,64 terdiri dari:
  - a. Nilai Tanah yang tercatat pada BKAD sebesar Rp23.353.354.000,00 seluas 63.419 m² yang terletak di Jalan Seruai Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, di aset tanah tersebut dibangun Rusunawa Seruai;
  - b. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp22.311.504.129,64 merupakan Tanah seluas 83.000 m² yang terletak di Jalan Medan Pancur Batu, Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan. Tanah tersebut dibangun gedung Pasar Induk Tuntungan yang dikerjasamakan dengan Perumda Pasar dengan Perjanjian Nomor 511.2/1532 dan Nomor 511.2/0590/PDPKM/2020 tanggal 17 Februari 2020. Jangka waktu perjanjian selama lima tahun, dan/atau sampai dengan diundangkan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyertaan Modal Pasar Induk Tuntungan.

Selain itu, nilai tersebut juga merupakan nilai perolehan Tanah seluas 14.351 m² yang terletak Jalan Marelan Raya Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan dan dibangun gedung Pasar Medan Marelan yang dikerjasamakan dengan Perumda Pasar Kota Medan dengan Perjanjian Nomor 511.2/0883/PERUMDAKPM/2023 dan Nomor 500.2.3.12/1018 tanggal 01 Maret 2023 dengan jangka waktu lima tahun, dan/atau sampai dengan diundangkan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyertaan Modal Pasar Medan Marelan;

c. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp88.515.986.347,00 merupakan nilai bangunan Pasar Induk Tuntungan yang terletak di Jalan Medan Pancur Batu, Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan.

c) Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 15.675.315.515,78 15.610.315.515,78

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.675.315.515,78 dan Rp15.610.315.515,78, rincian sebagai berikut.

Tabel 83. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024

SKPD	Nilai Buku (Rp)
Disdikbud	9.794.486.144,97
Dinas Kesehatan (Dinkes)	555.061.920,00
Dinas SDABMBK	296.980.000,00
Dinas PKPCKTR	1.226.571.500,00
DLH	119.072.000,00
Dishub	1.260.346.582,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	409.792.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	194.984.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.367.500,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	196.575.000,00
Dinas Pariwisata	267.786.928,00
Sekretariat Daerah (Setda)	916.014.260,00
Sekretariat DPRD	159.720.000,00
Bapenda	56.878.476,15
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93.278.704,66
Inspektorat	101.400.000,00
Jumlah	15.675.315.515,78

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan pada Lampiran 27.

d) Aset Lain-lain 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 600.534.282.965,46 336.069.483.000,53

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp600.534.282.965,46 dan Rp336.069.483.000,53. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp600.534.282.965,46 tersebut terdiri dari:

(1) Barang Milik Daerah (BMD) sebesar Rp488.122.932.348,97, terdiri dari :

Jumlah	Rp	488.122.932.348.97
BMD yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp	24.574.186.247,00
BMD dalam Penguasaan Pihak Lain	Rp	60.970.000,00
BMD yang akan Dihapus	Rp	8.524.017.515,14
BMD Berupa Pekerjaan Rehabilitasi yang Belum Diserahterimakan	Rp	42.601.039.559,46
BMD yang Masih Ditelusuri	Rp	2.007.196.602,51
BMD Pencatatan Ganda	Rp	848.825.125,00
BMD yang akan Dihibahkan	Rp	311.624.745.466,06
BMD Kondisi Rusak Berat	Rp	97.881.951.833,80

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan pada Lampiran 28.

- (2) Uang Titipan (Konsinyasi) pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI dan Perikanan yang masih tercatat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp706.103.999,74;
- (3) Tunggakan angsuran pokok dan bunga Dana Bergulir sebesar Rp1.345.342.192,75 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- (4) Kas BOS SMA dan SMK yang telah diserahterimakan kepada Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.128.796.153,00, yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Sampai saat ini, hal tersebut belum dihapus karena Disdikbud belum dapat menunjukkan Berita Acara;
- (5) Piutang Pendapatan Lainnya Dana BOS SMA dan SMK yang telah diserahterimakan ke Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp571.900.000,00 yang tercatat pada Disdikbud dan sampai saat ini hal tersebut belum;

(6) Piutang PBB-P2 pada Bapenda yang sampai saat ini belum dihapuskan sebesar Rp108.659.208.271,00;

e) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp) (Rp) (Rp) (10.980.151.249,39) (10.259.232.473,62)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp10.980.151.249,39) dan (10.259.232.473,62). Saldo tersebut adalah Nilai Akumulasi Penyusutan dari Aset Tak Berwujud dari SKPD sebagai berikut:

Tabel 84. Rincian Akumulasi Amostisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Awal	Koreksi Amortisasi 2024	Beban Amortisasi 2024	Akm. Amortisasi s.d 31 Desember 2024
Akumulasi Amortisasi	10.259.232.473,62	0,02	720.918.775,79	10.980.151.249,39

f) Akumulasi Penyusutan Aset 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Lainnya (Rp) (Rp) (Rp) (88.640.676.777,40) (10.404.898.283,79)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(88.640.676.777,40) dan Rp(10.404.898.283,79). Saldo tersebut adalah Nilai Akumulasi Penyusutan dari Aset lainnya dari SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024

No	Akumulasi Penyusutan atas	Saldo 31 Desember 2024
1	Peralatan & Mesin	12.347.740.321,73
2	Gedung & Bangunan	50.403.903.161,26
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.889.033.294,41
	TOTAL	88.640.676.777,40

g) Dana Transfer TDF 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 1.586.340.000,00 66.809.579.000,00

Saldo Dana Transfer TDF per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.586.340.000,00 dan Rp66.809.579.000,00. Saldo tersebut merupakan saldo pokok atas Dana Transfer TDF. Saldo Dana Transfer TDF per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.586.340.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86. Dana TDF per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	DBH PBB	591.333.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	600.938.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	197.911.000,00
4	DBH SDA Minyak Bumi	2.000,00
5	DBH Pengusahaan Panas Bumi	6.012.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi	1.000,00
7	DBH SDA Pertambangan Umum	180.945.000,00
8	DBH SDA Kehutanan	9.198.000,00
	Saldo per 31 Desember 2023	1.586.340.000,00

# 5) Properti Investasi 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 995.193.802.027,48 0,00

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dengan tujuan administratif. Properti Investasi juga tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai properti investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp995.193.802.027,48 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 87. Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Properti Investasi - Tanah	971.983.748.646,52	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	32.363.159.976,60	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(9.153.106.595,64)	0,00
Jumlah	995.193.802.027,48	0,00

a) Properti Investasi Tanah	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	971.983.748.646.52	0.00

Properti Investasi berupa tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp971.983.748.646,52 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88. Rincian Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024

No.	Nama SKPD	SaldoAwal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas PKPCKTR	0,00	37.615.612.500,00	0,00	37.615.612.500,00
2	BKAD	0,00	934.368.136.146,52	0,00	934.368.136.146,52
	Total		971.983.748.646,52	0,00	971.983.748.646,52

Rincian pada Lampiran 29.

b) Prop	erti Investasi Gedung dan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Ban	gunan	(Rp)	(Rp)
		32.363.159.976.60	0.00

Properti Investasi berupa Gedung dan Bangunan yang dikuasai oleh Pemko Medan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp32.363.159.976,60 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 89. Rincian Property Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

No.	Nama SKPD	SaldoAwal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas PKPCKTR	0,00	5.601.869.162,60	0,00	5.601.869.162,60
2	BKAD	0,00	46.602.970.752,00	19.841.679.938,00	26.761.290.814,00
	Total		52.204.839.914.60	0.00	32.363.159.976.60

Rincian pada Lampiran 30.

c)	Akumulasi Penyusutan Properti	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	Investasi	(Rp)	(Rp)
		(9.153.106.595,64)	0,00

Akumulasi penyusutan Properti Investasi berupa Gedung dan Bangunan yang dikuasai oleh Pemko Medan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp(9.153.106.595,64) dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90. Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024

SKPD	Saldo per 31 Desember 202	
Dinas PKPCKTR	1.754.347.581,67	
BKAD	7.398.759.013,97	
JUMLAH	9.153.106.595,64	

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan pada Lampiran 31.

b. Kewajiban

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

386.187.805.402,55

Tahun 2023

(Rp)

439.153.061.605,15

1) Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(Rp)

386.187.805.402,55

439.153.061.605,15

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri atas:

Tabel 91. Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	122.464.511,98	122.464.511,98
Pendapatan Diterima Dimuka	43.069.508.765,50	37.565.967.312,41
Utang Belanja	342.995.832.125,07	401.464.629.780,76
Saldo per 31 Desember 2024	386.187.805.402,55	439.153.061.605,15

a) Utang PFK	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	122,464,511,98	122,464,511,98

Saldo utang PFK per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp122.464.511,98 dan Rp122.464.511,98. Saldo utang PFK Tahun 2024 Rp122.464.511,98 merupakan utang PFK pada Dinas Kesehatan Kota Medan atas belanja dana kapitasi pada FKTP pada tahun 2019 dengan rincian pada **Lampiran 32.** 

b) Pendapatan Diterima Dimuka	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	43.069.508.765,50	37.565.967.312,41

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp43.069.508.765,50 dan Rp37.565.967.312,41. Saldo sebesar Rp43.069.508.765,50 tersebut terdiri dari.

(1) Pendapatan sewa pemakaian ruang di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan oleh pihak ketiga sebesar Rp286.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92. Pendapatan Sewa Pemakaian Ruangan Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Bank BRI (Sewa ATM)	17.500.000,00
Bank Mandiri (Sewa ATM)	12.500.000,00
Bank SUMUT (Sewa Kantor)	50.000.000,00
Bank SUMUT (Sewa ATM)	25.000.000,00
Bank SUMUT (Sewa Gudang)	25.000.000,00
PT. Indosat	120.000.000,00
Diklat	36.000.000,00
Jumlah	286.000.000,00

(2) Pendapatan diterima dimuka atas penerimaan pajak reklame yang dikelola oleh Bapenda sebesar Rp42.783.508.765,50.

c. Utang Belanja

31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

324.995.832.125,07

31 Desember 2023

(Rp)

401.464.629.780,76

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp342.995.832.125,07 dan Rp401.464.629.780,76, dengan rincian sebagai berikut.

- (1) Utang Belanja Pegawai berupa rapel gaji, kekurangan gaji, gaji susulan, dan jasa pelayanan RSUD yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.890.590.491,00. Rincian utang belanja pegawai dapat dilihat pada **Lampiran 33.**
- (2) Utang Belanja Barang Jasa berupa belanja listrik, air, telepon, internet, utang belanja barang dan jasa BOS, utang belanja barang dan jasa BLUD dan lain-lain serta belanja kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp79.246.089.480,32 rincian pada **Lampiran 34.**
- (3) Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp257.859.152.153,75 dannmerupakan kewajiban pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan aset tetap yang tidak terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan akan dianggarkan kembali pembayarannya pada Tahun 2025, rincian pada **Lampiran 35.**

# c. Ekuitas Tahun 2024 Tahun 2023 (Rp) (Rp) 38.182.518.594.511,15 36.517.024.366.824,21

Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp38.182.518.594.511,15 dan Rp36.517.024.366.824,21. Saldo ekuitas sebesar Rp38.182.518.594.511,20 tersebut adalah kekayaan bersih pemko medan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemko medan pada tanggal laporan.

Tabel 93. Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset	38.568.706.399.913,70	36.956.177.428.429,36
Kewajiban	386.187.805.402,55	439.153.061.605,15
Ekuitas	38.182.518.594.511,15	36.517.024.366.824,21

#### 4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional sebagai salah satu laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP berbasis akrual maka LO Tahun 2024 disandingkan dengan LO Tahun 2023.

## a. Pendapatan-LO Tahun 2024 Tahun 2023 (Rp) (Rp) 6.793.429.338.858,55 6.480.867.969.216,48

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi. Saldo pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.793.429.338.858,55 dan Rp6.480.867.969.216,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94. Saldo Pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo2024 (Rp)	Saldo2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah-LO	2.919.724.083.956,05	2.632.132.931.460,08	287.591.152.495,97	10,93
Pendapatan Transfer – LO	3.573.437.045.978,00	3.277.331.957.664,00	296.105.088.314,00	9,03
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	300.268.208.924,50	571.403.080.092,40	(271.134.871.167,90)	(47,45)
Jumlah	6.793.429.338.858.55	6.480.867.969.216.48	312.561.369.642.07	4.82

1) Pendapatan Asli Daerah-LO	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	2.919.724.083.956,05	2.632.132.931.460,08

PAD-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.919.724.083.956,05 dan Rp2.632.132.931.460,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95. Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

raber 35. Gaido i endapatan Asii Daeran-Lo Tanun 2024 dan 2025					
Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%	
Pajak Daerah – LO	2.639.154.600.959,58	2.297.146.128.644,45	342.008.472.315,13	14,89	
Retribusi Daerah – LO Hasil Pengelolaan	140.156.205.715,00	155.753.444.124,00	(15.597.238.409,00)	(10,01)	
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	16.949.558.945,19	16.550.200.855,70	399.358.089,49	2,41	
Lain-lain PAD yang Sah - LO	123.463.718.336,28	162.683.157.835,93	(39.219.439.499,65)	(24,11)	
Jumlah	2.919.724.083.956,05	2.632.132.931.460,08	287.591.152.495,97	10,93	

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.919.724.083.956,05 mencakup seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah disetorkan ke RKUD dan juga adanya pengakuan Pendapatan Asli Daerah atas terbitnya Surat Ketetapan Pendapatan Asli Daerah yang diakui bersamaan sebagai piutang Pendapatan Asli Daerah.

a) Pendapatan Pajak Daerah – LO **31 Desember 2024** 

**31 Desember 2023** 

(Rp)

(Rp)

2.639.154.600.959,58

2.297.146.128.644,45

Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp2.639.154.600.959,58 dan Rp2.297.146.128.644,45 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 96. Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel – LO	44.100.762.303,00	143.076.462.683,80	(98.975.700.380,80)	(69,18)
Pajak Restoran – LO	109.560.225.360,00	360.705.384.543,80	(251.145.159.183,80)	(69,63)
Pajak Hiburan – LO	18.926.774.638,00	71.439.779.766,00	(52.513.005.128,00)	(73,51)
Pajak Reklame – LO	97.373.704.683,58	92.124.185.792,85	5.249.518.890,73	5,70
Pajak Penerangan Jalan – LO	82.332.069.027,00	320.947.657.428,00	(238.615.588.401,00)	(74,35)
Pajak Parkir – LO	6.189.727.308,00	31.630.798.094,00	(25.441.070.786,00)	(80,43)
Pajak Air Tanah - LO	24.690.890.444,00	16.269.984.581,00	8.420.905.863,00	51,76
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO Bea Perolehan Hak atas	840.120.793.413,00	816.885.130.012,00	23.235.663.401,00	2,84
Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	690.927.836.350,00	444.066.745.743,00	246.861.090.607,00	55,59
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	724.931.817.433,00	-	724.931.817.433,00	100,00
Jumlah	2.639.154.600.959,58	2.297.146.128.644,45	342.008.472.315,13	14,89

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.639.154.600.959,58 mencakup seluruh penerimaan pajak daerah yang telah disetorkan ke RKUD dan juga adanya pengakuan pendapatan pajak daerah atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diakui bersamaan sebagai Piutang Pendapatan Pajak Daerah.

Pendapatan Pajak-LO pada tahun 2024 sebesar Rp2.639.154.600.959,58 sedangkan Pendapatan Pajak-LRA pada tahun 2024 sebesar Rp2.483.892.895.537,00 ada perbedaan sebesar Rp155.261.705.422,58. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Penambah:	Rp.	292.910.453.636,08
1. Ketetapan Pajak Daerah 2024 yang belum di	Rp.	255.781.069.657,00
bayar		
2. Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	Rp.	37.129.383.979,08
tahun 2023		
B. Faktor Pengurang:	Rp.	137.648.748.213,50
3. Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun	Rp.	94.865.239.448,00
sebelumnya		
2. Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	Rp.	42.783.508.765,50
tahun 2024		
Jumlah (A-B)	Rp.	155.261.705.422,58

b) Pendapatan Retribusi 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Daerah-LO (Rp) (Rp) 140.156.205.715,00 155.753.444.124,00

Saldo pendapatan Pajak Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp140.156.205.715,00 dan Rp155.753.444.124,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	2.379.158.420,00	61.015.000,00	2.318.143.420,00	3.799,30
Retribusi Pelayanan Per-sampahan/Kebersihan – LO	26.369.627.494,00	23.362.989.150,00	3.006.638.344,00	12,87
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	268.055.000,00	395.943.000,00	(127.888.000,00)	(32,30)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	19.860.403.835,00	24.883.189.962,00	(5.022.786.127,00)	(20,19)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	1.883.956.515,00	7.118.025.493,00	(5.234.068.978,00)	(73,53)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	-	2.411.997.000,00	(2.411.997.000,00)	
Retribusi Pelayanan Tera LO	-	406.658.700,00	(406.658.700,00)	
Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	25.000.000,00	-	25.000.000,00	
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	22.704.000,00	37.291.320,00	(14.587.320,00)	(39,12)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	754.228.869,00	59.730.588.939,00	(58.976.360.070,00)	(98,74)
Retribusi Terminal – LO	49.231.000,00	273.516.000,00	(224.285.000,00)	(82,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	152.431.000,00	622.460.000,00	(470.029.000,00)	(75,51)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	-	43.660.000,00	(43.660.000,00)	
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	41.275.000,00	31.575.000,00	9.700.000,00	30,72%
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	2.280.000,00	-	2.280.000,00	100
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	1.753.271.075,00	=	1.753.271.075,00	100
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	-	36.191.169.560,00	(36.191.169.560,00)	
Retribusi Izin Trayek – LO	-	183.365.000,00	(183.365.000,00)	
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	84.771.555.040,00	-	84.771.555.040,00	100,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	1.823.028.467,00	-	1.823.028.467,00	100,00
Jumlah	140.156.205.715,00	155.753.444.124,0 0	(15.597.238.409,00)	(10,01)

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp140.156.205.715,00 mencakup seluruh penerimaan Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke RKUD dan juga adanya pengakuan Pendapatan Retribusi daerah atas terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diakui bersamaan sebagai Piutang Pendapatan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp140.156.205.715,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp139.920.386.103,00 ada perbedaan sebesar Rp235.819.612,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Penambah:	Rp.	2.188.408.366,00
1. Pembayaran Piutang Tahun sebelumnya	Rp.	1.215.135.890,00
2. Pendapatan Jasa Usaha Penyewaan Tanah dan	Rp.	746.057.076,00
Bangunan/ BOT		
3. Pendapatan atas kekurangan penerimaan	Rp.	227.215.400,00
retribusi		
B. Faktor Pengurang:	Rp.	1.952.588.754,00
1. Piutang Retribusi Persampahan	Rp.	258.302.134,00
2. Koreksi Piutang belum dicatat TA 2024	Rp.	1.694.286.620,00
Jumlah (A-B)	Rp.	235.819.612,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Daerah yang Dipisahkan-LO (Rp) (Rp) 16.949.558.945,19 16.550.200.855,70

Saldo pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp16.949.558.945,19 dan Rp16.550.200.855,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98. Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisankan-LO Tanun 2024 dan 2023				
Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	16.124.076.918,79	15.529.075.262,00	595.001.656,79	3,83
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	825.482.026,40	1.021.125.593,70	(195.643.567,30)	(19,16)
Jumlah	16.949.558.945,19	16.550.200.855,70	399.358.089,49	2,41

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp16.949.558.945,19 mencakup:

	Jumlah	Rp	16.949.558.945,19
3.	Penambahan Piutang Deviden PD. Pasar	Rp	240.010.590,40
2.	Penerimaan Deviden dari PT. KIM	Rp	585.471.436,00
1.	Penerimaan Deviden dari PT. Bank Sumut	Rp	16.124.076.918,79

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp16.949.558.945,19 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp16.973.995.298,79 ada Perbedaan sebesar Rp24.436.535,60. Perbedaan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Penambah:	
1. Penambahan Piutang Deviden PD. Pasar	Rp 240.010.590,40
B. Faktor Pengurang:	
1. Pembayaran atas Piutang Deviden PD.Pasar	Rp 264.446.944,00
Tahun sebelumnya	
Jumlah (A-B)	Rp (24.436.535,60)

d) Lain-lain PAD yang Sah	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
-LO	(Rp)	(Rp)
	123.463.718.336,28	162.683.157.835,93

Saldo lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp123.463.718.336,28 dan Rp162.683.157.835,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99. Saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	819.066.762,00	-	819.066.762,00	100,00
Jasa Giro-LO	4.413.453.111,00	10.681.594.614,00	(6.268.141.503,00)	(58,68)

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	12.337.859.439,00	16.780.560.087,00	(4.442.700.648,00)	100,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	89.237.079,60		89.237.079,60	100,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	86.263.879.136,35	55.926.151.392,20	30.337.727.744,15	54,25
Pendapatan BLUD	19.540.222.808,33	79.294.851.742,73	(59.754.628.934,40)	(75,36)
Jumlah	123.463.718.336,28	162.683.157.835,93	(39.219.439.499,65)	(24,11)

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp123.463.718.336,28 mencakup seluruh penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang telah disetorkan ke RKUD dan juga adanya pengakuan Lain-lain PAD yang Sah-LO, yang diakui bersamaan sebagai Piutang.

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp Rp123.463.718.336,28 sedangkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp129.585.184.164,35 ada perbedaan sebesar Rp6.121.465.828,07 Perbedaan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Penambah:	Rp 8.865.436.248,93
1. Penyesuaian Saldo Akhir Piutang	Rp 541.982.645,00
2. Piutang Pendapatan TA 2024	Rp 7.264.566.429,00
3. Pendapatan diterima dimuka	Rp 150.583.333,33
4. Reklas Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp 819.066.762,00
yang dipisahkan ke Piutang Lain-lain PAD	
yang Sah atas Piutang Kontribusi Tetap PD.	
Pasa	
5. Koreksi Piutang yang belum di catat	Rp 89.237.079,60
B. Faktor Pengurang:	Rp14.986.902.077,00
1. Pembayaran atas Piutang Denda Pajak Daerah	Rp 344.555.395,00
tahun sebelumnya	
2. Pembayaran atas Piutang BLUD dan Piutang	
Lainnya tahun sebelumnya pada	
RSUD.Dr.Pirngadi	Rp14.642.346.682,00
Jumlah (A-B)	(Rp 6.121.465.828,07)

#### e) Pendapatan Transfer-LO

**31 Desember 2024** 

**31 Desember 2023** 

(Rp)

(Rp)

3.573.437.045.978,00

3.277.331.957.664,00

Saldo Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp3.573.437.045.978,00 dan Rp3.277.331.957.664,00 dengan rincian sebagai berikut.

#### Tabel 100. Saldo Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat – LO	2.683.060.472.210,00	2.525.140.357.863,00	157.920.114.347,00	6,25
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	890.376.573.768,00	752.191.599.801,00	138.184.973.967,00	18,37
Jumlah	3.573.437.045.978,00	3.277.331.957.664,00	296.105.088.314,00	9,03

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.573.437.045.978,00 mencakup seluruh penerimaan Pendapatan Transfer yang telah diterima di RKUD dan juga adanya pengakuan Pendapatan Transfer-LO berdasarkan alokasi bagi hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diakui bersamaan sebagai Piutang Pendapatan Transfer.

a) Pendapatan Transfer	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Pemerintah Pusat-LO	(Rp)	(Rp)
	2.683.060.472.210.00	2.525.140.357.863.00

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp2.683.060.472.210,00 dan Rp2.525.140.357.863,00 dengan rincian berikut:

Tabel 101. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak – LO	210.511.004.000,00	273.923.504.000,00	(63.412.500.000,00)	(23,15)
Dana Alokasi Umum - LO	1.927.311.908.517,00	1.678.680.488.000,00	248.631.420.517,00	14,81
Dana Alokasi Khusus Fisik – LO	30.396.472.723,00	38.650.129.380,00	(8.253.656.657,00)	(21,35)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO	514.841.086.970,00	533.886.236.483,00	(19.045.149.513,00)	(3,57)
Jumlah	2.683.060.472.210,00	2.525.140.357.863,00	157.920.114.347,00	6,25

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.683.060.472.210,00 mencakup seluruh penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang telah diterima di RKUD.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp2.683.060.472.210,00 sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA sebesar Rp2.748.283.711.210,00 ada perbedaan sebesar Rp65.223.239.000,00 yang merupakan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun lalu yang berada pada rekening Treasury Deposit Facility (TDF) dan baru disetorkan pada RKUD Kota Medan pada tahun 2024.

b) Pendapatan Transfer	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Pemerintah Daerah Lainnya-	(Rp)	(Rp)
LO	890.376.573.768,00	752.191.599.801,00

Saldo pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp890.376.573.768,00 dan Rp752.191.599.801,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	285.805.883.700,00	260.246.051.179,00	25.559.832.521,00	9,82
Bagi Hasil Pajak Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	145.101.861.195,00	142.261.902.463,00	2.839.958.732,00	2,00
Bagi Hasil Pajak Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	212.106.284.933,00	206.335.192.225,00	5.771.092.708,00	2,80
Bagi Hasil Pajak Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO	2.710.212.734,00	2.925.642.747,00	(215.430.013,00)	(7,36)
Bagi Hasil dari Pajak Rokok – LO	104.652.331.206,00	100.422.811.187,00	4.229.520.019,00	4,21
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	140.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100.000.000.000,00	250,00
Jumlah	890.376.573.768,00	752.191.599.801,00	138.184.973.967,00	18,37

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp890.376.573.768,00 mencakup seluruh penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang telah diterima di RKUD dan juga adanya pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berdasarkan alokasi bagi hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diakui bersamaan sebagai Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp890.376.573.768,00 sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp680.973.361.304,00 terdapat perbedaan sebesar Rp209.403.212.464,00. Perbedaan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Penambah:			Rp.	229.160.878.800,00
Penambahan Piutang DBH	l dari	Pemerintah	Rp.	229.160.878.800,00
Provinsi Sumatera Utara TA	2024			
B. Faktor Pengurang:			Rp.	19.757.666.336,00
Pembayaran Piutang DBH da	ri Peme	rintah	Rp.	19.757.666.336,00
Provinsi Sumatera Utara TA	2024			
Jumlah (A-B)			Rp.	209.403.212.464,60
f) Lain-lain Pendapatan		Desember 202	24	31 Desember 2023
Daerah yang Sah-LO		(Rp)		(Rp)
Daeran yang San-LO		0.268.208.924,	50	571.403.080.092,40

Saldo lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp300.268.208.924,50 dan Rp571.403.080.092,40. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp300.268.208.924,50 mencakup seluruh penerimaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103. Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah – LO	206.281.205.452,62	472.562.955.803,40	(266.281.750.350,78)	(56,35)
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan – LO	93.987.003.471,88	98.840.124.289,00	(4.853.120.817,12)	(4,91)
Jumlah	300.268.208.924,50	571.403.080.092,40	(271.134.871.167,90)	(47,45)

Lain-lain pendapatan yang sah-LO tahun 2024 sebesar Rp300.268.208.924,50 sedangkan lain-lain pendapatan yang sah tahun berjalan LRA tahun 2024 sebesar Rp95.291.003.471,88 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp204.977.205.452,62 yang merupakan Jurnal Penyesuain atas Penerimaan Hibah tahun 2024.

a). Pendapatan Hibah–LO	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	206.281.205.452,62	472.562.955.803,40

Tabel 104. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Dinas Kesehatan	64.048.395.844,52	58.728.082.357,00	5.320.313.487,52	9,06
Dinas PKPCKTR	0,00	24.350.000,00	(24.350.000,00)	(100,00)

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Badan Penanggulangan	0,00	71.800.000,00	(71.800.000,00)	(100,00)
Bencana Daerah Dinas PPPAPM dan KB	1.403.617.840,00	1.607.873.674,00	(204.255.834,00)	(12,70)
Dishub	1.118.500.000,00	550.000.000,00	568.500.000,00	103,36
Dispora	22.827.631.762,10	6.675.400.000,00	16.152.231.762,10	241,97
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.705.000,00	1.615.740.000,00	(1.612.035.000,00)	(99,77)
Dinas SDABMBK	287.578.800,00	0,00	287.578.800,00	100,00
BKAD	116.591.776.206,00	402.747.717.772,40	(286.155.941.566,40)	(71,05)
Bapenda	0,00	541.992.000,00	(541.992.000,00)	(100,00)
Jumlah	206.281.205.452,62	472.562.955.803,40	(266.281.750.350,78)	(56,35)

Rincian pada lampiran 36.

b). Pendapatan Dana Kapitasi JKN	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
pada FKTP-LO	(Rp)	(Rp)
	93.987.003.471,88	98.840.124.289,00

Saldo Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp93.987.003.471,88 dan Rp98.840.124.289,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO merupakan mencakup seluruh penerimaan Dana Kapitasi pada 41 rekening Puskesmas di Kota Medan pada Tahun 2024.

b. Beban	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	5.258.598.437.884,23	5.529.791.516.895,65

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo beban Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp5.258.598.437.884,03 dan Rp5.529.791.516.895,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105. Saldo Beban Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Operasi	5.253.273.165.672,23	5.529.675.332.486,65	(276.402.166.814,42)	(4,99)
Beban Tak Terduga	5.325.272.212,00	116.184.409,00	5.209.087.803,00	4.483,47
Jumlah	5.258.598.437.884,23	5.529.791.516.895,65	(271.193.079.011,42)	(4,90)

Beban Tahun 2024 sebesar Rp5.258.598.437.884,03 mencakup seluruh pengeluaran belanja dan transfer selain belanja modal yang telah dibayarkan melalui RKUD dan juga adanya pengakuan beban saat timbulnya kewajiban yang diakui bersamaan sebagai utang beban. saat terjadinya konsumsi aset. dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta penyesuaian-penyesuaian beban atas belanja dari/ ke aset tetap

1) Beban Operasi	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	5.253.273.165.672,23	5.529.675.332.486,65

Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Saldo beban operasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp5.253.273.165.672,03 dan Rp5.253.273.165.672,23 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 106. Saldo Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	1.925.803.044.254,01	1.849.595.102.229,00	76.207.942.025,01	4,12
Beban Persediaan	655.668.205.163,73	773.937.057.013,19	(118.268.851.849,46)	(15,28)
Beban Jasa	1.514.445.725.373,61	1.521.166.111.374,98	(6.720.386.001,37)	(0,44)
Beban Pemeliharaan	93.028.131.667,94	115.028.842.179,33	(22.000.710.511,39)	(19,13)
Beban Perjalanan Dinas	72.090.979.374,00	98.309.696.832,00	(26.218.717.458,00)	(26,67)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.596.875.598,00	4.363.212.010,00	1.233.663.588,00	28,27
Beban Barang dan Jasa BOS	-	69.399.758.869,99	(69.399.758.869,99)	(100,00)
Beban Hibah	313.798.319.750,00	290.898.938.445,00	22.899.381.305,00	7,87
Beban Bantuan Sosial	138.557.778.575,00	72.337.930.235,00	66.219.848.340,00	91,54
Beban Penyisihan Piutang	242.805.501.395,19	115.522.517.021,03	127.282.984.374,16	110,18
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	107.211.006.159,67	239.420.378.426,97	(132.209.372.267,30)	(55,22)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.506.351.717,91	53.219.316.604,92	(29.712.964.887,01)	(55,83)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	153.690.132.113,87	324.971.425.593,65	(171.281.293.479,78)	(52,71)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.384.371.494,90	-	2.384.371.494,90	100,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.595.800.437,29	-	2.595.800.437,29	100,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	720.918.775,79	1.505.045.651,59	(784.126.875,80)	(52,10)
Beban Penyusutan Properti Investasi	1.370.023.821,33	-	1.370.023.821,33	100,00
Jumlah	5.253.273.165.672,23	5.529.675.332.486,65	(276.402.166.814,42)	(4,99)

Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp5.253.273.165.672,03 mencakup seluruh pengeluaran belanja operasi yang telah dibayarkan melalui RKUD dan juga adanya pengakuan beban saat timbulnya kewajiban yang diakui bersamaan sebagai utang beban operasi. terjadinya konsumsi aset. dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta penyesuaian-penyesuaian beban atas belanja dari/ ke aset tetap.

a) Beban Pegawai	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	1.925.803.044.254,01	1.849.595.102.229,00

Saldo Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp1.925.803.044.254,01 dan Rp1.849.595.102.229,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 107. Saldo Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Gaji Tunjangan ASN	969.543.867.222,00	906.399.189.138,00	63.144.678.084,00	6,97
Beban Tambahan Penghasilan ASN	619.715.053.243,20	605.681.111.372,00	14.048.385.783,00	2,32
Beban Tambahan Penghasilan				
berdasarkan Pertimbangan Objektif	258.040.646.194,81	261.434.578.348,00	(3.393.932.153,989)	(1,30)
Lainnya ASN				
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	43.494.095.765,00	44.153.194.342,00	(659.098.577,00)	(1,49)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	875.618.428,00	1.264.659.716,00	(389.041.288,00)	(30,76)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan	4.198.419.584,00	3.931.455.004,00	266.964.580,00	6.79
DPRD serta KDH/WKDH				
Beban Pegawai BLUD	29.935.343.817,00	26.730.914.309,00	3.204.429.508,00	11,99
Jumlah	1.925.803.044.254,0 1	1.849.595.102.229,00	76.207.942.024,01	4,13

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp1.925.803.044.254,01 mencakup seluruh pengeluaran belanja pegawai yang telah dibayarkan melalui RKUD dan juga adanya pengakuan beban pegawai saat timbulnya kewajiban yang diakui bersamaan sebagai utang beban pegawai.

Beban Pegawai di Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp1.925.803.044.254,01 sedangkan Belanja Pegawai di Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar

Rp1.926.958.217.929,00 ada perbedaan sebesar Rp1.155.173.674,99. Perbedaan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Penambah:	Rp	4.964.344.506,00
1. Utang Pegawai atas Beban Pegawai Tahun	Rp	4.964.344.506,00
2024		
B. Faktor Pengurang:	Rp	6.119.518.180,99
1. Pembayaran Utang Pegawai atas Beban	Rp	5.557.628.719,00
Pegawai tahun sebelumnya		
2. Beban Pegawai Reklas/Kapitalisasi Aset Tetap	Rp	409.226.774,19
3. Pengembalian Belanja Pegawai		18.343.912,80
4. Pengembalian TG Tamsil		134.318.776,00
Jumlah (A-B)	Rp	(1.155.173.674,99)

b) Beban Persediaan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	655.668.205.163,72	773.937.057.013,19

Beban Persediaan adalah biaya yang diakui pada akhir periode pelaporan, berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan, penyerahan persediaan atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. Saldo Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp655.668.205.163,72 dan Rp773.937.057.013,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 108. Saldo Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	592.561.983.694,77	735.790.587.041,17	(143.228.603.346,40)	(19,47)
Beban Barang Tak Habis Pakai	2.774.469.760,00	1.161.244.934,00	1.613.224.826,00	138,92
Beban Barang Bekas Dipakai	-	8.800.000	(8.800.000,00)	(100,00)
Beban Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria Kapitalisasi	60.336.751.708,95	36.976.425.038	23.360.326.670,93	63,18
JUMLAH	655.668.205.163,72	773.937.057.013,19	(118.268.851.849,47)	(15,28)

Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp655.668.205.163,72 sedangkan Belanja Persediaan tahun 2024 sebesar Rp616.776.265.503,16 ada perbedaan sebesar Rp38.891.939.660,56. Perbedaan nilai tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Penambah:	Rp	436.188.272.250,96
1. Reklas Aset Tetap ke Beban Persediaan	Rp	65.450.998.874,95
2. Reklas Beban Jasa ke Beban Persediaan	Rp	865.235.000,00
3. Reklas Beban Pemeliharaan ke Beban Persediaan	Rp	1.822.800.000,00
4. Reklas Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban	Rp	32.567.116.889,49
Persediaan		
5. Reklas Beban Barang dan Jasa BOS ke Beban	Rp	28.596.056.193,19
Persediaan		
6. Reklas Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas ke	Rp	2.717.461.781,00
Beban Persediaan		
7. Beban Persediaan atas Persediaan tahun	Rp	224.889.813.852,81
sebelumnya		

8. Beban Persediaan atas Penambahan Utang	Rp	16.776.191.655,00
Persediaan Tahun 2024		
9. Pendapatan Hibah Persediaan	Rp	62.502.598.004,52
B. Faktor Pengurang:	Rp	397.296.332.590,40
1. Reklas/Kapitalisasi Beban Persediaan ke Aset	Rp	31.789.940.892,86
Tetap		
2. Reklas Beban Persediaan ke Beban Pemeliharaan	Rp	13.783.390.000,00
3. Reklas Beban Persediaan ke Beban Barang dan Jasa	Rp	10.063.965.686,69
BLUD		
4. Beban Persediaan atas Penambahan Nilai	Rp	270.012.258.914,40
Persediaan 2024		
5. Pembayaran atas Utang Persediaan tahun	Rp	33.994.832.043,00
sebelumnya		
6. Reklas ke Beban Bantuan Sosial	Rp	37.597.710.000,00
7. Reklas ke Beban Bantuan Sosial	Rp	54.235.053,45
Jumlah (A-B)	Rp	38.891.939.660,56

c) Beban Jasa 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 1.514.445.725.373,61 1.521.166.111.374,98

Beban Jasa merupakan Beban atas jasa yang telah dipergunakan dalam Operasional pemerintah. Beban Jasa pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing bernilai Rp1.514.445.725.373,61 dan Rp1.521.166.111.374,98 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 109. Saldo Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	1.178.418.270.210,92	1.150.708.482.721,31	27.709.787.489,61	2,41
Beban luran Jaminan/Asuransi	253.275.688.322,00	245.368.521.310,00	7.907.167.012,00	3,22
Beban Sewa Tanah	361.404.000,00	615.900.000,00	(254.496.000,00)	(41,32)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	39.705.809.293,55	33.059.532.112,00	6.646.277.181,55	20,10
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.312.009.566,00	6.714.036.426,67	(2.402.026.860,67)	(35,78)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	301.058.000,00	433.745.000,00	(132.687.000,00	(30,59)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	539.593.561,00	249.433.605,00	290.159.956,00	116,33
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	15.134.229.868,14	56.773.915.424,00	(41.639.685.555,86)	(73,34)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.961.969.650,00	3.616.926.030,00	(1.654.956.380,00)	(45,76)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan				
(Availibility	4.254.733.193,00	6.154.594.099,00	(1.899.860.906,00)	(30,87)
Payment)				
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,				
Bimbingan	5.196.126.403,00	4.569.128.359,00	626.998.044,00	13,72
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak	·	·	·	
Daerah bagi	10.984.833.306,00	12.861.896.288,00	(1.877.062.982,00)	(14,59)
Pegawai Non ASN				
JUMLAH	1.514.445.725.373,61	1.521.166.111.374,98	(6.720.386.001,37)	(0,44)

Beban Jasa pada tahun 2024 sebesar Rp1.514.445.725.373,61 sedangkan Belanja Jasa pada tahun 2024 sebesar Rp1.466.807.292.488,86 ada perbedaan nilai sebesar Rp47.638.432.884,75. Perbedaan nilai tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Penambah:	Rp	99.664.900.435,53
1. Reklas ke Beban Jasa	Rp	70.582.848.537,86
<ol> <li>Beban Jasa atas Penambahan Utang Jasa Tahun 2024</li> </ol>	Rp	28.451.135.231,00
3. Beban Jasa Sewa dibayar dimuka tahun sebelumnya	Rp	630.916.666,67
B. Faktor Pengurang:	Rp	52.026.467.550,52
1. Reklas dari Beban Jasa	Rp	17.763.197.657,30
2. Pembayaran atas Utang Jasa tahun sebelumnya	Rp	33.412.809.117,50
3. Beban Jasa Sewa dibayar dimuka tahun 2024	Rp	679.000.003,67
4. Pengembalian atas TP Jasa Konsultasi MK	Rp.	162.210.864,86
Revitalisasi Lapangan Merdeka Dinas PKPCKT  5. Pengembalian atas TP Belanja Barang dan Jasa	Rp.	9.249.907,45
BOS pada Disdikbud		
Jumlah (A-B)	Rp	47.638.432.884,75

d) Beban Pemeliharaan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	93.028.131.667,94	115.028.842.179,33

Beban Pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan untuk melakukan perawatan atau menjaga aset agar tetap berfungsi dengan baik. Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing bernilai Rp93.028.131.667,94 dan Rp115.028.842.179,33 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 110. Saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	199.600.000	2.773.487.042,00	(2.573.887.042,00)	(92,80)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.563.900.826	62.396.749.117,50	(9.832.848.291,50)	(15,76)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.033.020.311,94	21.598.781.569,33	2.434.238.742,61	11,27
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.243.617.373,00	20.597.164.052,50	(5.353.546.679,50)	(25,99)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	987.993.157,00	7.662.660.398,00	(6.674.667.241,00)	(87,11)
JUMLAH	93.028.131.667.94	115.028.842.179.33	(22.000.710.511,39)	(19.13)

Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 sebesar Rp93.028.131.667,94 sedangkan Belanja Pemeliharaan pada tahun 2024 sebesar Rp82.727.853.733,94 ada perbedaan nilai sebesar Rp10.300.277.934,00. Perbedaan nilai tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

A.	Faktor Penambah:	Rp	21.960.810.291,00
1.	Reklas Beban Persediaan ke Beban Pemeliharaan	Rp	13.783.390.000,00
2.	Reklas Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban	Rp	3.770.796.677,00
	Pemeliharaan		
5.	Reklas Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	Rp	2.048.541.615,00
6.	Reklas Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	Rp	2.158.954.082,00
7.	Beban Pemeliharaan atas Penambahan Utang	Rp	199.127.917,00
	Pemeliharaan Tahun 2024		
8.	Koreksi Tambah Beban Pemeliharaan	Rp	178.748.375,00
B.	<b>Faktor Pengurang:</b>	Rp	11.660.532.357,00

f)

Jumlah (A-B)	Rp	10.300.277.934,00
sebelumnya		
3. Pembayaran atas Utang Pemeliharaan tahun	Rp	5.153.876.096,00
<ol><li>Reklas/Kapitalisasi Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap</li></ol>	Rp	5.697.942.261,00
Jasa BLUD	D	5 (07 042 2(1 00
1. Reklas Beban Pemeliharaan ke Beban Barang dan	Rp	808.714.000,00

e) Beban Perjalanan Dinas	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	( <b>Rp</b> )	(Rp)
	72.090.979.374,00	98.309.696.832,00

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas, seperti uang harian, transportasi, penginapan, uang representasi dan biaya lainnya yang timbul terkait perjalanan dinas. Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing bernilai Rp72.090.979.374,00 dan Rp98.309.696.832,00 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 111. Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.503.986.965	96.847.564.365,00	(26.343.577.400,00)	(27,20)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.586.992.409	1.462.132.467,00	124.859.942,00	8,54
Jumlah	72.090.979.374,00	98.309.696.832,00	(26.218.717.458,00)	(26,67)

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 sebesar Rp72.090.979.374,00 sedangkan Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2024 sebesar Rp71.391.390.654,00 ada perbedaan nilai sebesar Rp699.588.720,00. Perbedaan nilai tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Penambah:	Rp	749.640.272,00
1. Reklas Beban Barang dan Jasa ke Beban	Rp	749.640.272,00
Perjalanan Dinas		
B. Faktor Pengurang:	Rp	50.051.552,00
1. Reklas Beban Perjalanan Dinas ke Beban Jasa	Rp	10.471.935,00
<ol><li>Pembayaran atas Utang Perjalanan Dinas tahun sebelumnya</li></ol>	n Rp	39.579.617,00
Jumlah (A-B)	Rp	699.588.720,00
Beban Uang dan/atau jasa 31 Desemb	er 2024	31 Desember 2023
untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat (Rp)	)	(Rp)

Beban Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing bernilai Rp5.596.875.598,00 dan Rp4.363.212.010,00 dengan Rincian sebagai berikut:

5.596.875.598,00

4.363.212.010,00

Tabel 112. Saldo Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.463.450.598,00	3.333.162.010,00	2.130.288.588,00	63,91
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	133.425.000,00	1.030.050.000,00	(896.625.000,00)	(87,05)
JUMLAH	5.596.875.598,00	4.363.212.010,00	1.233.663.588,00	28,27

Jumlah Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun 2024 dan Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun 2024 tidak ada perbedaan yaitu sebesar Rp5.596.875.598,00. Dengan demikian beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun 2024 sebesar Rp5.596.875.598,00 merupakan pengeluaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun 2024 yang telah dibayarkan melalui RKUD.

g) Beban Hibah	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	313.798.319.750,00	290.898.938.445,00

Saldo Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp313.798.319.750,00 dan Rp290.898.938.445,00. Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp313.798.319.750,00 mencakup seluruh pengeluaran belanja hibah yang telah dibayarkan melalui RKUD dan juga adanya pengakuan beban saat timbulnya kewajiban yang diakui bersamaan sebagai Utang Beban Hibah.

Beban Hibah pada LO Tahun 2024 sebesar Rp313.798.319.750,00 sedangkan belanja Hibah pada LRA sebesar Rp313.250.004.750,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp548.315.000,00 Perbedaan nilai tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Penambah:	Rp	623.315.000,00
1. Reklas Aset Tetap ke Beban Hibah	Rp	623.315.000,00
B. Faktor Pengurang:	Rp	75.000.000,00
1. Pembayaran Utang Belanja Hibah atas	Rp	75.000.000,00
Beban Hibah tahun sebelumnya	_	
Jumlah (A-B)	Rp	548.315.000,00

h) B	Beban Bantuan Sosial	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
		(Rp)	(Rp)
		138.557.778.575,00	72.337.930.235,00

Saldo beban bantuan sosial tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp138.557.778.575,00 dan Rp72.337.930.235,00. Beban bantuan sosial Tahun 2024 sebesar Rp138.557.778.575,00 mencakup seluruh pengeluaran belanja bantuan sosial yang telah dibayarkan melalui RKUD.

#### i) Beban Penyisihan Piutang 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 242.805.501.395,19 115.522.517.021,03

Beban penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo beban penyisihan piutang Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp242.805.501.395,19 dan Rp115.522.517.021,03.

Beban penyisihan piutang Tahun 2024 sebesar Rp242.805.501.395,19 mencakup seluruh penyesuaian terhadap persentase penyisihan piutang sesuai umur piutang dari nilai piutang yang disajikan di akhir periode pelaporan. dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 113. Perhitungan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
a. Saldo Awal Penyisihan Piutang	(1.006.632.172.476,78)
b. Saldo Akhir Penyisihan Piutang	(1.249.301.431.169,66)
c. Koreksi Beban Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	136.242.702,31
Beban Penyisihan Piutang (a - b) + c	242.805.501.395,19

j) Beban Penyusutan Peralatan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
dan Mesin	(Rp)	(Rp)
	107.211.006.159.67	239.420.378.426.97

Saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp107.211.006.159,67 dan Rp239.420.378.426,97. Beban penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp107.211.006.159,67 merupakan penurunan manfaat ekonomis terhadap aset tetap Peralatan dan Mesin dan koreksi-koreksi terhadap beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya. dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 114. Perhitungan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

per 31 Describer 2024			
Uraian	Nilai (Rp)		
a. Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(1.908.191.375.978,49)		
b. Faktor Penambah:			
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	(9.434.554.492,60)		
Total Faktor Penambah	(9.434.554.492,60)		
c. Faktor Pengurang:			
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	(2.018.935.678.257,27)		
Koreksi kurang Akumulasi penyusutan	(5.901.258.373,49)		
Total Faktor Pengurang	(2.024.836.936.630,76)		
Beban Penyusutan (a + b - c)	107.211.006.159,67		

g) Beban Penyusutan Gedung dan	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Bangunan	(Rp)	(Rp)
	23.506.351.717,91	53.219.316.604,92

Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp23.506.351.717,91 dan Rp53.219.316.604,92. Beban penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp23.506.351.717,91 merupakan penurunan manfaat ekonomis terhadap aset tetap Gedung dan Bangunan dan koreksi-koreksi terhadap beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya. dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 115. Perhitungan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
a. Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(561.938.012.946,02)
b. Faktor Penambah:	
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	(60.559.830,00)
Total Faktor Penambah	(60.559.830,00)
c. Faktor Pengurang:	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	(472.053.219.925,29)
Koreksi kurang Akumulasi penyusutan	(113.451.704.568,64)
Total Faktor Pengurang	(585.504.924.493,93)
Beban Penyusutan (a + b - c)	23.506.351.717,91

h) Beban Penyusutan Jalan, 31 Desember 2024 31 Desember 2023 Jaringan dan Irigasi (Rp) (Rp) (Rp) 153.690.132.113,87 324.971.425.593,65

Saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp153.690.132.113,87 dan Rp324.971.425.593,65. Beban penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp153.690.132.113,87 merupakan penurunan manfaat ekonomis terhadap aset tetap Jalan Jaringan dan Irigasi dan koreksi-koreksi terhadap beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya. dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 116. Perhitungan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
a. Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(4.104.402.666.174,30)
b. Faktor Penambah:	
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	-
Total Faktor Penambah	-
c. Faktor Pengurang:	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	(4.143.644.238.566,91)
Koreksi kurang Akumulasi penyusutan	(114.448.559.721,26)
Total Faktor Pengurang	(4.258.092.798.288,17)
Beban Penyusutan (a + b - c)	153.690.132.113,87

i) Beban Penyusutan Aset Tetap	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Lainnya	(Rp)	( <b>Rp</b> )
J. C.	2.384.371.494,90	0.00

Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 bernilai Rp2.384.371.494,90. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.384.371.494,90 merupakan penurunan manfaat ekonomis terhadap Aset Tetap Lainnya.

Tabel 117. Perhitungan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
a. Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	-
b. Faktor Penambah:	
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	(11.642.495.612,37)
Total Faktor Penambah	(11.642.495.612,37)
c. Faktor Pengurang:	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	(13.334.504.208,11)
Koreksi kurang Akumulasi penyusutan	(692.362.899,16)
Total Faktor Pengurang	(14.026.867.107,27)
Beban Penyusutan (a + b - c)	2.384.371.494,90

j) Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga

**31 Desember 2024 31 Desember 2023** (Rp) (Rp) 2.595.800.437,29 0,00

Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 bernilai Rp2.595.800.437,29 merupakan penurunan manfaat ekonomis terhadap Aset Tetap Lainnya.

Tabel 118. Perhitungan Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

<b>5</b> .	
Uraian	Nilai (Rp)
a. Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	-
b. Faktor Penambah:	
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	-
Total Faktor Penambah	-
c. Faktor Pengurang:	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	(38.679.312.021,56)
Koreksi kurang Akumulasi penyusutan	36.083.511.584,27
Total Faktor Pengurang	(2.595.800.437,29)
Beban Penyusutan (a + b - c)	2.595.800.437,29

k) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

**31 Desember 2024 31 Desember 2023** (Rp)

(Rp)

720.918.775,79

1.505.045.651,59

Saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp720.918.775,79 dan Rp1.505.045.651,59. Beban Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp720.918.775,79 merupakan penurunan manfaat ekonomis terhadap aset tidak berwujud dan koreksi-koreksi terhadap beban Amortisasi tahun-tahun sebelumnya. dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 119. Perhitungan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
a. Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(10.259.232.473,62)
b. Faktor Penambah:	
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	0,00
Total Faktor Penambah	0,00
c. Faktor Pengurang:	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	(10.980.151.249,59)
Koreksi kurang Akumulasi penyusutan	(0,02)
Total Faktor Pengurang	(10.980.151.249,41)
Beban Penyusutan (a + b - c)	Rp720.918.775,79

1) Beban Penyusutan Properti Investasi **31 Desember 2024 31 Desember 2023** (Rp) (Rp) 1.370.023.821,33 0,00

Saldo Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2024 bernilai Rp1.370.023.821,33 Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2024 bernilai Rp1.370.023.821,33 merupakan penurunan manfaat ekonomis terhadap Properti Investasi.

Tabel 120. Perhitungan Beban Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Uraian	Nilai (Rp)
a. Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	-
b. Faktor Penambah:	
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	-
Total Faktor Penambah	-

Uraian	Nilai (Rp)
c. Faktor Pengurang:	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	(9.153.106.595,64)
Koreksi kurang Akumulasi penyusutan	7.783.082.774,31
Total Faktor Pengurang	(1.370.023.821,33)
Beban Penyusutan (a + b - c)	1.370.023.821,33

#### 2) Beban Tidak Terduga

31 Desember 2024 (Rp) 5.325.272.212,00 31 Desember 2023 (Rp)

116.184.409,00

Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Saldo Beban Tidak Terduga Tahun 2024 dan 2023 masing-masing bernilai Rp5.325.272.212,00 dan Rp116.184.409,00. Beban Tidak Terduga tahun 2024 sebesar Rp5.325.272.212,00 mencakup seluruh realisasi Belanja Tidak Terduga antara lain bantuan bencana alam. pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dari tahun-tahun sebelumnya dan lain-lain yang telah dibayarkan seluruhnya melalui RKUD.

Tabel 121. Beban Tak Terduga - LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pengembalian Lebih Bayar Transfer ke RKUD an. Yunita Sari, SH sesuai SK Walikota No. 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	4.845.000,00	0,00	4.845.000,00
Pengembalian Lebih Bayar PBB an. Edy Suanto sesuai SK Walikota No. 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	3.415.813,00	0,00	3.415.813,00
Pengembalian Lebih Bayar PBB an. PT. Bank Sumut sesuai SK Walikota No. 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	27.278.102,00	0,00	27.278.102,00
Pengembalian Lebih Bayar PBB an. Rahim Haloho cs sesuai SK Walikota No. 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	10.276.627,00	0,00	10.276.627,00
Pengembalian Lebih Bayar Transfer ke RKUD an. Drs. Zulkarnain, M.Si sesuai SK Walikota No. 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	510.000,00	0,00	510.000,00
Pengembalian Lebih Bayar BPHTB an. Nurhayati Lubis, S. Ag sesuai SK Walikota No. 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	1.985.300,00	0,00	1.985.300,00
Pengembalian Lebih Bayar PBB an. PT. Kurnia Tetap Mulia sesuai SK Walikota No. 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	4.602.631,00	0,00	4.602.631,00
Pengembalian Lebih Bayar Transfer ke RKUD an. Muhammad Sofyan, S.Sos, M.AP sesuai SK Walikota No. 903/46.K Tanggal 21 Maret 2024	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Pengembalian Lebih Bayar/Double Bayar PBB-P2 an. PT. Pelindo sesuai SK Walikota No. 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	665.148.263,00	0,00	665.148.263,00
Pengembalian Lebih Bayar/Double Bayar PBB-P2 an. PT. Pelindo sesuai SK Walikota No. 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	4.259.208.537,00	0,00	4.259.208.537,00
Pengembalian Lebih Bayar/Double Bayar Pajak Reklame an. PT. Rekso Nasional Food sesuai SK Walikota No. 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	13.901.048,00	0,00	13.901.048,00
Pengembalian Lebih Bayar Pajak Restoran an. RM. UD. Lau Yu sesuai SK Walikota No. 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	8.900.202,00	0,00	8.900.202,00
Pengembalian Lebih Bayar/Double Bayar Pajak Reklame an. PT. AIA Financial sesuai SK Walikota No. 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	232.789.689,00	0,00	232.789.689,00

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pengembalian Salah Bayar BPHTB an. Ijo Sam sesuai SK Walikota No. 903/32.K Tanggal 29 Juli 2024	88.161.000,00	0,00	88.161.000,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga Ta. 2022 Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) an. Julianita Perangin Angin,SH denganNOP. 12.75.071.005.001-0046.0 sesuai SK Walikota No. 903 / 118.K Tanggal 23 Februari 2023	0,00	27.987.900,00	27.987.900,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga Ta. 2022 Pengembalian Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 12750400700200350 an. Lisma Royda Manalu sesuai SK Walikota No. 903 / 08.K Tanggal 5 April 2023	0,00	25.597.028,00	25.597.028,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga TA. 2023 Pengembalian Lebih bayar/ Lebih Setor ke RKUD atas Pengelembalian Honor Hasil LHP BPK RI Nomor 63.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 an. Sutan Arsyad sesuai SK Walikota No. 903 / 05.K Tanggal 7 Juli 2023	0,00	36.945.000,00	36.945.000,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga TA. 2023 Pengembalian Kelebihan Dana atau Double Bayar PT. Bank Sumut ke RKUD Pemerintah Kota Medan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai SK Walikota No. 903/05.K Tanggal 7 Juli 2023	0,00	23.512.867,00	23.512.867,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga TA. 2023 Pengembalian Kelebihan Dana atau Double Bayar PPh Pasal 22 sesuai SK Walikota No. 903/12.K Tanggal 20 Desember 2023	0,00	2.141.614,00	2.141.614,00
Jumlah	5.325.272.212,00	116.184.409,00	5.209.087.803,00
c. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	Tahun 2024 (Rp) (8.961.280.510,97)	)	Tahun 2023 (Rp) 0,00

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan kenaikan atau penurunan nilai ekuitas yang berasal dari kegitan non operasional. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 sebesar Rp (8.961.280.510,97).

1) Surplus Non Operasional-	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
LO	(Rp)	(Rp)
	556 820 502 92	0.00

Surplus Non Operasional-LO adalah kenaikan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional. Surplus Non Operasional-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing Rp556.820.502,92 dan Rp0,00. Surplus Non Operasional-LO Tahun 2024 Rp556.820.502,92 merupakan selisih kurs hasil kerjasama BOT dengan pihak ketiga.

2) Defisit Non Operasional-LO	Tahun 2024	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	(9.518.101.013.89)	(7.756.258.464.00)

Defisit Non Operasional-LO adalah penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional. Defisit Non Operasional-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing

Rp9.518.101.013,89 dan Rp7.756.258.464,00. Defisit Non Operasional-LO Tahun 2024 Rp9.518.101.013,89 merupakan penurunan nilai atas:

- a) Penyertaan modal pada Perumda Pasar, Perumda Pembangunan dan Perumda Rumah Potong Hewan sebesar Rp6.645.182.653,00; dan
- b) Persediaan Barang Expired pada Dinas Kesehatan, RSUD. Pirngadi dan RSUD. Bahtiar Djafar sebesar Rp2.872.918.360,89.

d. Surplus/ (Defisit) – LO	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	1.525.869.620.463.35	943.320.193.856.83

Surplus merupakan selisih lebih antara Pendapatan - LO dengan Beban. sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan - LO dengan beban dalam tahun anggaran berkenaan. Laporan operasional Tahun 2024 mengalami Surplus sebesar Rp1.525.869.620.463,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122. Surplus/ (Defisit) - LO per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan – LO	6.793.429.338.858,55	6.480.867.969.216,48	312.561.369.642,07	4,82
Beban	5.258.598.437.884,23	5.529.791.516.895,65	(271.193.079.011,42)	(4,90)
Surplus/Defisit dari			1.205.022.046,97	
Kegiatan Non	8.961.280.510,97	7.756.258.464,00		15,54
Operasional Lainnya-LO	·	·		•
Surplus/ (Defisit)	1.525.869.620.463,35	943.320.193.856,83	582.549.426.606,52	61,76

#### 5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Secara umum laporan arus kas menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Laporan arus kas Pemerintah Kota Medan menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Medan mengalami kenaikan kas sebesar Rp 36.572.869.276,74 dan pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Medan mengalami penurunan kas sebesar Rp (479.861.064.567,78) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123. Komponen Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.524.988.157.984,04	1.013.506.444.363,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.488.415.288.707,30)	(1.493.367.508.931,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	36.572.869.276,74	(479.861.064.567,78)

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Tahun 2024 Tahun 2023 Operasi (Rp) (Rp) 1.524.988.157.984.04 1.013.506.444.363,22

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Tahun 2024 dan 2023 merupakan realisasi pendapatan dikurangi seluruh belanja operasi kegiatan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

#### 1) Arus Masuk Kas

31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 6.294.920.537.089,02 5.802.580.478.749,50

Arus masuk kas dari aktivitas operasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp6.294.920.537.089,02 dan Rp5.802.580.478.749,50, yang terdiri dari:

Tabel 124. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pajak Daerah	2.483.892.895.537,00	2.108.199.782.497,00
Retribusi Daerah	139.920.386.103,00	155.490.820.088,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	16.973.995.298,79	15.934.174.811,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	129.585.184.164,35	163.157.955.272,50
Dana Bagi Hasil	275.734.243.000,00	231.740.767.929,00
Dana Alokasi Umum	1.927.311.908.517,00	1.678.680.488.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	30.396.472.723,00	38.650.129.380,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	514.841.086.970,00	533.886.236.483,00
Bagi Hasil dari Provinsi	540.973.361.304,00	738.000.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi	140.000.000.000,00	40.000.000.000,00
Pendapatan Hibah	1.304.000.000,00	0,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	93.987.003.471,88	98.840.124.289,00
Jumlah	6.294.920.537.089,02	5.802.580.478.749,50

Arus kas masuk per 31 Desember 2024 terbesar bersumber dari Pajak Daerah sebesar 39,46% dikuti Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 30,62% dan jenis Pendapatan lainnya.

2) Arus Keluar Kas	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	4.769.932.379.104,98	4.789.074.034.386,28

Arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.769.932.379.104,98 dan Rp4.789.074.034.386,28, terdiri dari.

Tabel 125. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	1.926.958.217.929,00	1.854.598.838.131,00
Belanja Barang dan Jasa	2.421.257.635.488,98	2.571.197.143.166,28
Belanja Hibah	313.250.004.750,00	290.823.938.445,00
Belanja Bantuan Sosial	103.141.248.725,00	72.337.930.235,00
Belanja Tidak Terduga	5.325.272.212,00	116.184.409,00
Jumlah	4.769.932.379.104,98	4.789.074.034.386,28

Arus keluar kas per 31 Desember 2024 terbesar berasal dari aktivitas belanja barang dan jasa sebesar 50,76% diikuti belanja Pegawai sebesar 40,40% dan jenis belanja lainnya.

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas	<b>Tahun 2024</b>	Tahun 2023
Investasi	$(\mathbf{R}\mathbf{p})$	(Rp)
	(1.488.415.288.707,30)	(1.493.367.508.931,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi Tahun 2024 dan 2023 merupakan realisasi pendapatan daerah dari penjualan aset daerah setelah dikurangi belanja modal pemerintah berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan rincian sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00
2) Arus Keluar Kas	31 Desember 2024	<b>31 Desember 2023</b>

(Rp) (Rp) 1.488.415.288.707,30 1.493.367.508.931,00

Arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.488.415.288.707,30 dan Rp1.493.367.508.931,00 terdiri dari.

Tabel 126. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Tanah	39.241.989.901,00	102.440.925.657,00
Belanja Peralatan dan Mesin	160.535.564.193,00	287.203.939.384,00
Belanja Gedung dan Bangunan	856.812.504.048,00	404.944.131.783,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	423.161.734.129,30	683.514.637.511,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.300.145.086,00	15.263.874.596,00
Belanja Aset Lainnya	363.351.350,00	0,00
Jumlah	1.488.415.288.707,30	1.493.367.508.931,00

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	( <b>Rp</b> )	(Rp)
	(0,00)	(0,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas pendanaan Tahun 2024 dan 2023, yaitu surplus/SiLPA yang dipergunakan untuk menutupi defisit belanja.

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	( <b>Rp</b> )	(Rp)
	0.00	0.00

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas PFK Tahun 2024 dan 2023 dan saldo kas di bendahara pengeluaran atas sisa uang persediaan/tambahan uang, yaitu arus kas dari penerimaan daerah namun bukan merupakan pendapatan daerah, dengan rincian sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	
	(Rp)	( <b>Rp</b> )	
	390.915.553.710,00	513.469.421.000,50	

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp390.915.553.710,00 dan Rp513.469.421.000,50, terdiri dari.

Tabel 127. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	
Penerimaan PFK	390.915.553.710,00	513.469.421.000,50	
Saldo Sisa UP Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	
Jumlah	390.915.553.710,00	513.469.421.000,50	

### 2) Arus Keluar Kas 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp)

390.915.553.710,00 513.469.421.000,50

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris selama Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 390.915.553.710,00 dan Rp513.469.421.000,50. terdiri dari:

Tabel 128. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pengeluaran PFK	390.915.553.710,00	513.469.421.000,50
Saldo Sisa UP Tahun Anggaran Berjalan	0,00	0,00
Jumlah	390.915.553.710,00	513.469.421.000,50

e. Saldo Akhir Kas

Tahun 2024
Tahun 2023
(Rp)
(Rp)
(Rp)
105.253.576.103,04
68.680.226.250,30

Saldo akhir kas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp105.253.576.103,04 dan Rp68.680.226.250,30 terdiri dari:

Tabel 129. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Kas Selama Periode	36.572.869.276,74	(479.861.064.567,78)
Saldo Awal Kas	68.680.226.250,30	548.544.830.563,08
Koreksi Saldo Awal Kas	480.576,00	(3.539.745,00)
Saldo Akhir Kas	105.253.576.103,04	68.680.226.250,30

#### Saldo akhir kas terdiri dari:

-	Kas di Kas Daerah	:	Rp	76.412.749.939,66
-	Kas di BLUD	:	Rp	9.223.068.584,16
-	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	:	Rp	8.734.858.922,22
-	Kas Dana BOSP	:	Rp	6.925.556,00
-	Kas Dana BOK Puskesmas	:	Rp	10.695.973.101,00
-	Piutang Penerimaan atas TGR Daerah	:	Rp	180.000.000,00

#### 6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

LPE menyajikan informasi mengenai nilai ekuitas awal. surplus/defisit - LO dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas serta nilai ekuitas akhir dari pemerintah daerah. Saldo ekuitas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp38.182.518.594.511,15 dan Rp36.517.024.366.824,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	36.517.024.366.824,21	34.753.438.198.736,42
Surplus/(Defisit LO)	1.525.869.620.463,35	943.320.193.856,83
Koreksi Ekuitas Lainnya	139.624.607.223,59	820.265.974.230,96
Ekuitas Akhir	38.182.518.594.511,15	36.517.024.366.824,21

a. Ekuitas awal 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp)

36.517.024.366.824,21 34.753.438.198.736,42

Saldo ekuitas awal Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp36.517.024.366.824,21 dan Rp34.753.438.198.736,42.

b. Surplus/ (defisit)-LO 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp)

1.525.869.620.463,35 943.320.193.856,83

Tahun 2024 Pemerintah Kota Medan mengalami Surplus atas pengakuan pendapatan - LO dan beban yang disajikan pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan sebesar Rp1.525.869.620.463,35.

c. Koreksi ekuitas lainnya 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp)

139.624.607.223,59 820.265.974.230,96

Saldo koreksi Ekuitas lainnya pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp139.624.607.223,59 dan Rp820.265.974.230,96. Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp139.624.607.223,59 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 131. Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan :	147.183.063.030,95
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Tambah Kas Tahun Lalu	480.576,00
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Tambah Piutang Pendapatan Tahun Lalu	983.317.430,10
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Tambah Piutang Lainnya Tahun Lalu	9,84
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Kurang Penyisihan Piutang Tahun Lalu	1.324.386.386,93
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Tambah Persediaan Tahun Lalu	40.379.000,00
Koreksi Ekuitas Atas Reklasifikasi Barang Ekstrakomptabel Ke Aset Tetap	
(Aset Tahun Tahun Sebelumnya)	905.034.528,01
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	128.540.303.297,45
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Tambah Aset Tetap	13.751.920.601,20
Koreksi Ekuitas Atas Penghapusan Akm. Penyusutan Aset Tetap	1.091.809.794,00
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Tambah Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang BOT	1.758.194,80
<ul> <li>Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Kurang Akm. Amortisasasi Aset Tidak Berwujud</li> </ul>	0,02
Koreksi Ekuitas Atas Reklasifikasi Barang Ekstrakomptabel Ke Aset Lain-Lain	
(Aset Tahun Tahun Sebelumnya)	7,00
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Tambah Properti Investasi	543.673.205,60
Pengurangan:	7.558.455.807,36
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Kurang Piutang Lainnya Tahun Lalu	3.147.063.374,50
Koreksi Ekuitas Atas Penghapusan Aset Lainnya	3.134.122.435,00
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Tambah Akm. Penyusutan Properti Investasi	771.099.195,48
Koreksi Ekuitas Atas Mutasi Tambah Utang Tahun Lalu	506.170.802,38
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2024	139.624.607.223,59

d. Ekuitas Akhir 31 Desember 2024 31 Desember 2023 (Rp) (Rp) 38.182.518.594.511,15 36.517.024.366.824,21

Saldo ekuitas akhir Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp38.182.518.594.511,15 dan Rp36.517.024.366.824,21. Saldo ekuitas akhir Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,00% yang dipengaruhi oleh Surplus / Defisit - LO Tahun 2024 sebesar Rp1.525.869.620.463,35 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp139.624.607.223,59.

#### BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

#### 1. Kontijensi

Kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang mempengaruhi laporan keuangan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan jembatan di Jalan Pulo Sicanang (Titi 2) Kecamatan Medan Belawan dengan nomor kontrak 10/SP/DPUKM/APBD/LPSE/2018 tanggal 19 Juli 2018. Nilai kontrak sebesar Rp13.642.443.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Jaya Sukses Prima dengan progres pekerjaan fisik sudah mencapai 30%. Namun sampai saat ini sedang dalam proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- b. Pembangunan Pasar Kampung Lalang Tahun 2019 KSO dengan Budi Mangun dengan nilai kontrak Rp26.288.350.000,00. Sisa pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp21.030.680.000,00. Pengajuan Berita Acara Serah Terima (BAST) belum terlaksana karena pihak kontraktor belum bersedia menandatangani.
- c. Nilai penyertaan modal pada PD Pasar sebesar Rp107.297.593.259,00 adalah nilai investasi berdasarkan perhitungan metode ekuitas. Nilai tersebut belum memperhitungkan kerugian atas kebakaran yang menimpa bangunan Pasar Sukaramai pada tanggal 17 Oktober 2010, sehubungan belum dilakukan perhitungan atas kerugian tersebut.
- d. Pemerintah Kota Medan melaksanakan kerjasama BOT dengan PT Binatama Rusdy Makmur (BRM) sesuai perjanjian Nomor 011/524 tanggal 08 Januari 1990. Perjanjian BOT berupa pembangunan dan pengelolaan gedung parkir Perisai Plaza di atas tanah seluas 1.767 m², sesuai dengan sertifikat HPL Nomor 3 Tahun 1989. Masa konsesi selama 25 tahun ditambah dengan waktu penyerahan lapangan (3 bulan sejak tanggal pengesahan Mendagri yaitu tanggal 9 Mei 1990) ditambah 2,5 tahun untuk masa pembangunan, sehigga perjanjian berakhir pada tanggal 9 Februari 2018. Menurut klausul perjanjian, hak atas seluruh bangunan beserta fasilitas pendukung lainnya, secara otomatis beralih menjadi milik penuh pihak Pemerintah Kota Medan pada saat berakhirnya perjanjian.

Atas perjanjian tersebut PT BRM memperoleh Sertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 642/Aur selama 20 tahun dan berakhir pada tanggal 5 Juli 2013. Selama masa konsesi PT BRM menjaminkan SHGB sebagai hak tangungan kepada PT Sejahtera Bank Umum (SBU), bank yang selanjutnya ditetapkan statusnya sebagai bank terlikuidasi dan seluruh asetnya diserahkan kepada negara, termasuk aset yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Medan. Pada Tahun 2012, aset tanah beserta bangunan perparkiran berlantai 10 di atasnya, dijadikan sebagai objek lelang oleh KPKNL, sesuai risalah lelang Nomor 257/2012 tanggal 17 April 2012. Aset tersebut telah dijual dengan nilai sebesar Rp24.800.888.800,00 dan telah dilunasi oleh pemenang lelang yaitu PT United Rope (UR) pada tanggal 20 April 2012. Sampai dengan saat ini, tanah dan gedung parkir tersebut dikuasai oleh PT United Rope. Dalam perjalanannya PT.United Rope mengajukan pengalihan hak SHGB An. PT Binatama Rusdy Makmur (BRM).

Pemerintah Kota Medan bersedia melakukan pemindahtanganan barang milik daerah tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 apabila KPKNL Medan menarik kembali pembayaran lebih bayar piutang negara sebesar Rp11.018.135.472,00 dari PT BRM sebagai hasil bersih penjualan tanah dan bangunan objek perjanjian dan dibayarkan kepada Pemerintah Kota Medan selaku pemilik HPL. Pada tanggal 26 Maret 2022 Pemerintah Kota Medan telah

melakasanakan pengambilalihan aset Eks Gedung Parkir Perisai Plaza dan saat ini sudah dalam penguasaan oleh Pemko Medan baik secara *de jure* maupun *de facto*. Bangunan dijaga oleh personil satuan polisi pamong praja menunggu pemanfaatan selanjutnya.

#### 2. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Event)

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2024 yang mempengaruhi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Medan TA 2024.



#### BAB VII PENUTUP

Salah satu materi penting dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan adalah disajikannya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Oleh karena itu, melalui Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 yang disajikan dapat disampaikan bahwa secara umum berbagai tujuan dan sasaran strategis serta capaian kinerja 5 (lima) program prioritas pembangunan kota tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 secara umum dapat dipenuhi, meskipun capaian kinerja tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Medan selama ini tentu akan selalu dijadikan modal dasar dan factor dominan untuk melanjutkan pembangunan kota berkelanjutan secara kolaboratif. Sedangkan tantangan dan berbagai hambatan yang masih ditemukan akan dijadikan pelajaran berharga, sekaligus bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Medan.

Sclanjutnya, CaLK Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi bentuk kewajiban transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Medan dalam penyampaian laporan keuangan secara periodik

Pemerintah Kota Medan terus berusaha memenuhi komitmen moral dan etik bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi landasan kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota dimasa yang akan datang, yang sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang dinamis, dalam rangka mewujudkan masyarakat kota yang berkah, maju, dan kondusif.

Akhirnya berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam CaLK Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan sekaligus menjadi umpan balik terhadap perumusan dan penetapan kebijakan umum pembagunan kota pada periode berikutnya, terima kasih.

